



2024

LAPORAN KEBERLANJUTAN
PT PERIKANAN INDONESIA



Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Keberlanjutan 2024

Penerbitan Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024 merupakan wujud nyata pertanggungjawaban Perseroan kepada para pemangku kepentingan sekaligus komitmen untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang dikenal sebagai POJK Keuangan Berkelanjutan. Laporan ini mencerminkan dedikasi Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan ini disusun berdasarkan ketentuan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 (SEOJK 16/2021) tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, laporan ini mengacu pada standar pelaporan internasional, yaitu Global Reporting Initiative (GRI) Standards Universal Tahun 2021, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan, akurat, dan sesuai dengan praktik terbaik global.

Penerbitan laporan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga menegaskan komitmen PT Perikanan Indonesia dalam mendukung keberlanjutan melalui penerapan prinsip transparansi. Laporan ini mempublikasikan secara terbuka berbagai inisiatif dan kegiatan Perseroan yang memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan, khususnya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Dengan demikian, Perseroan memenuhi hak para pemangku kepentingan atas akses informasi yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja keberlanjutan yang telah dicapai.

Melalui penyusunan laporan ini, PT Perikanan Indonesia menunjukkan dedikasinya untuk menjadi pelaku bisnis yang bertanggung jawab, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel. Ke depannya, Perseroan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporan dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan untuk mendukung visi keberlanjutan jangka panjang.

Standar GRI Dan SEOJK

[GRI 2-3] [GRI 2-4] [OJK G.3]

Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024 ini menyajikan kinerja keberlanjutan Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Sebagai laporan keberlanjutan pertama yang diterbitkan oleh PT Perikanan Indonesia, dokumen ini menandai komitmen Perseroan untuk melaporkan kinerja keberlanjutannya secara tahunan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai dampak serta kontribusi Perseroan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). [GRI 2-3]

Data kinerja ekonomi yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini

memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, andal, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Sebagai laporan keberlanjutan perdana, Perseroan belum menerima umpan balik (masukan) terkait laporan keberlanjutan sebelumnya. [OJK G.3] Namun, Perseroan berkomitmen untuk membuka ruang bagi masukan dari pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelaporan di masa mendatang.

Terdapat beberapa data dalam laporan ini yang disajikan kembali akibat perubahan ruang lingkup dan metode perhitungan berdasarkan baseline tahun 2023. Data-data tersebut diberi catatan khusus pada bab terkait untuk memastikan transparansi dan kejelasan. Selain itu, informasi mengenai penyajian kembali data juga diungkapkan secara ringkas dalam bagian Ikhtisar Keberlanjutan, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami konteks dan perubahan yang terjadi. [GRI 2-4]

PT Perikanan Indonesia akan terus berupaya menyempurnakan proses pelaporan dengan memastikan konsistensi, akurasi, dan relevansi informasi, serta mengintegrasikan masukan dari pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan jangka panjang.

**Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan
2024 PT Perikanan Indonesia**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia, menyatakan bahwa kami telah memeriksa dan menyetujui Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024. Kami menegaskan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam laporan tersebut telah dimuat secara lengkap dan akurat, serta menjadi tanggung jawab penuh Dewan Komisaris.

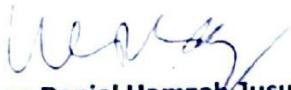
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2025

Dewan Komisaris



Dedit Herdiawan Ashaf
Komisaris Utama


Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf
Komisaris
Nurikasari
Komisaris Independen
Mohamad Abdi
Komisaris Independen

Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2024 PT Perikanan Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi PT Perikanan Indonesia, menyatakan bahwa kami telah memeriksa dan menyetujui Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024. Kami menegaskan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam laporan tersebut telah dimuat secara lengkap dan akurat, serta menjadi tanggung jawab penuh Direksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2025

Direksi



Muhammad Rizali Umarella
Direktur Infrastruktur
(Plt. Direktur Utama)



Eddi Santosa
Direktur Keuangan



Rene van Joost
Direktur Komoditi

Daftar Isi

Isi	Halaman
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	9
Aspek Ekonomi	9
Aspek Lingkungan Hidup	13
Aspek Sosial	13
Kilas Peristiwa Keberlanjutan	14
Laporan Manajemen	18
Laporan Direksi	19
Kebijakan untuk Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan	19
Tentang Laporan Keberlanjutan	22
Standar GRI dan SEOJK	22
Penjaminan Eksternal	23
Proses Penetapan Topik Material	23
Profil Perusahaan	25
Identitas Perusahaan	25
Riwayat Singkat Perusahaan	26
Visi Misi Perusahaan	27
Budaya dan Nilai Perusahaan	27
Kegiatan Usaha Perusahaan	28
Rantai Pasokan	29
Peta Operasional	31
Keanggotaan pada Asosiasi	32
Perubahan yang Bersifat Signifikan pada Perusahaan	33
Tata Kelola Berkelanjutan	34
Prinsip Dasar GCG	34
Struktur Tata Kelola	35
Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	40
Peran Badan Tatakelola Tertinggi dalam Mengawasi Pengelola Dampak	42
Strategi Keberlanjutan	46
Pernyataan Komitmen Berkelanjutan	47
Strategi dan Praktik Penerapan Berkelanjutan	49
Proses Mengelola Dampak	53
Laporan Keberlanjutan	55
Komunikasi Kejadian Luar Biasa	56
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/ Jasa Berkelanjutan	57
Produk yang Unggul dan terjaga Mutunya	61
Produk Serta Layanan yang Adil dan Setara	63
Membangun Budaya Keuangan Berkelanjutan	70
Kinerja Ekonomi	72
Nilai Ekonomi yang Diterima dan Didistribusikan	77
Pajak	78
Dukungan terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal	79
Implikasi Finansial terhadap Perubahan Iklim	80
Survey Kepuasan Pemasok	80
Distribusi Nilai Ekonomi	81

Kinerja Lingkungan	81
Energi	82
Aspek Air	83
Keanekaragaman Hayati	83
Emisi	84
Aspek Limbah dan Efluen	87
Membangun SDM yang Kompetitif Secara Global	88
Aspek Ketenagakerjaan	89
Kebijakan, Sistem Manajemen dan Prosedur K3	97
Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	102
Pengaduan Masyarakat	108
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	109
Lembar Umpam Balik	114
Tautan TPB/SGG's dalam Standar GRI	116
Indeks Konten GRI	129

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

PT Perikanan Indonesia adalah Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perikanan dan merupakan bagian anggota holding pangan yaitu ID FOOD. PT Perikanan Indonesia menunjukkan kinerja keberlanjutan yang positif dalam bidang perikanan untuk pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab. Perusahaan mengimplementasikan praktik penangkapan ikan ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung regenerasi stok ikan.

Selain itu, PT Perikanan Indonesia aktif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan. Inisiatif ini membantu menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi laut di kalangan nelayan lokal.

Perusahaan juga berkomitmen untuk melakukan pengurangan limbah dan penggunaan teknologi hijau dalam proses produksi. Upaya ini mendukung target keberlanjutan jangka panjang sekaligus menjaga kualitas produk agar tetap aman dan sehat bagi konsumen.

Aspek Ekonomi

[GRI 2-2] [OJK B.1] [OJK F.26]

PT Perikanan Indonesia memiliki 3 (tiga) segmen usaha yang dimiliki yang terfokus pada industri Perikanan. Tiga segmen tersebut meliputi *Fish Processing & trading*, jasa kepelabuhanan dan Pabrik pakan. Berdasarkan kegiatan usaha tersebut PT Perikanan Indonesia berhasil meningkatkan kontribusi ekonomi dengan memperkuat rantai pasok dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan perusahaan sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor perikanan.

Perusahaan juga mengoptimalkan efisiensi operasional dengan teknologi penangkapan dan pengolahan ikan yang modern, sehingga menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk. Inovasi ini membantu memperkuat daya saing produk di pasar global. Selain itu, PT Perikanan Indonesia aktif mendukung UMKM dan nelayan lokal melalui kemitraan strategis dan program pembinaan usaha, meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas pesisir.

Berdasarkan pencapaian tersebut maka PT Perikanan Indonesia memiliki hasil pencapaian Produksi setiap segmen sebagai berikut:

Uraian	Satuan	RKAP 2024	Realisasi 2024	Pencapaian (%)
Fish Processing and Trading				
Penangkapan	Ton	507	183	36%
Pembelian	Ton	13.662	6.014	44%
Budidaya	Ton	70	49	70%
Pengolahan	Ton	8.941	2.170	24%
Jasa Kepelabuhanan				
Es	Ton	346.942	227.215	65%
<i>Cold Storage</i>	Ton	165.282	154.623	94%

Ruang & Tanah	M2	6.512.049	5.786.599	89%
Tambat Labuh	Kapal	329.229	229.462	70%
Bengkel & Dok	Kapal	1.777	1.177	66%
Listrik	kWh	10.210.359	25.863.190	253%
Air	M3	1.192.634	955.682	80%
Bahan Bakar Minyak (BBM)	KL	33.114	571.482	1726%
Pakan				
Pakan Ikan	Ton	2.486	854	34%
Pakan Udang	Ton	848	81	10%

Segmen Fish Processing and Trading

- **Penangkapan**

Realisasi produksi penangkapan tahun 2024 adalah sebesar 183 ton atau 36% dari target RKAP sebesar 507 ton. Penyebab tidak tercapainya target produksi penangkapan adalah sebagai berikut:

1. Cuaca buruk, gelombang tinggi.
2. Penghentian sementara kegiatan FPT (operasional kapal) pada bulan Juni s/d Juli.
3. Harga ikan di rumpon tinggi.
4. Proses verifikasi dokumen kapal.

Strategi selanjutnya upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan adalah sebagai berikut:

1. Kapal di kerjasamakan.
2. Menunggu harga ikan di rumpon stabil.
3. Menunggu musim ikan.
4. Memproses dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Pembelian**

Realisasi produksi pembelian bahan baku tahun 2024 adalah sebesar 6.014 ton atau 44% dari target RKAP sebesar 13.662 ton. Penyebab tidak tercapainya target produksi pembelian yaitu:

1. Kondisi pasar yang lesu mengakibatkan daya beli ikan ke nelayan menurun karena ikan yang sudah dibeli tidak terserap pasar.
2. Adanya kebijakan baru dari Manajemen terkait pembelian ikan di sebagian besar Cabang dan Unit

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian ikan untuk pemenuhan PO yang sudah ada.
2. Memaksimalkan penjualan stock ikan yang telah ada.

- **Budidaya**

Realisasi produksi budidaya tahun 2024 adalah sebesar 49 ton atau 71% dari target RKAP sebesar 70 ton. Penyebab tidak tercapainya target produksi budidaya yaitu fluktuasi kondisi lingkungan akibat cuaca menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan udang sehingga udang lebih mudah terserang penyakit serta banjir rob yang membawa bibit penyakit masuk ke dalam tambak. Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan yaitu melakukan pemberian suplemen dan mineral yang dapat menstabilkan kondisi udang dan air di tambak.

- **Pengolahan**

Realisasi produksi pengolahan tahun 2024 adalah sebesar 2.170 ton atau 24% dari target RKAP sebesar 8.941 ton. Penyebab tidak tercapainya target produksi pengolahan yaitu:

1. Proses Sertifikasi SKP dan HACCP pada Unit Muara Baru dalam proses pengajuan.
2. Sesuai arahan Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP), produksi pengolahan hanya berfokus pada Unit Simeulue.

Tindaklanjut dan upaya yang telah dilakukan untuk keberlanjutan delanjutnya diantaranya:

1. SKP Unit Muara Baru telah terbit dan dalam Proses Pengajuan Sertifikat HACCP.
2. Fokus Penjualan *Current Stock* oleh Cabang dan Unit serta meningkatkan potensi Pendapatan Jasa Kepelabuhanan.

Segmen Jasa Kepelabuhanan

- **Es**

Produksi Es tahun 2024 mencapai 227.315 Ton atau 66% dari target RKAP sebesar 346.942 Ton. Tidak tercapainya target produksi es dikarenakan sarana produksi es di beberapa Cabang kurang optimal dan beberapa mengalami kerusakan sebagai berikut:

1. Pabrik es Cabang Sorong evaporator mengalami kebocoran dan ice cane sebagian rusak.
2. Pabrik es Cabang Ambon kompresor mengalami kerusakan.
3. Pabrik es Cabang Bitung 2 (dua) unit produksi mengalami kerusakan.
4. Pabrik es Cabang Bacan terdapat kerusakan 20 unit ice can.

Kerusakan tersebut menyebabkan volume produksi terbatas dan kurang maksimal. Saat ini sedang diusahakan untuk dilakukan proses perbaikan.

- **Cold Storage**

Realisasi pelayanan *Cold Storage* tahun 2024 mencapai 154.623 Ton atau 94% dari target RKAP sebesar 165.282 Ton.

- **Ruang & Tanah**

Realisasi penyewaan ruang & tanah tahun 2024 mencapai 5.786.599 m² atau 89% dari target RKAP sebesar 6.512.049 m². Kendala pada segmen usaha ruang & tanah adalah beberapa fasilitas ruang & bangunan di cabang dan unit sudah mengalami kerusakan fisik, penurunan tanah di Kawasan Muara Baru seperti di Muara Baru Center (MBC) yang sering terendam, tarif ruang & bangunan dari tahun 2018 belum mengalami kenaikan. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan sarana dan prasarana ruang & bangunan yang mengalami kerusakan, peninggian area MBC dan sarana dan prasarana untuk mobilitas mitra, penyesuaian tarif ruang & bangunan, sudah dilakukan sosialisasi para penyewa di Jakarta terkait penyesuaian tarif sewa.

- **Tambat Labuh**

Realisasi pelayanan tambat labuh tahun 2024 mencapai 229.462 kapal atau 70% dari target RKAP sebesar 329.229 kapal.

- **Bengkel & Dok**

Realisasi pelayanan bengkel & dok tahun 2024 mencapai 1.177 kapal atau 66% dari Target RKAP sebesar 1.777 kapal. Salah satu penyebab tidak tercapainya segmen

jasa bengkel & dok adalah rencana KSU doking dengan PT Ratson Maritim Indonesia di Sorong terkendala status lahan tukar guling, dock unit Tegal ada kerusakan pada roda kredel dan kereta sehingga produksi tidak optimal, dock Cabang Bitung ada kerusakan rel dan kereta sehingga produksi/operasional tidak optimal, dock Cabang Sorong pada slipway (500 GT) terjadi kerusakan pada sling.

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan adalah menindaklanjuti status lahan tukar guling dengan mengurus sertifikat lahan ke BPN, dock unit Tegal saat ini sedang perbaikan secara bertahap, dock Cabang Bitung dan Cabang Sorong dalam proses perbaikan.

- **Listrik**

Realisasi pelayanan listrik tahun 2024 mencapai 25.863.190 kWh atau 253% dari Target RKAP sebesar 10.210.359 kWh. Kendala pada segmen listrik yaitu sarana dan prasarana kelistrikan seperti genset dan travo sering mengalami gangguan teknis sehingga perlu peremajaan sarana dan prasarana kelistrikan.

- **Air**

Realisasi pelayanan air tahun 2024 mencapai 955.682 m³ atau 80% dari Target RKAP sebesar 1.192.634 m³.

- **Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Realisasi pelayanan BBM tahun 2024 mencapai 571.482 KL atau 1.726% dari Target RKAP sebesar 33.114 KL.

Segmen Pakan

Realisasi produksi pakan ikan dan udang tahun 2024 mencapai 935 Ton atau 28% dari Target RKAP sebesar 3.333 Ton. Produksi pakan ikan terkendala proses pembayaran bahan baku yang menyebabkan pengadaan bahan baku terhambat, belum beroperasinya mesin pakan apung dan pabrik berhenti operasional. Untuk pakan udang permintaan pakan yang mayoritas ukuran kecil (*crumble*), mesin (*crumble*) yang kapasitas kecil sehingga menghambat/memperlambat produksi, masih terbatasnya customer pakan udang yang bisa pembayaran cash dan pabrik berhenti operasional.

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan terkait pakan ikan adalah berkoordinasi untuk proses pengadaan dan pembayaran dan percepatan perbaikan mesin extruder serta mencari mitra yang akan mengoperasionalkan pabrik. Untuk pakan udang yaitu menawarkan ke customer untuk bisa memakai pakan yang ukuran besar, mengadakan dies pakan udang ukuran 1mm, mencari customer yang dapat transaksi secara cash dengan volume yang besar serta mencari mitra yang akan mengoperasionalkan pabrik.

Kinerja tahun 2024 Perseroan memiliki kinerja yang cukup baik dari segi bisnis dan keberlanjutan usaha, hal tersebut mengingat usaha perikanan masih memiliki peluang yang besar dan dapat memberikan dampak yang positif bagi pemenuhan pangan nasional. Selain itu diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat luas khususnya yang bersinggungan langsung dengan usaha perikanan. Dengan strategi dan kebijakan strategis yang dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2024, diharapkan dapat menjadi pembuktian atas komitmen Perseroan terhadap perkuatan ekosistem hulu ke hilir industri pangan nasional.

Aspek Lingkungan Hidup

Segmen usaha yang dimiliki PT Perikanan Indonesia menggunakan sumber energi dalam operasionalnya serta menghasilkan limbah sebagai dampak operasinya. Berikut datanya:

Uraian	Satuan	2024	2023
Penggunaan Energi			
Penggunaan Listrik	mWH	14.967	14.666
Penggunaan BBM	liter	10.420	13.080
Penggunaan air	M3	648.341	677.859
Volume Limbah			
Limbah B3	Ton	4	4
Limbah Non B3	Ton	12	12
Pelestarian Keanekaragaman Hayati			
Luas Area Penghijauan		15	10
Dana Pelestarian Alam		5.069.583	15.017.500

Aspek Sosial

PT Perikanan Indonesia terus berkomitmen terhadap keberlanjutan perusahaan. Salah satu aspek yang mendukung keberlanjutan perusahaan yaitu aspek sosial di mana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan sosial di sekitarnya melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Uraian	Satuan	2024	2023
Ketenagakerjaan			
Jumlah pegawai	Orang	150	606
Jumlah pegawai wanita		37	111
Talent perempuan	persentase	33%	4%
Tingkat rekrutmen	persentase	1%	-
Rata rata jam pelatihan pegawai	Jam pelatihan/tahun	90%	75%
Jumlah sertifikasi keahlian yang dimiliki Pegawai	sertifikasi keahlian pegawai	3	7
Jumlah mitra nelayan	Orang	1305	1205
Total penyaluran dana Community Involvement and Development (CID)	Rp Juta	128.879.509	94.028.833
Total penyaluran dana PUMK	Rp Miliar	-	-
Total Penyaluran dana Non-CID	Rp Juta	1.095.500	1.414.000

Realisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Rp Juta	129.975.009	95.442.833
Jumlah mitra binaan PUMK		68	69
Program Sosial Untuk Komunitas Perusahaan		Beasiswa bagi anak nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan (sebanyak 3 orang)	0

Kilas Peristiwa Keberlanjutan

Januari



PT Perikanan Indonesia melaksanakan kegiatan TJSL Berbagi Ikan dan Snack Sehat untuk Balita Stunting. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi jumlah penderita stunting di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sekaligus memperkenalkan produk Tukato milik Perusahaan.

April



PT Perikanan Indonesia bersama ID Food Group melaksanakan kegiatan TJSN Mudik Bersama BUMN dengan tujuan Surabaya, Semarang, Solo dan Yogyakarta yang diikuti oleh 20 orang pemudik yang berasal dari Pegawai dan masyarakat sekitar wilayah operasional PT Perikanan Indonesia.

Mei



PT Perikanan Indonesia bersama ID Food Group melaksanakan program Kolaborasi TJSN di sekitar area operasional Pabrik Pakan Subang, Jawa Barat. Program tersebut mencakup empat bidang utama: pendidikan melalui bantuan peralatan belajar mengajar untuk TK; lingkungan melalui kegiatan penghijauan; pengembangan UMKM melalui pelatihan budidaya bagi kelompok tani; serta sosial kemasyarakatan melalui santunan anak yatim dan renovasi masjid.

Juni



PT Perikanan Indonesia menyalurkan hewan qurban Idul Adha 1445 H ke Masjid Al Hidayah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara.

Juli

PT Perikanan Indonesia menyalurkan beasiswa anak berprestasi yang memiliki latar belakang orang tua yang berprofesi sebagai nelayan. sebanyak tiga siswa berprestasi menerima bantuan beasiswa.

Agustus

PT Perikanan Indonesia menyerahkan bakti sosial kepada Panti Asuhan PYI Yatim & Zakat Cabang Tebet Jakarta Selatan. Bantuan berupa ikan sebagai upaya menambah asupan gizi bagi anak-anak penghuni panti asuhan.

November

Dalam upaya mendukung pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis, PT Perikanan ikut serta memberikan Makan Bergizi Gratis berbahan dari ikan kepada 600 siswa di Sekolah Dasar yang berada di sekitar wilayah operasional PT Perikanan Indonesia di Muara Baru Jakarta Utara.

Desember

Dalam rangka berbagi kasih di Hari Natal, PT Perikanan Indonesia memberikan santunan kepada Panti Asuhan & Jompo Berkat Kasih Immanuel

Laporan Manajemen



Muhammad Rizali Umarella

Plt. Direktur Utama
Acting President Director

Laporan Direksi

Directors Report (OJK D.1)

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, karena PT Perikanan Indonesia, sebagai anggota holding ID FOOD, telah sukses menyelesaikan tahun 2024 dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan berat, kami bersyukur bisa mengatasinya dengan kerja keras, dedikasi, dan kerjasama semua pihak.

Sepanjang tahun 2024, isu lingkungan tetap menjadi perhatian utama global, termasuk perubahan iklim, kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Kami berkomitmen terus mendukung upaya pelestarian lingkungan demi keberlanjutan usaha dan masa depan yang lebih baik.

Sebagai anak perusahaan BUMN, PT Perikanan Indonesia senantiasa berusaha memajukan ketahanan pangan Indonesia serta turut berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai usaha untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam jangka Panjang.

Kebijakan untuk Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan [OJK E.5]

Dalam merespon tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2024, PT Perikanan Indonesia secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inisiatif dan kebijakan strategis. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya Perseroan dalam mewujudkan kegiatan berkelanjutan yang senantiasa memperhatikan keselarasan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kebijakan yang dibuat Perseroan mengacu kepada RKAP yang disusun setiap tahunnya sesuai dengan rangkaian peraturan dan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, diantaranya yang terbaru adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Berdasarkan pendiriannya Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan memupuk keuntungan serta pengembangan sistem bisnis perikanan, salah satunya kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.

Kinerja Keberlanjutan

Ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% (c-to-c), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 5,05% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini masih berada di bawah target APBN tahun 2024 sebesar 5,2%. Pada triwulan IV-2024, pertumbuhan tercatat 5,02% (y-on-y), ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 4,98% serta investasi yang tumbuh 5,03%. Namun demikian, kinerja ekspor hanya meningkat 7,63%, lebih rendah dibandingkan impor yang tumbuh 10,36%, sehingga memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kenaikan sekitar 9,80%, sementara industri pengolahan masih tumbuh relatif moderat di angka 4,43%.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Momentum ini dimanfaatkan oleh PT Perikanan Indonesia untuk melakukan penguatan terhadap proses produksi

dan distribusinya untuk menjaga dan memenuhi ketahanan pangan nasional. Berikut adalah capaian Perseroan pada tahun 2024.

- **Kinerja Aspek Ekonomi**

Pada tahun 2024, PT Perikanan Indonesia berhasil menunjukkan kinerja ekonomi yang tangguh di tengah dinamika makro ekonomi nasional dan global. Meskipun Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang sempat naik ke 3,1% dan nilai tukar Rupiah terdepresiasi hingga Rp16.162 per dolar AS akibat faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve dan arus modal asing keluar, perusahaan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pendapatan total menjadi Rp416,9 miliar. Pendapatan ini diperoleh dari berbagai segmen utama, yaitu Kepelabuhanan senilai Rp241,5 miliar, Fish Processing and Trading sebesar Rp167,8 miliar, serta Pakan dengan kontribusi Rp7,6 miliar.

Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko ekonomi dan menjaga kelangsungan usaha di sektor perikanan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor eksternal. PT Perikanan Indonesia memanfaatkan strategi diversifikasi segmen usaha dan efisiensi operasional secara berkelanjutan untuk mempertahankan daya saingnya. Selain itu, perusahaan aktif mengadopsi inovasi teknologi serta memperkuat jaringan kemitraan, yang menjadi fondasi dalam meningkatkan produktivitas dan pencapaian target ekonomi secara menyeluruh.

Dengan pijakan performa ekonomi yang kuat, PT Perikanan Indonesia optimis dapat terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi visi perusahaan ke depan.

- **Kinerja Aspek Lingkungan**

Pada tahun pelaporan 2024, PT Perikanan Indonesia terus memperkuat komitmen mereka dalam menjaga aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. PT Perikanan Indonesia berinisiatif untuk mendukung kelestarian lingkungan dan pengelolaan hingga pengurangan sampah. Program mendukung kelestarian lingkungan berupa penerbitan kebijakan pengelolaan sampah pada setiap kawasan Pelabuhan sehingga diharapkan dapat menekan limbah yang akan timbul dan aman bagi lingkungan.

Melalui langkah-langkah tersebut, PT Perikanan Indonesia berupaya mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi visi strategis perusahaan ke depan.

- **Kinerja Aspek Sosial**

PT Perikanan Indonesia secara aktif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program penyaluran Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun pelaporan, jumlah mitra binaan PT Perikanan Indonesia tercatat sebanyak 69 mitra yang tersebar di seluruh wilayah operasi perusahaan. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT Perikanan Indonesia telah merealisasikan anggaran program TJSL sebesar Rp129.975.009,- yang terdiri dari Program TJSL Non PUMK *Community Involvement Development* (CID) sebesar Rp128.879.509,- yang dilaksanakan pada pilar sosial, ekonomi dan lingkungan kemudian Program TJSL Non PUMK Non PUMK *Community Involvement Development* (CID) sebesar Rp1.095.500,- yang dilaksanakan pada pilar hukum dan tatakelola serta Program TJSL PUMK sebesar Rp0,- /tidak ada penyaluran PUMK Kolaborasi dengan PT BRI (Persero) Tbk.

PT Perikanan Indonesia terus mendorong untuk meningkatkan integrasi rantai pasok pangan sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem pangan bersama UMKM dengan terus menjalin kemitraan di berbagai sektor, mulai dari hulu sebagai penyedia bahan baku hingga hilir untuk semua produk Perikanan. PT Perikanan Indonesia terus berusaha untuk berinovasi untuk menyediakan produk dan layanan kepada konsumen agar konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Melalui berbagai inovasi tersebut, Perseroan berharap dapat menjamin bahwa standar kualitas yang terbaik dapat tetap diberikan pada produk dan layanan yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk memastikan kualitas yang konsisten kepada konsumen, PT Perikanan Indonesia menyediakan saluran pengaduan sebagai wujud pemenuhan hak normatif konsumen/pemberi kerja. Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) pada tahun 2024 mencapai 3,14. Pengambilan data menggunakan metode penilaian pada seluruh pelanggan PT Perikanan Indonesia.

- Strategi Pencapaian Target

Strategi pencapaian target PT Perikanan Indonesia tahun 2025:

1. Pengembangan Produk — riset & inovasi untuk diversifikasi produk bernilai tambah sesuai permintaan pasar ekspor.
2. Transformasi Digital — implementasi sistem IT terpadu untuk efisiensi operasional dan monitoring produksi.
3. Peningkatan Kapasitas — investasi alat produksi modern dan pelatihan SDM guna mendukung peningkatan kualitas dan volume.
4. Kemitraan Strategis — memperluas jaringan kerja sama dengan BUMN dan mitra internasional untuk akses pasar dan teknologi.
5. Optimalisasi Aset — konsolidasi dan pemanfaatan aset pelabuhan serta fasilitas produksi untuk menekan biaya dan tingkatkan layanan.
6. Pemasaran dan Ekspor — penguatan branding, promosi aktif, serta penetrasi pasar baru dengan analisis target pasar yang tepat.

- Prospek Bisnis 2025

Tahun 2025 menghadirkan peluang emas bagi sektor perikanan Indonesia dengan produksi nasional mencapai 18,26 juta ton hingga Oktober 2024, didukung peningkatan nilai ekspor perikanan yang tembus USD 5,9 miliar pada 2024. Tren global yang meningkat akan makanan laut berkualitas dan produk berkelanjutan membuka jalan lebar untuk ekspansi di pasar domestik maupun ekspor. Rencana kerja perusahaan tahun 2025 diarahkan pada tiga sektor utama, yaitu:

1. Pengolahan dan Perdagangan Ikan, dengan fokus pada diversifikasi produk bernilai tambah dan peningkatan akses pasar ekspor.
2. Bisnis Kepelabuhanan, melalui penguatan layanan logistik, efisiensi operasional, serta konsolidasi aset pelabuhan strategis.
3. Bisnis Pakan Ikan, yang akan dioptimalkan melalui pengembangan kemitraan sewa dan kerja sama dengan mitra potensial untuk memperluas basis produksi.

Arah pengembangan PT Perikanan Indonesia pada tahun 2025 difokuskan pada:

- Transformasi digital di seluruh lini proses bisnis.
- Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui diversifikasi dan inovasi.
- Penambahan alat produksi di sektor budidaya dan pengolahan.
- Optimalisasi aset untuk mendukung efisiensi biaya.
- Penguatan sinergi antar-BUMN serta kerja sama dengan mitra strategis untuk membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

- Apresiasi
Direksi dengan tulus menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan PT Perikanan Indonesia atas dedikasi dan kerja kerasnya yang luar biasa sehingga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan dan mitra yang selalu mendukung serta bersinergi bersama kami. Mari kita terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tentang Laporan Keberlanjutan

Penerbitan Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya pertanggungjawaban Perseroan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik—atau yang dikenal sebagai POJK Keuangan Berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini mengikuti ketentuan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 (SEOJK 16/2021) tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, laporan ini juga disusun sesuai dengan persyaratan pelaporan dalam Global Reporting Initiative (GRI) Standards Universal Tahun 2021, yang menjadi acuan internasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi keberlanjutan.

Lebih dari sekadar kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerbitan Laporan Keberlanjutan ini mencerminkan komitmen kuat PT Perikanan Indonesia dalam mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan menerapkan transparansi secara menyeluruh. Melalui publikasi ini, Perseroan memaparkan secara terbuka berbagai kegiatan dan inisiatif yang secara nyata berkontribusi terhadap keberlanjutan, sehingga memenuhi hak pemangku kepentingan atas akses informasi yang akurat dan lengkap. Khususnya, laporan ini menyoroti pencapaian kinerja keberlanjutan Perseroan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), yang tidak hanya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Perseroan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masa depan.

Standar GRI dan SEOJK

[GRI 2-3] [GRI 2-4] [OJK G.3]

Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024 ini menyajikan kinerja keberlanjutan Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Laporan ini merupakan laporan keberlanjutan pertama yang diterbitkan oleh PT Perikanan Indonesia dan direncanakan akan dipublikasikan pada tahun 2025, sebagai wujud komitmen Perseroan dalam memenuhi kewajiban pelaporan sesuai standar yang ditetapkan serta meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan. [GRI 2-3]

Data kinerja ekonomi yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Sebagai laporan keberlanjutan pertama, Perseroan belum menerima umpan balik (masukan) dari laporan keberlanjutan tahun sebelumnya. [OJK G.3] Meski demikian, PT Perikanan Indonesia

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan di masa mendatang dengan membuka ruang bagi masukan dari para pemangku kepentingan, guna memastikan laporan ini dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka secara lebih baik.

Penjaminan Eksternal

[GRI 2-5] [OJK G.1]

Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan telah dipenuhi secara optimal dalam proses penyusunannya, PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk terus menyempurnakan pendekatan pelaporan sesuai standar yang berlaku. Namun, untuk Laporan Keberlanjutan periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, Perseroan belum menunjuk penyedia jasa *independent assurance* untuk melakukan verifikasi eksternal.

Meskipun demikian, penyusunan laporan ini telah dilakukan dengan mengacu pada pedoman Global Reporting Initiative (GRI) Standards Universal Tahun 2021, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021. Perseroan memastikan bahwa proses penyusunan laporan telah mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akurasi, dan relevansi. Ke depannya, Perseroan akan mempertimbangkan penunjukan penyedia jasa *independent assurance* untuk memperkuat kredibilitas dan keandalan laporan, sekaligus memberikan keyakinan lebih kepada pemangku kepentingan terhadap komitmen keberlanjutan Perseroan.

Proses Penetapan Topik Material

Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia Tahun 2024 telah disusun dengan mengacu pada delapan prinsip pelaporan keberlanjutan sebagaimana ditetapkan dalam Global Reporting Initiative (GRI) Standards Universal Tahun 2021. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa laporan ini berkualitas tinggi, relevan, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan delapan prinsip tersebut dalam penyusunan laporan:

1. Akurasi: Perseroan menyajikan informasi yang akurat, terperinci, dan dapat dipercaya untuk memungkinkan penilaian yang tepat terhadap dampak organisasi terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).
2. Keseimbangan: Laporan ini disusun secara netral dan seimbang, mencerminkan baik dampak positif maupun negatif dari kegiatan Perseroan, sehingga memberikan gambaran yang jujur dan transparan.
3. Kejelasan: Informasi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang jelas dan struktur yang terorganisasi, agar dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.
4. Keterbandingan: Perseroan memastikan informasi disusun dan dilaporkan secara konsisten, memungkinkan analisis perubahan dampak organisasi dari waktu ke waktu, yang mendukung evaluasi kinerja keberlanjutan jangka panjang.
5. Kelengkapan: Laporan ini menyediakan informasi yang memadai dan menyeluruh, mencakup semua aspek material yang relevan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai dampak organisasi selama periode pelaporan.
6. Konteks Keberlanjutan: Informasi dalam laporan ini disajikan dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kontribusi Perseroan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.
7. Ketepatan Waktu: Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan laporan secara rutin dan tepat waktu, memastikan informasi tersedia bagi pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

8. Keterverifikasi: Proses pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan analisis data dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diverifikasi kebenarannya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan 2024 tidak hanya memenuhi standar pelaporan internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kami sangat menghargai komentar, ide, dan umpan balik dari para pembaca sebagai bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan di masa mendatang. Laporan ini tidak hanya tersedia dalam versi cetak, tetapi juga dapat diakses dan diunduh oleh para pemangku kepentingan melalui situs web resmi Perseroan di www.perikananindonesia.co.id.

Kami mengundang tanggapan, saran, dan masukan yang konstruktif untuk memperkaya isi laporan kami. Silakan hubungi kami melalui saluran berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Perikanan Indonesia

Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara – 14440

Telepon: (021) 6679604

Faksimile: (021) 6690523

Email: corcomm@perikananindonesia.co.id , persuratan@perikananindonesia.co.id

Situs Web: www.perikananindonesia.co.id

Dengan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk menyusun laporan yang semakin transparan, relevan, dan mendukung visi keberlanjutan Perseroan.

Daftar Topik Material

[GRI 3-1] [GRI 3-2] [GRI 3-3]

Dalam periode pelaporan 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, PT Perikanan Indonesia, sebagai bagian dari ID FOOD, tidak mengalami perubahan signifikan dan strategis, baik dalam struktur organisasi maupun rantai pasokannya. Oleh karena itu, tidak terdapat perubahan material dalam daftar topik material yang telah ditetapkan beserta batasannya.

Topik material yang diidentifikasi dalam Laporan Keberlanjutan ini tetap relevan dan mencerminkan isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) Perseroan, serta kepentingan para pemangku kepentingan. Proses identifikasi topik material dilakukan sesuai dengan pedoman Global Reporting Initiative (GRI) Standards, dengan mempertimbangkan konteks operasional Perseroan, dampak aktivitas bisnis, serta ekspektasi pemangku kepentingan. Perseroan akan terus memantau dan mengevaluasi topik material secara berkala untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan lingkungan bisnis dan keberlanjutan di masa mendatang.

Profil Perusahaan

Identitas dan Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Perikanan Indonesia
Tanggal Pendirian	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Januari 1990, bernama Perum Prasarana Perikanan Samudera • 7 April 2000, bernama Perum Prasarana Perikanan Samudera • 23 Januari 2013, Perum Prasarana Perikanan Samudera menjadi Perum Perikanan Indonesia • 13 Juli 2021, Perum Perikanan Indonesia menjadi PT Perikanan Indonesia (Persero) • 15 September 2021, Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) (PP No. 99 Tahun 2021) • 20 Januari 2022, PT Perikanan Indonesia (Persero) menjadi PT Perikanan Indonesia
Dasar Hukum Pendirian Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera • Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia • Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) • Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
Akta Perubahan Terakhir	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbatas PT Perikanan Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 22 yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2024 dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan., Notaris di Jakarta, Akta serta perubahan pengalihan Sahamnya yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0074656 tanggal 27 Maret 2024.

Bidang Usaha	Perikanan (perdagangan dan pengolahan ikan, jasa kepelabuhanan dan pakan)
Modal Dasar	Rp510.481.807.481,-
Modal Disetor	Rp222.106.000.000,-
Jumlah Karyawan	150 Orang (2024)
Jumlah Aset	Rp2.540.753.017.741,-
Alamat Kantor Pusat	Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon/Fax	(021) 6694822, (021) 6690523
E-mail	info@perikananindonesia.co.id
Website	www.perikananindonesia.co.id
Media Sosial	

Riwayat Singkat Perusahaan

PT Perikanan Indonesia merupakan anak perusahaan Holding BUMN Pangan ID FOOD yang bergerak di bidang pengelolaan usaha perikanan. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang yang berasal dari perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013, entitas tersebut menjadi Perum Perikanan Indonesia dengan mandat utama mengelola aset negara, menyelenggarakan usaha barang dan jasa, serta mengembangkan sistem bisnis perikanan untuk mendukung nelayan maupun masyarakat perikanan secara luas.

Pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, Perum Perikanan Indonesia resmi diubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mengakibatkan seluruh kekayaan, hak, kewajiban, serta hubungan kerja dengan karyawan beralih sepenuhnya kepada PT Perikanan Indonesia (Persero).

Transformasi berlanjut pada 15 September 2021, ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero). Merger ini memperkuat struktur bisnis dan kapasitas usaha perusahaan dalam mengelola industri perikanan nasional. Penyesuaian lebih lanjut dilakukan melalui Akta Nomor 03 tanggal 2 Desember 2021 oleh Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., yang menetapkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp495.216.807.481.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 27 Maret 2024, dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Jakarta, dan telah dicatat dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0074656 tanggal 27 Maret 2024.

Pasca penggabungan, PT Perikanan Indonesia resmi menjadi bagian dari Holding BUMN Industri Pangan (ID FOOD). Sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional, Perseroan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi perikanan, penguatan rantai pasok, serta pengembangan model bisnis inklusif yang memberdayakan nelayan nasional melalui skema offtake hasil perikanan.

Visi

Menjadi Perusahaan Perikanan terbesar di Indonesia di tahun 2026

Misi

- Menghasilkan produk berkualitas terbaik dan diakui di Industri Perikanan domestik maupun internasional yang selaras dengan Environmental Sustainability.
- Memberikan layanan terbaik untuk mendukung industri perikanan.

Budaya dan Nilai Perusahaan

PT Perikanan Indonesia memiliki tata nilai dan budaya perusahaan sebagai dasar untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan dalam bisnis dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas yang tertuang dalam core value AKHLAK.

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggungjawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

Beredikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

- Menjaga nama baik sesama Pekerja, Pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

Kolaboratif

Membangun Kerjasama yang sinergis

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Kegiatan Usaha Perusahaan

Maksud dan tujuan PT Perikanan Indonesia sesuai dengan akta nomor 3 tanggal 2 Desember 2021 adalah melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, di bidang industri pengolahan, di bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, di bidang treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remidial, di bidang pengangkutan pergudangan dan aktivitas penunjang lainnya, di bidang penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, dalam bisnis perikanan dan pengusahaan di pelabuhan perikanan seta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan usaha PT Perikanan Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 3 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut
2. Penangkapan Crustacea di Laut
3. Penangkapan Mollusca di Laut
4. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut
5. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
6. Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut
7. Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
8. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
9. Jasa Sarana produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat
10. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
11. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut
12. Pemberian ikan laut;
13. Pembesaran crustacea laut;
14. Pembesaran ikan air tawar di kolam;
15. Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;
16. Pembesaran ikan air tawar di karamba;
17. Pembesaran ikan air tawar;
18. Jasa produksi budidaya ikan laut;
19. Jasa pasca panen budidaya ikan laut;
20. Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
21. Jasa produksi budidaya ikan air tawar;
22. Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar;
23. Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau;
24. Pemberian ikan air payau;
25. Pembesaran crustacea air payau;
26. Jasa sarana produksi ikan air payau;
27. Jasa produksi budidaya ikan air payau;
28. Jasa pasca panen budidaya ikan air payau;
29. Industri pengasapan/pemanggangan ikan;
30. Industri pembekuan ikan;
31. Industri peragian/fermentasi ikan;

- 32. Industri berbasis daging lumatan dan surimi;
- 33. Industri pendinginan/pengesan ikan;
- 34. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
- 35. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air bukan udang (dalam kaleng);
- 36. Industri pembekuan biota air lainnya;
- 37. Industri berbasis lumatan biota air lainnya;
- 38. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
- 39. Industri pengolahan rumput laut;
- 40. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
- 41. Industri minyak ikan;
- 42. Industri makanan dan masakan olahan;
- 43. Industri ransum makanan hewan;
- 44. Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
- 45. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
- 46. Produksi es;
- 47. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
- 48. Aktivitas penunjang treatment air;
- 49. Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;
- 50. Perdagangan besar hasil perikanan;
- 51. Perdagangan besar hasil olahan perikanan;
- 52. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya;
- 53. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
- 54. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
- 55. Pergudangan dan penyimpanan;
- 56. Aktivitas cold storage;
- 57. Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat;
- 58. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking);
- 59. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan;
- 60. Industri pelabuhan perikanan;
- 61. Hotel bintang;
- 62. Hotel melati;
- 63. Penyediaan akomodasi lainnya;
- 64. Restoran;
- 65. Rumah minum/kafe;
- 66. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- 67. Kawasan industri;
- 68. Aktivitas kantor pusat;
- 69. Jasa pengujian laboratorium;
- 70. Aktivitas pengepakan;
- 71. Taman rekreasi;
- 72. Dermaga Marina.

Rantai Pasokan

[GRI 204-1] [GRI 2-6] [OJK C.4] [OJK B.1]

PT Perikanan Indonesia, sebagai anak perusahaan BUMN Holding Pangan ID FOOD, mengelola berbagai divisi bisnis yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional utama di sektor perikanan. Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan pemasok barang dan jasa yang beragam, dengan prioritas utama pada pemilihan mitra yang selaras dengan nilai keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari komitmen terhadap regulasi nasional, PT Perikanan Indonesia mematuhi ketentuan terbaru dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Surat

Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020 tentang Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem UMKM melalui inklusi yang lebih besar dalam proses pengadaan BUMN. Selain itu, Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kerangka komprehensif untuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko, perencanaan strategis, serta pelaporan kegiatan korporasi signifikan.

Dalam praktiknya, PT Perikanan Indonesia memprioritaskan penggunaan pemasok domestik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, selama memenuhi standar kualitas, keamanan, dan keberlanjutan yang ditetapkan Perseroan. Pemasok domestik mencakup perusahaan yang beroperasi dan berbasis di Indonesia, seperti BUMN, perusahaan swasta, serta UMKM. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan efisiensi rantai pasok, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan mitra domestik, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas UMKM. Pada tahun pelaporan 2024, inisiatif ini telah berkontribusi pada peningkatan inklusi UMKM sebesar [X]% dari total pengadaan, sejalan dengan target nasional pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Perseroan juga menjalin kemitraan dengan pemasok internasional—yaitu perusahaan yang beroperasi dan berbasis di luar Indonesia—untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok domestik, seperti teknologi canggih atau bahan baku khusus. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan manajemen yang matang, termasuk analisis biaya-manafat, dampak lingkungan, dan kesesuaian dengan prinsip GCG. Kerja sama internasional ini dilakukan secara selektif untuk mendukung inovasi dan daya saing global Perseroan, sambil tetap mematuhi regulasi impor dan standar internasional seperti ISO 22000 untuk keamanan pangan.

Untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, seluruh proses pengadaan barang/jasa di PT Perikanan Indonesia dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan pedoman pengadaan barang & jasa yang berlaku guna meminimalisir risiko penyimpangan.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah pemasok barang dan jasa yang bekerja sama dengan PT Perikanan Indonesia selama periode pelaporan 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Data ini mencerminkan komposisi mitra yang beragam dan komitmen Perseroan terhadap inklusi domestik.

Tabel Pemasok Barang dan Jasa

No	Pemasok/Supplier	Jumlah
1.	BUMN	3
2.	Swasta	15
3.	UMKM	6
4.	Asing	0
	Total	24

Melalui manajemen rantai pasok yang inklusif dan transparan ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Ke depannya, Perseroan akan terus mengoptimalkan kemitraan ini dengan target peningkatan partisipasi UMKM hingga 40% pada tahun 2025, sambil mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari setiap kolaborasi.

Skala Perusahaan

No	Uraian	Satuan	Nilai
1.	Jumlah Karyawan	Orang	150
2.	Pendapatan	Rupiah	416.900.486.467
3.	Jumlah Ekuitas	Rupiah	1.524.864.374.244
4.	Jumlah Liabilitas	Rupiah	1.015.888.643.497
4.	Total Aset	Rupiah	2.540.753.017.741

Peta Operasional



PT Perikanan Indonesia mengoperasikan sejumlah fasilitas produksi yang tersebar secara strategis di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan fasilitas ini memungkinkan Perseroan untuk mengintegrasikan rantai pasok produk perikanan nasional secara efisien. Lokasi fasilitas yang berdekatan dengan sentra-sentra perikanan utama memberikan keunggulan kompetitif, termasuk akses terhadap bahan baku segar, pemeliharaan kualitas produk, serta efisiensi dalam distribusi ke pasar domestik dan internasional.

Fasilitas produksi Perseroan mencakup cold storage, pabrik es, docking dan bengkel kapal, unit pengolahan ikan (UPI), serta sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan standar keamanan pangan, higienitas, serta konsistensi kualitas produk. Seluruh proses pengolahan dilakukan secara profesional dengan menerapkan standar mutu yang ketat, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pasar dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Untuk mendukung operasional yang terintegrasi, PT Perikanan Indonesia memiliki kantor cabang dan unit operasional yang tersebar di berbagai wilayah strategis, sebagai berikut:

1. Cabang Subang
 - Unit Karawang

2. Cabang Jakarta
- Unit Pasar Ikan Modern (PIM)
- Unit Muara Baru

3. Cabang Sorong
- Unit Merauke

4. Cabang Ambon

5. Cabang Bitung
- Unit Tahuna
- Unit Gorontalo
- Unit Tarakan

6. Cabang Bacan

7. Cabang Belawan
- Unit Padang
- Unit Simeulue
- Unit Tanjung Pandan
- Unit Lampulo

8. Cabang Brondong
- Unit Prigi
- Unit Mayangan
- Unit Surabaya

9. Cabang Pemangkat
- Unit Banjarmasin
- Unit Bengkayang
- Unit Natuna

10. Cabang Makassar

11. Cabang Benoa
- Unit Singaraja

12. Cabang Pekalongan
- Unit Tegal
- Unit Pati
- Unit Rembang

Penempatan kantor cabang dan unit operasional ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan di setiap wilayah, mendukung efisiensi operasional, dan memperkuat kontribusi Perseroan terhadap perekonomian lokal serta keberlanjutan sektor perikanan nasional.

Keanggotaan pada Asosiasi

GRI [2-28] [OJK C.5]

Untuk meningkatkan eksistensi perusahaan, PT Perikanan Indonesia aktif menjadi bagian dari organisasi/ asosiasi yang terkait dengan bisnisnya sebagai komitmen konkret terhadap keterlibatan dalam kebijakan publik dan upaya untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Melalui keanggotaannya dalam asosiasi tersebut, Perseroan dapat memberikan masukan yang berarti untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tetap terinformasi tentang perkembangan isu-isu terkini. Di tingkat nasional, Perseroan terdaftar sebagai anggota dalam beberapa asosiasi yang relevan.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dilakukan dengan profesionalisme dan sesuai dengan perkembangan terbaru. Berikut adalah beberapa asosiasi keanggotaan. beberapa asosianya yaitu sebagai berikut:

Nama Asosiasi	Jabatan	Penjelasan Mengenai Asosiasi
Kamar Dagang dan Industri	Anggota Bidang Perikanan	Organisasi yang bergerak pada sektor kewirausahaan
Forum Humas BUMN	Anggota	Forum yang mewadahi insan humas di setiap BUMN
Forum TJSL BUMN	Anggota	Forum yang mewadahi insan TJSL di setiap BUMN
Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Anggota	Forum yang mewadahi Human Capital di lingkup Kementerian BUMN
Asosiasi Tuna Indonesia	Anggota	Organisasi pengusaha tuna

Perubahan yang Bersifat Signifikan pada Perusahaan

Pada tahun 2024 PT Perikanan Indonesia menjalankan inisiatif strategis yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Rasionalisasi Pegawai. PKPU sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kelangsungan bisnis, memulihkan kepercayaan pasar, dan memungkinkan restrukturisasi yang berorientasi jangka Panjang. Rasionalisasi pegawai melalui pengurangan jumlah pekerja sebagai bagian dari turnaround bisnis dan penghematan biaya untuk memastikan daya saing jangka panjang Perusahaan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pada 10 Oktober 2024, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan Rencana Perdamaian (Homologasi) antara PT Perikanan Indonesia dan para kreditur. Melalui kesepakatan ini, Perusahaan mendapatkan restrukturisasi kewajiban dengan skema pembayaran yang disesuaikan berdasarkan jenis krediturnya.

Kepada Kreditor Preferen, yakni Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi, utang sebesar Rp44,75 miliar akan dilunasi paling lambat dalam 15 tahun dengan mekanisme balloon payment, yaitu angsuran setiap enam bulan. Sementara itu, Kreditor Separatis atau Tipe A yang terdiri dari bank, pemegang MTN, pinjaman non-lembaga keuangan, serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dengan total kewajiban Rp569,60 miliar, akan menerima pembayaran maksimal dalam 9 tahun, dengan bunga rendah berkisar 0,5% hingga 3% per tahun.

Untuk Kreditor Konkuren (Tipe B–F), yang meliputi kewajiban usaha dan pihak berelasi dengan total sekitar Rp52,94 miliar, skema pelunasannya bervariasi antara 2 hingga 10 tahun. Beberapa kelompok diberikan masa tenggang antara 1 hingga 2 tahun sebelum jadwal pembayaran dimulai.

Khusus kewajiban kepada pihak berelasi sebesar Rp30,05 miliar, pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun dengan masa tenggang 2 tahun.

Adapun kewajiban terhadap Kreditor Tidak Terdaftar baru akan diselesaikan setelah seluruh pembayaran kepada Kreditur Tipe A hingga F tuntas. Melalui putusan ini, Perusahaan memperoleh kepastian hukum untuk melaksanakan restrukturisasi utang secara terukur, sekaligus memberikan ruang bagi manajemen untuk memperbaiki kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan.

Rasionalisasi Pegawai

PT Perikanan Indonesia melaksanakan rasionalisasi pegawai sebagai bagian dari amanah Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP) yang disetujui Kementerian BUMN pada Maret 2024. Kebijakan ini ditempuh karena perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang serta tingginya inefisiensi biaya operasional, terutama pada cabang yang kurang produktif. RPP mengarahkan PT Perikanan Indonesia untuk bertransformasi menjadi Minimum Operating Company (MOC) dengan fokus pada bisnis kepelabuhanan dan perdagangan ikan, sehingga perusahaan diberikan arahan untuk melakukan penataan organisasi melalui pengurangan jumlah cabang dan unit kerja yang berimplikasi langsung pada rasionalisasi pegawai.

Proses rasionalisasi berhasil dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sepanjang tahun 2024. Dimulai dengan sosialisasi RPP kepada seluruh pegawai pada Mei, dilanjutkan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan pada Agustus, pengesahan homologasi PKPU pada Oktober, kemudian assessment pegawai serta evaluasi hasilnya, hingga tahap akhir penandatanganan Perjanjian Bersama pada awal November. Dalam pelaksanaannya, manajemen memastikan seluruh hak pegawai yang terdampak dipenuhi secara penuh termasuk pesangon sesuai ketentuan. Bahkan manajemen memberikan pembayaran THR Natal lebih awal bagi pegawai yang akan merayakan dibulan Desember serta memberikan kompensasi bagi pegawai PKWT yang secara regulasi seharusnya tidak memperoleh pesangon apabila mengalami PHK. Hal ini menegaskan komitmen perusahaan untuk melaksanakan rasionalisasi secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tata Kelola Berkelanjutan

Prinsip Dasar GCG

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan landasan utama dalam pengelolaan PT Perikanan Indonesia, yang mencakup kaidah, norma, dan pedoman untuk memastikan operasional Perseroan berjalan secara sehat, transparan, profesional, dan berkelanjutan. Penerapan GCG tidak hanya bertujuan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Prinsip ini mendukung peningkatan kinerja dan daya saing usaha, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan.

GCG menjadi fondasi penting dalam pengelolaan dan pengembangan usaha PT Perikanan Indonesia, sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah dinamika bisnis yang kompetitif. Penerapan GCG bukan hanya kebutuhan internal, tetapi juga ekspektasi utama dari para pemangku kepentingan dan pemegang saham, yang menempatkannya sebagai prioritas sejajar dengan pencapaian kinerja finansial dan pertumbuhan bisnis. Dengan GCG, Perseroan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan korporasi dilakukan dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari ID FOOD, PT Perikanan Indonesia menjadikan GCG sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Penerapan GCG dilakukan

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta regulasi lain yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Dengan demikian, GCG tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Penerapan GCG di PT Perikanan Indonesia mencakup lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, yang diimplementasikan melalui berbagai inisiatif, seperti:

1. Transparansi: Memastikan keterbukaan informasi melalui pelaporan yang jelas, akurat, dan tepat waktu, termasuk melalui Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.
2. Akuntabilitas: Menetapkan tanggung jawab yang jelas dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, didukung oleh struktur organisasi yang efektif dan sistem pengendalian internal yang kuat.
3. Tanggung Jawab: Mematuhi peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam setiap aktivitas operasional.
4. Independensi: Mengelola Perseroan secara profesional tanpa konflik kepentingan, dengan memastikan independensi dalam pengambilan keputusan strategis.
5. Keadilan: Menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem *E-Proc* yang transparan dan kompetitif.

Melalui penerapan GCG yang konsisten, PT Perikanan Indonesia tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Ke depannya, Perseroan akan terus menyempurnakan praktik GCG dengan mengadopsi inovasi tata kelola, memperkuat pelatihan internal, dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing jangka panjang.

Struktur Tata Kelola

PT Perikanan Indonesia menerapkan struktur tata kelola perusahaan yang kokoh dan terorganisir untuk mendukung penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Struktur ini dirancang untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus mendukung visi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari tiga organ utama, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perseroan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis, seperti penetapan arah kebijakan perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta persetujuan laporan tahunan dan alokasi laba. RUPS memastikan bahwa kepentingan pemegang saham selaras dengan tujuan jangka panjang Perseroan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat untuk memastikan keputusan strategis sesuai dengan

prinsip GCG dan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung berikut:

- a. Komite Audit: Bertanggung jawab untuk mengawasi integritas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Komite Manajemen Risiko: Memantau dan mengevaluasi pengelolaan risiko perusahaan untuk memastikan mitigasi yang efektif terhadap potensi risiko operasional, finansial, dan strategis.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi: Mengawasi proses seleksi, pengangkatan, dan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan kebijakan remunerasi yang adil dan kompetitif.
- d. Sekretaris Dewan Komisaris: Membantu kelancaran administrasi, koordinasi, dan dokumentasi kegiatan Dewan Komisaris, serta memastikan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan.

3. Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari dan pelaksanaan strategi perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan RUPS dan Dewan Komisaris. Untuk mendukung tugasnya, Direksi dibantu oleh divisi-divisi yang membidangi fungsi kunci, yaitu:

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI): Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal, serta mengevaluasi efektivitas operasional.
- b. Manajemen Risiko: Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko di seluruh aspek operasional untuk mendukung keberlanjutan bisnis.
- c. Legal & Kepatuhan: Memastikan semua aktivitas perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017.
- d. Sekretaris Perusahaan: Berperan sebagai penghubung antara Perseroan dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk dalam penyampaian laporan keberlanjutan dan komunikasi resmi lainnya.

Struktur tata kelola ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara pengawasan, pengelolaan, dan pelaksanaan operasional, sehingga mendukung penerapan GCG yang konsisten. Dengan dukungan organ-organ pendukung tersebut, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Struktur ini juga memungkinkan Perseroan untuk merespons dinamika bisnis secara proaktif, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

[GRI 2-10]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola PT Perikanan Indonesia yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS berperan sebagai forum strategis untuk mengambil keputusan penting, seperti pengesahan laporan tahunan, rencana kerja, alokasi laba, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kebijakan korporasi lainnya yang berdampak pada arah dan keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Perikanan Indonesia, RUPS terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. RUPS Tahunan: Diadakan secara rutin minimal satu kali dalam setahun untuk membahas dan mengesahkan laporan tahunan, laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), serta rencana kerja anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan (RKA TJSL). RUPS Tahunan juga menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja Perseroan dan menetapkan strategi ke depan.
2. RUPS Luar Biasa: Dapat diselenggarakan kapan saja di luar jadwal RUPS Tahunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan, seperti untuk keputusan strategis mendesak atau perubahan signifikan dalam struktur organisasi.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

Pada tahun 2024, PT Perikanan Indonesia menyelenggarakan dua kali RUPS, yaitu:

- RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024: Diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2024 di Jakarta, dengan agenda pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) untuk tahun berjalan.
- RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023: Diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2024 di Jakarta, untuk membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan dan pengembangan bisnis perusahaan.

Kedua RUPS tersebut dilaksanakan dengan mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan RUPS dilakukan secara transparan, melibatkan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait, serta didokumentasikan dengan baik untuk memastikan akuntabilitas. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPS ini menjadi landasan bagi PT Perikanan Indonesia untuk menjalankan operasionalnya sepanjang tahun 2024, sejalan dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Dewan Komisaris

[GRI 2-11]

Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia, sebagai bagian dari ID FOOD, berperan sebagai organ pengawas utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan umum yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan keberlanjutan Perseroan. Sebagai perwakilan pemegang saham, Dewan Komisaris menjalankan tugasnya dengan independensi yang kuat, memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk memantau dan mengevaluasi penerapan GCG secara efektif dan berkelanjutan di seluruh aktivitas perusahaan. Tugas-tugas utama meliputi:

1. Mengawasi pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengelolaan risiko, investasi, dan inisiatif keberlanjutan.

3. Memastikan bahwa pengelolaan perusahaan selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat.
4. Mengevaluasi kinerja Direksi secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan keselarasan dengan tujuan jangka panjang Perseroan.
5. Mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, seperti *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*.

Mekanisme Kerja Kolektif

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kolektif dan bersama-sama, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung, seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki peran spesifik untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil melalui musyawarah untuk mufakat, memastikan bahwa setiap anggota memberikan kontribusi yang seimbang dan berbasis pada analisis yang mendalam

Dengan menjalankan peran pengawasan dan penasehatan secara efektif, Dewan Komisaris memastikan bahwa PT Perikanan Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Komitmen ini memperkuat posisi Perseroan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab, kompetitif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Direksi

[GRI 2-11]

Direksi PT Perikanan Indonesia merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola operasional dan strategi perusahaan, sekaligus memastikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di seluruh tingkat organisasi. Direksi menjalankan tugasnya secara kolektif dan bersama-sama, dengan fokus pada pencapaian tujuan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, visi, misi, serta kepentingan para pemangku kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari Perseroan, termasuk:

1. Merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis yang selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJS), sebagaimana disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
3. Mengelola sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis.
4. Menerapkan prinsip GCG, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, dalam setiap keputusan dan aktivitas operasional.
5. Berkoordinasi dengan Dewan Komisaris untuk memastikan keselarasan antara strategi perusahaan dan pengawasan tata kelola.
6. Mengelola risiko operasional, finansial, dan strategis dengan dukungan Divisi Manajemen Risiko, serta memastikan kepatuhan melalui Divisi Legal & Kepatuhan.

Penerapan GCG oleh Direksi

Direksi memastikan penerapan GCG melalui pengelolaan yang profesional dan terintegrasi, didukung oleh divisi-divisi seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), Manajemen Risiko, Legal & Kepatuhan, dan Sekretaris Perusahaan. Selain itu, Direksi secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan yang sesuai dengan Global Reporting Initiative (GRI) Standards dan regulasi terkait.

Dengan komitmen terhadap GCG, Direksi PT Perikanan Indonesia tidak hanya memastikan operasional perusahaan berjalan secara efisien, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Ke depannya, Direksi akan terus meningkatkan efektivitas pengelolaan dengan mengadopsi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap keputusan mendukung keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang bagi Perseroan dan masyarakat.

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

[GRI 2-18]

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Perikanan Indonesia, dilakukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan Perseroan tidak hanya mencapai keberhasilan finansial, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perusahaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan PT Perikanan Indonesia sebagai entitas bisnis yang berkelanjutan, dengan fokus pada dampak positif jangka panjang terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan.

Proses dan Kriteria Evaluasi

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara tahunan, dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kriteria evaluasi mencakup:

1. Kinerja Strategis: Kemampuan Dewan Komisaris dan Direksi dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang mendukung visi dan misi Perseroan, termasuk pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJS).
2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG): Kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017.
3. Integrasi Keberlanjutan: Kontribusi dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam operasional perusahaan, termasuk dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).
4. Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Efektivitas dalam mengelola risiko operasional, finansial, dan strategis, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Kemampuan untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang transparan dan responsif.

Selain kriteria di atas, evaluasi juga mempertimbangkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) individu yang ditetapkan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, meskipun fokus utama tetap pada kontribusi kolektif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Mekanisme Pelaporan Evaluasi

1. Evaluasi Dewan Komisaris: Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris disampaikan langsung dalam RUPS untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari pemegang saham. Proses ini

memastikan bahwa pengawasan terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2. Evaluasi Direksi: Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris, yang kemudian melaporkan hasilnya kepada RUPS. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan tugas operasional, strategis, dan kepatuhan terhadap prinsip GCG serta target keberlanjutan.

Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2024

Pada tahun 2024, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan RUPS pada tanggal 30 Januari 2024 dan 18 Juli 2024. Evaluasi ini menilai kontribusi kedua organ dalam mendukung transformasi PT Perikanan Indonesia sebagai perusahaan yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, pemberdayaan UMKM melalui pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas perikanan.

Komitmen ke Depan

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengintegrasikan masukan dari pemangku kepentingan dan mengadopsi praktik terbaik global. Evaluasi tahunan ini akan terus disempurnakan untuk memastikan bahwa kepemimpinan Perseroan mampu menjawab tantangan bisnis yang dinamis, mendukung keberlanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

[OJK E.1]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen keberlanjutan yang berfokus pada pengelolaan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam seluruh operasional perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya terbaik untuk mengelola dampak yang timbul dari kegiatan operasional, dengan tujuan utama memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional. Pengelolaan dampak tersebut mencakup dua pendekatan utama: mitigasi atau pengurangan dampak negatif, seperti emisi karbon dan limbah operasional, serta peningkatan dampak positif, seperti pemberdayaan masyarakat lokal dan UMKM melalui kemitraan strategis.

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, PT Perikanan Indonesia menunjuk ****Direktorat Keuangan**** sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Direktorat Keuangan bertugas memastikan bahwa strategi keuangan Perseroan selaras dengan prinsip keberlanjutan, termasuk alokasi sumber daya untuk inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

Selain itu, pengelolaan topik-topik material yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial didukung oleh:

1. Divisi Keuangan & Akuntansi, yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung inisiatif keberlanjutan.
2. Divisi Sekretaris Perusahaan**, yang berperan dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan Laporan Keberlanjutan sesuai standar Global Reporting Initiative (GRI), dan koordinasi pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peran Direksi dalam Keberlanjutan

Direksi PT Perikanan Indonesia secara kolektif bertanggung jawab atas penerapan fungsi keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Direksi memastikan bahwa setiap keputusan strategis mendukung tujuan keberlanjutan, termasuk:

1. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL).
2. Mengawasi implementasi kebijakan yang mendukung pengurangan dampak lingkungan, seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah di fasilitas produksi.
3. Mendorong kemitraan dengan pemasok domestik, khususnya UMKM, sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020, untuk memperkuat ekonomi lokal.
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Melalui struktur tanggung jawab yang jelas ini, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Ke depannya, Perseroan akan terus memperkuat pengelolaan keberlanjutan melalui evaluasi berkala, peningkatan kapasitas internal, dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar.

PT Perikanan Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam setiap aspek pengelolaan keberlanjutan, sebagai wujud komitmen untuk menjalankan operasional yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) untuk memastikan bahwa setiap tindakan tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang relevan, termasuk:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mengatur pengelolaan keuangan berkelanjutan dan pelaporan dampak LST.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi acuan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG).
3. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020 tentang Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, yang mendorong inklusi UMKM dalam rantai pasok.
4. Standar pelaporan internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) Standards Universal Tahun 2021, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan kinerja keberlanjutan.

Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui:

1. Pengelolaan Risiko: Perseroan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam setiap keputusan, didukung oleh Divisi Manajemen Risiko, untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari operasional, seperti limbah perikanan atau konsumsi energi.
2. Kepatuhan Regulasi: Divisi Legal & Kepatuhan memastikan bahwa semua aktivitas operasional, termasuk pengadaan barang/jasa melalui sistem *E-Proc*, mematuhi regulasi nasional dan standar industri.

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pelaporan keberlanjutan disusun dengan cermat untuk memberikan informasi yang akurat dan terverifikasi, memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan Dampak: Perseroan berfokus pada pengurangan dampak lingkungan negatif, seperti melalui optimalisasi penggunaan *cold storage* untuk efisiensi energi, serta peningkatan dampak positif, seperti pemberdayaan komunitas lokal melalui kemitraan dengan UMKM.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa setiap inisiatif keberlanjutan tidak hanya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), tetapi juga memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ke depannya, PT Perikanan Indonesia akan terus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan terus melakukan evaluasi terhadap dampak keberlanjutan dari setiap kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Mengawasi Pengelolaan Dampak

[GRI 2-12]

Dalam menjalankan fungsi tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Perikanan Indonesia memainkan peran sentral dalam mengawasi pengelolaan dampak operasional terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Sebagai badan tata kelola tertinggi, keduanya memastikan bahwa strategi dan aktivitas Perseroan selaras dengan prinsip keberlanjutan, mematuhi regulasi yang berlaku, dan memberikan kontribusi positif bagi pemangku kepentingan serta pembangunan berkelanjutan.

Peran dan Tanggung Jawab

1. **Dewan Komisaris:** Berperan sebagai organ pengawas yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keberlanjutan yang diterapkan oleh Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan dampak ESG sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJS). Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat strategis untuk memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).
2. **Direksi:** Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan implementasi strategi keberlanjutan, termasuk pengelolaan dampak ESG. Direksi memastikan bahwa setiap keputusan operasional, seperti pengadaan barang/jasa melalui sistem *E-Proc* atau pengelolaan fasilitas produksi, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Direksi juga bertugas merumuskan kebijakan yang mendukung pengurangan dampak negatif (misalnya, pengelolaan limbah perikanan) dan peningkatan dampak positif (misalnya, pemberdayaan UMKM sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020).

Dukungan Komite dan Divisi

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan dampak ESG, Dewan Komisaris dan Direksi didukung oleh organ-organ pendukung berikut:

1. Komite Audit: Mengawasi integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pelaporan keberlanjutan yang sesuai dengan Global Reporting Initiative (GRI) Standards.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi: Memastikan bahwa kepemimpinan Perseroan memiliki kompetensi untuk mendukung tujuan keberlanjutan melalui proses seleksi dan evaluasi kinerja yang transparan.
3. Komite Manajemen Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait ESG, seperti risiko lingkungan dari operasional perikanan atau risiko sosial dari hubungan dengan komunitas lokal.
4. Divisi Sekretaris Perusahaan: Berperan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan keberlanjutan, termasuk penyusunan Laporan Keberlanjutan, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Divisi ini memastikan bahwa informasi terkait kinerja ESG disampaikan secara transparan dan tepat waktu.
5. Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI): Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan dijalankan sesuai kebijakan dan regulasi.
6. Divisi Manajemen Risiko: Mendukung Direksi dalam mengelola risiko operasional dan strategis yang dapat memengaruhi kinerja ESG, seperti efisiensi energi di *cold storage* atau kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Tanggung Jawab Khusus terhadap Keberlanjutan

Divisi Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab khusus dalam mengoordinasikan pelaksanaan keberlanjutan, termasuk penyusunan dan pelaporan kinerja ESG sesuai dengan standar GRI dan regulasi OJK. Sementara itu, Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif memastikan bahwa kinerja ESG Perseroan mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pengurangan jejak karbon, peningkatan inklusi UMKM dalam rantai pasok, dan penguatan tata kelola melalui sistem pengendalian internal yang efektif. Evaluasi kinerja ESG dilakukan secara berkala, dengan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui struktur tata kelola yang terintegrasi ini, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa pengelolaan dampak ESG tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang, mendukung pencapaian SDGs, dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Ke depannya, Perseroan akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan ESG melalui pemanfaatan teknologi, pelatihan kapasitas, dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Untuk Perubahan Iklim

Direksi bertanggung jawab untuk merencanakan strategi iklim Perseroan serta menelaah rencana bisnis dan investasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan terkait iklim. Sementara itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi Direksi Perseroan, termasuk dalam hal-hal terkait iklim.

Pengawasan Direksi Terhadap Risiko dan Peluang Terkait Perubahan Iklim

Risiko dan peluang terkait perubahan iklim semakin mendapat perhatian dari manajemen puncak dan masuk dalam agenda Direksi. Direksi bertanggung jawab atas perencanaan strategi iklim dan mempertimbangkan isu-isu terkait perubahan iklim dalam proses pengambilan keputusan, meninjau, dan memandu strategi Perusahaan secara keseluruhan, rencana aksi utama, akuisisi dan divestasi, serta pemantauan kinerja dalam bentuk Indeks Keberlanjutan melalui evaluasi semesteran. Dalam pengelolaan permasalahan iklim, Direksi didukung oleh bagian terkait Manajemen Risiko dan Pengelolaan TJSI.

Peran Manajemen dalam Penilaian dan Pengelolaan Risiko serta Peluang Terkait Perubahan Iklim

PT Perikanan Indonesia menempatkan pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendukung keberlanjutan operasional dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Dalam hal ini, manajemen Perseroan memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko serta peluang terkait perubahan iklim, dengan pendekatan yang terintegrasi dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

Peran Divisi Sekretaris Perusahaan dan TJSL

Perseroan telah menunjuk Divisi Sekretaris Perusahaan, yang juga membawahi fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan memantau metrik serta target terkait perubahan iklim. Tanggung jawab utama Divisi Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Penetapan Metrik dan Target Iklim: Merumuskan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) terkait iklim, seperti pengurangan emisi karbon dari operasional *cold storage* dan unit pengolahan ikan (UPI), efisiensi penggunaan energi, dan pengelolaan limbah.
2. Pemantauan dan Pelaporan: Mengawasi kemajuan pencapaian target iklim, memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
3. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan: Menyampaikan laporan kinerja iklim kepada pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya melalui Laporan Keberlanjutan dan saluran komunikasi resmi.

Integrasi Divisi dalam Pengelolaan ESG

Untuk mengelola isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara lebih luas, termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim, PT Perikanan Indonesia menyatukan peran berbagai divisi yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan keberlanjutan. Divisi-divisi terkait meliputi:

1. Divisi Manajemen Risiko: Bertugas mengidentifikasi dan menilai risiko terkait iklim, seperti gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut yang memengaruhi fasilitas pelabuhan, atau perubahan regulasi lingkungan. Divisi ini juga merumuskan strategi mitigasi, seperti diversifikasi sumber bahan baku perikanan atau investasi dalam teknologi ramah lingkungan.
2. Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI): Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa inisiatif pengelolaan iklim diimplementasikan sesuai kebijakan dan regulasi, seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Divisi Legal & Kepatuhan: Memastikan bahwa strategi iklim mematuhi regulasi nasional dan internasional, termasuk standar keamanan pangan dan lingkungan seperti ISO 22000.
4. Divisi Keuangan & Akuntansi: Mendukung alokasi anggaran untuk inisiatif iklim, seperti investasi dalam peralatan hemat energi atau program TJSL yang mendukung adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan iklim.

Pengelolaan Risiko dan Peluang Terkait Perubahan Iklim

Manajemen PT Perikanan Indonesia mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim, meliputi:

1. Penilaian Risiko: Mengidentifikasi risiko utama, seperti penurunan stok ikan akibat perubahan suhu laut, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, atau biaya tambahan akibat regulasi

karbon. Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis data, bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko di bawah Dewan Komisaris.

2. Strategi Mitigasi: Menerapkan langkah-langkah seperti optimalisasi penggunaan energi di fasilitas produksi, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk kapal, dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan.
3. Pemanfaatan Peluang: Mengembangkan peluang bisnis baru, seperti investasi dalam teknologi pengolahan ikan yang hemat energi, kemitraan dengan UMKM untuk mendukung ketahanan pangan lokal, atau pengembangan produk perikanan berkelanjutan yang sesuai dengan permintaan pasar global.
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan komunitas lokal, pemasok, dan regulator dalam inisiatif iklim, seperti melalui program TJSL yang mendukung adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim.

Komitmen dan Langkah ke Depan

Divisi Sekretaris Perusahaan, bekerja sama dengan divisi-divisi terkait, akan terus memantau dan mengevaluasi metrik iklim untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan dalam RKAP dan RKA TJSL. Ke depannya, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat strategi iklim melalui investasi dalam teknologi hijau, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian SDG 13 serta visi keberlanjutan jangka panjang Perseroan.

No	Aspek Keberlanjutan	Pedoman dalam Penerapan
1.	Aspek Pelestarian Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, yang menjadi acuan untuk mengelola dampak lingkungan dari operasional, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi di fasilitas cold storage dan unit pengolahan ikan (UPI). • Standar Industri Hijau, yang mendorong penerapan praktik ramah lingkungan dalam proses produksi. • Kebijakan Lingkungan Perusahaan, yang mencakup komitmen internal untuk mengurangi emisi karbon, mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan mendukung pelestarian ekosistem laut. • Penerapan pedoman ini memastikan bahwa operasional Perseroan meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) serta SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).
2.	Aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan peran BUMN dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. • Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan panduan untuk melaksanakan program TJSL yang berdampak positif, seperti pemberdayaan UMKM dan komunitas pesisir. • Program TJSL Perseroan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, pendidikan, dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan SDG 8 (Pekerjaan

		Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan).
3.	Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang berlaku per 1 Januari 2021, mengatur alokasi sumber daya untuk mendukung inisiatif berkelanjutan. Peraturan terkait pajak, manajemen risiko (MR), imbalan pensiun, anti-korupsi, dan pengadaan barang/jasa, termasuk penerapan sistem E-Proc untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Perseroan juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pemasok domestik (terutama UMKM sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020), dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).
4.	Aspek Hukum dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi landasan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan, termasuk pengadaan barang/jasa dan pelaporan keuangan. Perseroan memastikan bahwa tata kelola perusahaan mendukung kepatuhan hukum dan etika bisnis, sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, sesuai dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Komitmen Keberlanjutan

Dengan mengacu pada pedoman-pedoman di atas, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa setiap aspek keberlanjutan—lingkungan, sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola—dikelola secara terintegrasi dan bertanggung jawab. Perseroan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan dampak positif, dan meminimalkan dampak negatif dari operasionalnya. Ke depannya, Perseroan akan memperkuat inisiatif keberlanjutan melalui inovasi teknologi, kemitraan strategis, dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan untuk mendukung visi pembangunan berkelanjutan nasional dan global.

Strategi Keberlanjutan

Sejalan dengan misi perusahaan, PT Perikanan Indonesia menjalankan operasional bisnisnya dengan mengedepankan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan terintegrasi yang memastikan keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (*Environmental, Social, and Governance/ESG*), sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Praktik Keberlanjutan dalam Operasional

1. Penggunaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya perikanan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku dari sumber yang berkelanjutan, seperti perikanan tangkap yang mematuhi kuota dan regulasi lingkungan, serta optimalisasi penggunaan energi di fasilitas *cold storage* dan unit pengolahan ikan (UPI). Penerapan standar ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan menjadi acuan untuk memastikan efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak lingkungan.

2. Praktik Perikanan yang Berkelanjutan

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan, termasuk melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan di kapal dan fasilitas pengolahan. Perseroan juga bekerja sama dengan komunitas nelayan lokal untuk memastikan praktik penangkapan ikan yang sesuai dengan regulasi dan tidak merusak ekosistem laut, sejalan dengan SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).

3. Dampak Sosial terhadap Masyarakat Lokal

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023, Perseroan aktif memberdayakan masyarakat lokal. Inisiatif ini mencakup pelatihan keterampilan bagi nelayan, pemberdayaan UMKM melalui kemitraan rantai pasok (sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020), dan program pendidikan untuk komunitas pesisir, yang mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

4. Pengurangan Limbah dan Emisi Karbon

Perseroan berupaya mengurangi dampak lingkungan melalui pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, seperti daur ulang limbah pengolahan ikan, dan penerapan teknologi hemat energi untuk mengurangi emisi karbon.

Komitmen terhadap Regulasi dan Tata Kelola

Untuk mendukung keseimbangan ini, PT Perikanan Indonesia mematuhi regulasi yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan pelaporan transparan memastikan bahwa setiap inisiatif keberlanjutan dijalankan dengan akuntabilitas tinggi.

Langkah ke Depan

PT Perikanan Indonesia akan terus memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan dengan meningkatkan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, memperluas kemitraan dengan UMKM dan komunitas lokal, serta menyempurnakan strategi pengelolaan limbah dan emisi karbon. Dengan pendekatan ini, Perseroan tidak hanya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sejalan dengan visi keberlanjutan nasional dan global.

Pernyataan Komitmen Berkelanjutan

[GRI 2-23] [GRI 2-24]

PT Perikanan Indonesia, sebagai anak perusahaan BUMN Holding Pangan ID FOOD yang bergerak dalam bidang Perikanan, memegang teguh komitmen terhadap keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke dalam strategi dan operasional bisnisnya. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan terintegrasi yang menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam

memenuhi kebutuhan mereka. Dengan mengacu pada 17 tujuan besar SDGs yang mencakup 169 target global hingga tahun 2030, Perseroan menjadikan SDGs sebagai kerangka kerja untuk mengarahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya keberlanjutannya.

PT Perikanan Indonesia menjalankan bisnisnya dengan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana tercermin dalam misi perusahaan. Inisiatif-inisiatif utama meliputi:

1. Pengelolaan Lingkungan

Perseroan menerapkan praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, seperti mematuhi kuota penangkapan ikan dan mengoptimalkan penggunaan energi di fasilitas *cold storage* dan unit pengolahan ikan (UPI), sesuai dengan standar ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

Melalui inovasi teknologi dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, Perseroan berupaya meminimalkan jejak lingkungan, seperti melalui daur ulang limbah pengolahan ikan dan penggunaan peralatan hemat energi. Pada tahun 2024, Perseroan mencatat penurunan konsumsi energi sebesar [X]% dibandingkan baseline tahun 2023, mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Perseroan mendukung pelestarian ekosistem laut melalui kerja sama dengan nelayan lokal untuk memastikan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, sejalan dengan SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Perseroan melaksanakan program TJSL yang selaras dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Inisiatif ini mencakup pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas UMKM di wilayah operasional.

Kemitraan dengan UMKM, sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020, memperkuat ekonomi lokal dan mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

3. Keberlanjutan Ekonomi

Perseroan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dengan mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif yang mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan inklusif.

Kontribusi terhadap SDGs dan Manfaat Jangka Panjang

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam operasional bisnis, PT Perikanan Indonesia tidak hanya berkontribusi pada agenda global untuk mensejahterakan masyarakat melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat jangka panjang, seperti:

1. Peningkatan Citra Merek: Komitmen terhadap keberlanjutan memperkuat reputasi Perseroan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab di sektor perikanan.
2. Efisiensi Operasional: Investasi dalam teknologi hemat energi dan pengelolaan limbah mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing.
3. Pengurangan Risiko: Strategi pengelolaan risiko terkait iklim, seperti adaptasi terhadap perubahan ekosistem laut, meminimalkan potensi gangguan operasional.

Dukungan terhadap Komitmen Pemerintah Indonesia

Sebagai anak perusahaan BUMN Holding Pangan ID FOOD, PT Perikanan Indonesia mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi nyata di

sektor ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan karakteristik industri perikanan, Perseroan berfokus pada peningkatan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan produk perikanan berkualitas tinggi, pemberdayaan komunitas nelayan, dan pelestarian sumber daya laut.

Langkah ke Depan

Ke depannya, PT Perikanan Indonesia akan terus memperkuat komitmen keberlanjutannya dengan:

1. Meningkatkan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti peralatan pengolahan ikan yang hemat energi dan kapal dengan bahan bakar rendah emisi.
2. Memperluas program TJSL untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan UMKM.
3. Mengintegrasikan metrik keberlanjutan yang lebih ketat dalam evaluasi kinerja, dengan dukungan Divisi Sekretaris Perusahaan dan pelaporan sesuai standar GRI.
4. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan selaras dengan harapan mereka.

Melalui komitmen ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda SDGs, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi nasional.



Strategi dan Praktik Penerapan Berkelanjutan

[GRI 2-22] [OJK A.1]

PT Perikanan Indonesia senantiasa menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari proses bisnisnya, dengan terus mengikuti perkembangan terbaru di bidang keberlanjutan dan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa Kebijakan Keberlanjutan Perseroan dapat diimplementasikan secara optimal, selaras dengan visi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan

melalui pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*), dengan mengacu pada regulasi yang berlaku dan standar terbaik global.

Sebagai anak perusahaan BUMN Holding Pangan ID FOOD, PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJS) yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Program TJS Perseroan dirancang untuk mendukung kesejahteraan komunitas lokal, khususnya di wilayah operasional seperti Subang, Sorong, dan Ambon, melalui inisiatif seperti pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan nelayan, dan program pendidikan. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020 tentang Peningkatan Peran UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam menjalankan bisnis di sektor perikanan, PT Perikanan Indonesia memprioritaskan produksi produk perikanan yang bermutu tinggi dengan mematuhi standar nasional dan internasional, termasuk:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Memastikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan di fasilitas produksi, seperti *cold storage*, unit pengolahan ikan (UPI), dan kapal.
2. Keamanan Pangan: Menerapkan standar keamanan pangan seperti ISO 22000 untuk menjamin produk yang higienis dan aman untuk konsumsi.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI): Memastikan produk memenuhi standar kualitas nasional.
4. ISPO dan RSPO: Mendukung praktik perikanan dan pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan, dengan fokus pada pelestarian lingkungan.
5. Sertifikasi Halal: Menjamin bahwa produk perikanan memenuhi persyaratan halal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.
6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan: Menerapkan kebijakan anti-korupsi untuk mendukung tata kelola yang transparan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.
7. Kelestarian Lingkungan Hidup: Mengelola dampak lingkungan melalui pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan optimalisasi penggunaan energi, sejalan dengan ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
8. Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan peluang ekonomi bagi komunitas lokal melalui kemitraan dengan UMKM dan program TJS, mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Untuk memastikan kinerja perusahaan yang berkelanjutan, PT Perikanan Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Pelaporan yang transparan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta standar Global Reporting Initiative (GRI).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PT Perikanan Indonesia menyelaraskan strategi bisnisnya dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memiliki target pencapaian pada tahun 2030. Strategi Perseroan diadopsi berdasarkan matriks agenda SDGs 2030, dengan fokus pada beberapa tujuan utama, termasuk:

1. SDG 2 (Tanpa Kelaparan): Mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan produk perikanan berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Meningkatkan inklusi UMKM dalam rantai pasok dan memberikan peluang kerja bagi komunitas lokal di wilayah operasional.

3. SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab): Menerapkan praktik produksi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan teknologi hemat energi.
4. SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim): Mengurangi emisi karbon melalui optimalisasi operasional dan investasi dalam teknologi hijau.
5. SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air): Mendukung pelestarian ekosistem laut melalui praktik perikanan berkelanjutan dan kerja sama dengan nelayan lokal.
6. SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat): Memperkuat tata kelola perusahaan melalui penerapan GCG dan sistem anti-korupsi.

Untuk memperkuat komitmen keberlanjutan, PT Perikanan Indonesia akan:

1. Terus meningkatkan investasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional.
2. Memperluas program TJSL untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan UMKM, dengan target peningkatan partisipasi UMKM.
3. Mengintegrasikan metrik keberlanjutan yang lebih ketat dalam evaluasi kinerja, dengan dukungan Divisi Sekretaris Perusahaan dan pelaporan sesuai standar GRI.
4. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui dialog rutin dan penyediaan saluran masukan, seperti email (info@perikananindonesia.co.id) dan situs web (www.perikananindonesia.co.id).

Dengan komitmen ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya mendukung agenda SDGs dan kebijakan pemerintah Indonesia, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab di sektor perikanan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi nasional.

PT Perikanan Indonesia, sebagai bagian dari BUMN Holding Pangan ID FOOD, mengadopsi kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.. Strategi keberlanjutan Perseroan dirancang untuk mendukung 17 tujuan SDGs dengan target pencapaian pada tahun 2030, dengan fokus pada karakteristik industri perikanan dan ketahanan pangan nasional. Berikut adalah strategi Perseroan yang selaras dengan matriks agenda SDGs 2030:

1. Tanpa Kemiskinan (SDG 1)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemangku kepentingan terdekat seperti komunitas nelayan dan UMKM, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif ini mencakup penyediaan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023. Contohnya, program pemberdayaan UMKM di wilayah operasional seperti Sorong dan Ambon.

2. Tanpa Kelaparan (SDG 2)

Mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyediakan produk perikanan berkualitas tinggi yang aman dan terjangkau. Perseroan meningkatkan produktivitas melalui fasilitas *cold storage* dan unit pengolahan ikan (UPI) yang efisien, memastikan keamanan pangan sesuai standar ISO 22000 dan SNI, serta mendukung perbaikan gizi masyarakat untuk mengurangi angka kelaparan dan stunting.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (SDG 3)

Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui program TJSL, seperti kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk karyawan dan masyarakat sekitar,

serta kampanye perilaku hidup sehat. Perseroan juga berkontribusi dalam menurunkan risiko penyakit melalui penyediaan produk perikanan yang higienis dan bersertifikasi halal.

4. Pendidikan Berkualitas (SDG 4)

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui dukungan terhadap sekolah-sekolah binaan, seperti TK Sang Hyang Seri dan SMK Gula Rajawali. Perseroan menyelenggarakan program beasiswa, pelatihan vokasi untuk nelayan, dan peningkatan kapasitas UMKM untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

5. Kesetaraan Gender (SDG 5)

Mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan ketenagakerjaan yang bebas dari diskriminasi, memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam lingkungan kerja, dan mendukung program pemberdayaan perempuan di komunitas lokal, seperti pelatihan kewirausahaan untuk UMKM yang dikelola perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDG 6)

Mengelola penggunaan air dalam proses produksi secara bertanggung jawab, memastikan efisiensi dan keberlanjutan sumber daya air. Perseroan juga mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat di wilayah operasional melalui program TJS, seperti pembangunan fasilitas air bersih di komunitas pesisir.

7. Energi Bersih dan Terjangkau (SDG 7)

Mengadopsi teknologi hemat energi di fasilitas produksi, seperti *cold storage* dan UPI, serta menjajaki inisiatif energi terbarukan, seperti energi termal dan biomassa, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)

Menciptakan lapangan kerja melalui kemitraan dengan UMKM dan nelayan lokal, sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020. Perseroan juga meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan memastikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi di seluruh operasional.

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (SDG 9)

Mengembangkan infrastruktur perikanan yang efisien, seperti *docking* kapal dan bengkel, serta mendorong inovasi dalam pengolahan produk perikanan yang kompetitif. Perseroan mendukung UMKM untuk menghasilkan produk pangan inovatif, seperti olahan ikan siap saji, untuk meningkatkan daya saing pasar.

10. Berkurangnya Kesenjangan (SDG 10)

Mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kemitraan inklusif dengan UMKM dan komunitas lokal, memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil, dan mendukung lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan.

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (SDG 11)

Berkontribusi pada pembangunan komunitas yang aman dan berkelanjutan melalui program TJS, seperti pengembangan fasilitas umum di wilayah operasional dan inisiatif berbasis energi terbarukan untuk mendukung ketahanan komunitas pesisir.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12)

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam melalui pengelolaan limbah Non-B3 sebagai faktor produksi penunjang, seperti pemanfaatan limbah pengolahan ikan untuk pupuk atau pakan ternak. Perseroan juga menerapkan sistem *E-Proc* untuk memastikan pengadaan barang/jasa yang transparan dan berkelanjutan.

13. Penanganan Perubahan Iklim (SDG 13)

Mengurangi dampak perubahan iklim melalui program penanaman pohon, investasi dalam teknologi hemat energi, dan perencanaan energi terbarukan. Perseroan juga mengembangkan strategi adaptasi untuk mengatasi risiko seperti perubahan suhu laut yang memengaruhi stok ikan.

14. Ekosistem Lautan (SDG 14)

Mendukung keberlanjutan sumber daya laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab, kerja sama dengan nelayan untuk mematuhi kuota penangkapan, dan pelestarian ekosistem laut melalui pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

15. Ekosistem Daratan (SDG 15)

Menjaga keberlanjutan sumber daya hayati melalui program TJSL seperti penanaman pohon dan pelestarian lahan di sekitar fasilitas operasional, mendukung ketersediaan air bersih dan udara yang sehat.

16. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (SDG 16)

Menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) melalui kepatuhan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, penerapan sistem anti-penyuapan, dan pelaporan transparan sesuai standar GRI dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (SDG 17)

Membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, UMKM, nelayan, dan organisasi internasional, untuk mendukung pencapaian SDGs. Perseroan memanfaatkan saluran komunikasi seperti situs web (www.perikananindonesia.co.id) dan email (info@perikananindonesia.co.id) untuk memperkuat kolaborasi.

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk terus mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi bisnisnya, dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, penguatan kemitraan dengan UMKM, dan pengelolaan dampak lingkungan. Perseroan akan terus mengevaluasi kinerja keberlanjutan melalui metrik yang terukur, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan berinvestasi dalam inovasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sebagai pelaku bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Proses Mengelola Dampak

[GRI 2-25]

PT Perikanan Indonesia dengan penuh kesadaran mengakui bahwa setiap aktivitas bisnisnya menghasilkan dampak, baik positif maupun negatif, terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Perseroan berupaya mengelola dampak negatif secara proaktif sambil memaksimalkan dampak positif. Proses ini dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, dan standar Global Reporting Initiative (GRI).

1. Sistem Masukan Pelanggan

Untuk mendukung transparansi dan peningkatan berkelanjutan, PT Perikanan Indonesia menyediakan saluran bagi pelanggan untuk memberikan masukan terkait produk dan layanan perikanan. Saluran ini mencakup:

- Situs Web Resmi (www.perikananindonesia.co.id): Pelanggan dapat mengirimkan saran atau keluhan melalui formulir daring.
- Email Resmi (info@perikananindonesia.co.id): Sebagai kanal komunikasi langsung dengan Divisi Sekretaris Perusahaan.
- Layanan Pelanggan: Tersedia di Kantor Pusat dan cabang-cabang operasional untuk menangani masukan secara langsung.

Masukan ini dianalisis secara berkala oleh tim terkait untuk mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan kualitas produk (misalnya, keamanan pangan sesuai ISO 22000 dan sertifikasi halal), dan memastikan kepuasan pelanggan, yang mendukung SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memungkinkan masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan ketidaksesuaian, pelanggaran etika, atau potensi penyimpangan, seperti korupsi atau pelanggaran lingkungan. Sistem ini mencakup:

- Kanal Pelaporan: Melalui email resmi, situs web, atau kotak saran di fasilitas operasional.
- Proses Penanganan: Setiap laporan ditangani oleh Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Divisi Legal & Kepatuhan dengan memastikan kerahasiaan pelapor dan tindak lanjut yang cepat.
- Tindakan Korektif: Pelanggaran yang teridentifikasi ditangani melalui investigasi internal, dan langkah perbaikan diimplementasikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sistem ini mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan kepatuhan terhadap SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

3. Pengelolaan Limbah

Salah satu fokus utama dalam mengelola dampak negatif adalah pengelolaan limbah dari aktivitas operasional, seperti limbah pengolahan ikan di unit pengolahan ikan (UPI). Strategi pengelolaan limbah meliputi:

- Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tersertifikasi: Perseroan bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan limbah yang memiliki sertifikasi resmi untuk memastikan limbah, termasuk limbah Non-B3, dikelola sesuai regulasi lingkungan, seperti ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
- Pemanfaatan Limbah Non-B3: Limbah pengolahan ikan dimanfaatkan kembali sebagai faktor produksi penunjang, seperti pupuk organik atau pakan ternak, untuk mendukung ekonomi sirkular dan SDG 12.
- Pelaporan dan Pengawasan: Perseroan melaporkan pengelolaan limbah secara berkala kepada Pemerintah Daerah, yang juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan nasional.

Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mengelola limbah operasional secara bertanggung jawab, mengurangi dampak lingkungan dan mendukung SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).

Perseroan secara proaktif memantau setiap proses operasional yang berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Proses ini melibatkan:

1. Identifikasi Risiko: Divisi Manajemen Risiko, bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko di bawah Dewan Komisaris, mengidentifikasi potensi dampak negatif, seperti emisi karbon dari kapal atau dampak sosial dari aktivitas di wilayah pesisir.

2. Mitigasi Dampak: Langkah mitigasi diimplementasikan, seperti penggunaan teknologi hemat energi di *cold storage* dan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya laut yang berlebihan.
3. Evaluasi Berkala: Divisi Sekretaris Perusahaan dan SPI melakukan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas langkah mitigasi, dengan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan sesuai standar GRI.

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan dampak melalui:

1. Peningkatan Saluran Masukan: Memperluas aksesibilitas kanal masukan pelanggan dan pelaporan pelanggaran, termasuk melalui platform digital yang lebih interaktif.
2. Inovasi Pengelolaan Limbah: Berinvestasi dalam teknologi daur ulang limbah dan memperluas pemanfaatan limbah Non-B3 untuk mendukung ekonomi sirkular.
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mengintensifkan dialog dengan masyarakat lokal, pemerintah, dan mitra bisnis untuk memastikan bahwa pengelolaan dampak selaras dengan kebutuhan dan harapan mereka.
4. Kepatuhan Regulasi: Memastikan semua proses pengelolaan dampak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Dengan pendekatan ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya meminimalkan dampak negatif dari operasionalnya, tetapi juga memperkuat kontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi, sejalan dengan visi keberlanjutan dan pencapaian SDGs hingga tahun 2030.

Laporan Keberlanjutan

[GRI 2-14]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan terkait dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasionalnya. Inisiatif ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan Transparansi: Memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kinerja keberlanjutan Perseroan, termasuk pencapaian, tantangan, dan inisiatif strategis dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
2. Membangun Kepercayaan: Memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pelanggan, masyarakat lokal, dan regulator, melalui pelaporan yang akurat dan terpercaya.
3. Mendorong Perubahan Positif: Memotivasi perbaikan berkelanjutan dalam praktik bisnis yang mendukung keberlanjutan jangka panjang, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan regulasi nasional, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan PT Perikanan Indonesia melibatkan pendekatan terstruktur yang mencakup koordinasi lintas divisi dan pengawasan tingkat tinggi untuk memastikan kualitas dan kelengkapan laporan. Proses ini meliputi:

1. Direksi bertanggung jawab atas inisiasi dan pengawasan penyusunan laporan. Mereka mendelegasikan tugas operasional kepada tim gabungan yang terdiri dari perwakilan berbagai unit kerja, seperti Divisi Keuangan & Akuntansi, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Legal & Kepatuhan, dan Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS).
2. Divisi Sekretaris Perusahaan berperan sebagai koordinator utama, memastikan bahwa semua topik material—seperti pengelolaan limbah, emisi karbon, pemberdayaan UMKM, dan kepatuhan terhadap regulasi—tercakup dalam laporan. Koordinasi ini mencakup pengumpulan data, verifikasi informasi, dan penyusunan laporan sesuai standar Global Reporting Initiative (GRI) dan regulasi seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

3. Proses penyusunan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan melalui saluran seperti email (info@perikananindonesia.co.id), situs web (www.perikananindonesia.co.id), dan dialog langsung dengan masyarakat lokal atau mitra UMKM, untuk memastikan bahwa laporan mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.
4. Sebelum diterbitkan, laporan dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa laporan memenuhi standar GCG dan mencakup pengawasan terhadap kinerja ESG, sementara Direksi memvalidasi akurasi data dan keselarasan dengan strategi keberlanjutan Perseroan.

Laporan Keberlanjutan Tahun 2024, sebagai laporan pertama PT Perikanan Indonesia, mencakup kinerja untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, dengan data ekonomi bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit. Laporan ini mengungkapkan kemajuan dalam inisiatif seperti pengurangan konsumsi energi, peningkatan partisipasi UMKM dalam rantai pasok sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020, dan pengelolaan limbah Non-B3 untuk mendukung ekonomi sirkular. Beberapa data disajikan kembali berdasarkan baseline tahun 2023 untuk memastikan konsistensi, dengan catatan khusus pada bab terkait [GRI 2-4].

Ke depannya, PT Perikanan Indonesia akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan dengan:

1. Memperluas cakupan topik material untuk mencakup lebih banyak isu ESG, seperti adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya laut.
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui saluran masukan yang lebih interaktif, seperti platform digital atau forum dialog.
3. Mengintegrasikan teknologi untuk analisis data yang lebih akurat dan pelaporan real-time.
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar internasional, seperti GRI Standards dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan SDGs.

Dengan komitmen ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab, mendukung ketahanan pangan nasional, dan berkontribusi pada pencapaian SDGs hingga tahun 2030.

Komunikasi Kejadian Luar Biasa

[GRI 2-16]

PT Perikanan Indonesia telah menetapkan prosedur khusus untuk mengkomunikasikan informasi-informasi kritis dan luar biasa guna memastikan penanganan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Prosedur ini dirancang untuk menangani situasi yang memerlukan perhatian segera, seperti insiden operasional signifikan, pelanggaran kepatuhan, atau kejadian yang dapat berdampak besar terhadap pemangku kepentingan, lingkungan, atau keberlanjutan perusahaan.

Mekanisme Komunikasi Kejadian Luar Biasa

1. Identifikasi Kejadian Kritis: Kejadian luar biasa yang dianggap kritis, seperti gangguan operasional besar, pelanggaran regulasi, atau dampak lingkungan yang signifikan, diidentifikasi oleh divisi terkait, seperti Divisi Manajemen Risiko, Divisi Legal & Kepatuhan, atau Satuan Pengawas Internal (SPI).
2. Pelaporan kepada Direksi: Kejadian kritis dilaporkan segera kepada Direksi melalui saluran internal yang telah ditetapkan, seperti laporan tertulis atau sistem pelaporan digital, untuk memastikan respons yang cepat.
3. Rapat Direksi: Direksi mengadakan rapat khusus untuk membahas kejadian tersebut, mengevaluasi dampaknya, dan merumuskan langkah penanganan. Rapat ini melibatkan analisis menyeluruh dengan dukungan data dari divisi terkait.

4. Pelaporan kepada Dewan Komisaris: Hasil pembahasan Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Proses ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Tindak Lanjut dan Pelaporan Eksternal: Jika diperlukan, kejadian kritis dilaporkan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti regulator (misalnya, Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Daerah), melalui Divisi Sekretaris Perusahaan, dengan mematuhi standar pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017.

Selama periode pelaporan 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, PT Perikanan Indonesia tidak mencatat adanya kejadian luar biasa yang memerlukan penanganan dan input langsung dari Direksi. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan, yang didukung oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), Divisi Manajemen Risiko. Prosedur pengelolaan risiko dan kepatuhan yang ketat, serta komitmen terhadap GCG, telah berhasil meminimalkan potensi kejadian kritis.

Untuk memperkuat pengelolaan komunikasi kejadian luar biasa, PT Perikanan Indonesia akan:

1. Meningkatkan Sistem Pelaporan: Mengembangkan platform digital yang lebih terintegrasi untuk pelaporan kejadian kritis, memastikan respons yang lebih cepat dan akurat.
2. Pelatihan dan Simulasi: Melaksanakan pelatihan berkala bagi karyawan dan divisi terkait untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi situasi kritis, seperti bencana alam atau gangguan rantai pasok akibat perubahan iklim.
3. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Memperluas saluran komunikasi, seperti melalui situs web (www.perikananindonesia.co.id) dan email (info@perikananindonesia.co.id), untuk memungkinkan masyarakat atau mitra melaporkan potensi kejadian kritis.
4. Integrasi dengan Strategi Keberlanjutan: Memastikan bahwa penanganan kejadian luar biasa selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), dan mendukung komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Dengan pendekatan ini, PT Perikanan Indonesia terus memperkuat ketahanan operasionalnya, memastikan transparansi dalam komunikasi, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi kejadian luar biasa.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk / Jasa Berkelanjutan

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen

[OJK F.17]

PT Perikanan Indonesia memegang teguh komitmen untuk memperlakukan semua konsumen secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, pandangan politik, atau faktor lainnya. Komitmen ini merupakan implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf c, yang wajibkan pelaku usaha untuk "memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif." Penjelasan pasal tersebut menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk membeda-bedakan konsumen dalam hal mutu dan akses pelayanan, memastikan bahwa setiap konsumen menerima layanan yang adil dan setara.

Dalam praktiknya, PT Perikanan Indonesia memastikan prinsip kesetaraan ini diterapkan di seluruh rantai layanan, mulai dari penyediaan produk perikanan (ikan segar, beku, dan olahan) hingga

distribusi ke pasar domestik dan internasional. Perseroan melatih karyawan dan mitra untuk menjalankan pelayanan yang inklusif, dengan saluran komunikasi seperti situs web (www.perikananindonesia.co.id) dan email (info@perikananindonesia.co.id) untuk menampung masukan konsumen secara merata. Pendekatan ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dengan mempromosikan keadilan sosial dan inklusivitas dalam akses terhadap produk dan jasa.

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk perikanan yang aman, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengawasan ketat dan jaminan mutu yang dikelola oleh Bagian Quality Control (QC), yang bertanggung jawab memastikan kualitas bahan baku dan produk akhir. Proses pengawasan mencakup inspeksi rutin, pengujian laboratorium, dan pemantauan standar higienitas untuk memenuhi ekspektasi konsumen dan regulasi yang berlaku.

Program Sertifikasi Produk:

Perseroan menerapkan sejumlah standar dan sertifikasi untuk menjamin keamanan dan kualitas produk, termasuk:

1. ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu): Memastikan konsistensi dan efisiensi dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi.
2. Sertifikat SNI GKP (Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kelapa dan Produk Perikanan): Menjamin bahwa produk memenuhi standar nasional untuk kualitas dan keamanan.
3. Sertifikasi Halal: Diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar yang menghormati nilai-nilai keagamaan dan budaya.
4. HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*): Diterapkan dalam pengolahan ikan untuk mencegah risiko kontaminasi dan memastikan keamanan pangan.

Praktik Produksi Berkelanjutan:

Perseroan memastikan bahwa proses produksi mendukung keberlanjutan lingkungan melalui:

1. Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan: Mematuhi kuota penangkapan dan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah overfishing, mendukung SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).
2. Budidaya Ikan yang Baik dan Benar: Mengikuti pedoman nasional untuk budidaya yang berkelanjutan, meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan kesehatan ikan.
3. Pengolahan ikan yang terstandarisasi HACCP dan mutu yang berkualitas.
4. Pengelolaan Limbah: Limbah pengolahan ikan dikelola dengan bekerja sama dengan pihak ketiga tersertifikasi, dan limbah Non-B3 dimanfaatkan sebagai pupuk atau pakan ternak, mendukung ekonomi sirkular dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Pada tahun 2024, tidak ada produk yang ditarik kembali akibat isu keamanan atau kualitas, yang menunjukkan keberhasilan sistem pengawasan mutu Perseroan. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan standar ISO 9001:2015, HACCP, dan pengawasan ketat oleh Bagian QC, serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah sesuai standar ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

PT Perikanan Indonesia akan terus memperkuat komitmennya terhadap pelayanan setara dan keamanan produk melalui:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Mutu: Mengintegrasikan teknologi digital, seperti pemantauan rantai dingin (cold chain) secara real-time, untuk memastikan kualitas produk dari hulu ke hilir.
2. Perluasan Sertifikasi: Memperluas cakupan sertifikasi, seperti ISPO dan RSPO, untuk mendukung keberlanjutan rantai pasok.

3. Keterlibatan Konsumen: Meningkatkan saluran masukan konsumen melalui platform daring yang lebih interaktif untuk memastikan pelayanan yang responsif dan inklusif.
4. Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, serta mendukung agenda nasional untuk ketahanan pangan.

Dengan pendekatan ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui produk dan jasa yang aman, berkualitas, dan inklusif.

Sertifikasi

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam keamanan, kualitas, dan keberlanjutan produk serta layanannya. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan menerapkan berbagai sertifikasi nasional dan internasional yang relevan dengan operasional di sektor perikanan. Sertifikasi ini mencerminkan dedikasi Perseroan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

No	Jenis Sertifikasi Type of Certification	Badan Penerbit Publishing Agency	Masa Berlaku Validity Period
1	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Belawan	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	16 April 2024 – 16 April 2026
2	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	03 Mei 2024 – 03 Mei 2026
3	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Brondong	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	13 Desember 2023 – 13 Desember 2025
4	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Mayangan	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	25 Juni 2025 – 25 Juni 2027
5	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Muara Baru	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	18 Desember 2024 – 18 Desember 2026
6	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Ambon	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	09 Oktober 2024 – 09 Oktober 2026

7	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Bacan	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	14 Agustus 2025 – 14 Agustus 2027
8	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Bitung	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	04 Desember 2024 – 04 Desember 2026
9	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Makassar	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan	14 Desember 2023 – 14 Desember 2025
10	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Belawan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	24 November 2023 – 24 November 2025
11	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	08 Januari 2024 – 08 Januari 2026
12	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Tanjungpandan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	03 Oktober 2024 – 03 Oktober 2026
13	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Jakarta	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	13 November 2023 – 13 November 2025
14	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Pati	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	12 November 2024 – 12 November 2026
15	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Brondong	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	24 Desember 2024 – 24 Desember 2026
16	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Mayangan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	18 November 2024 – 18 November 2026
17	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Muara Baru	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	09 Oktober 2024 – 09 Oktober 2026
18	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Ambon	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	21 Agustus 2024 – 21 Agustus 2026

19	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Bacan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	23 Juni 2025 – 23 Juni 2027
20	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Bitung	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	23 Agustus 2024 – 23 Agustus 2026
21	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Makassar	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	11 Agustus 2023 – 11 Agustus 2025
22	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Unit Surabaya	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	20 September 2024 – 20 September 2026
23	Sertifikat Kelayakan Pengolahan – Unit Pengolahan Ikan PT Perikanan Indonesia Cabang Benoa	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan	01 April 2024 – 01 April 2026
24	Ketetapan Halal produk ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	Majelis Ulama Indonesia	12 April 2023 – 11 April 2027

Pada tahun 2024, tidak ada produk PT Perikanan Indonesia yang ditarik kembali akibat isu keamanan atau kualitas, yang menunjukkan efektivitas penerapan sertifikasi ini. Keberhasilan ini didukung oleh pengawasan ketat oleh Bagian *Quality Control* (QC), kerja sama dengan pihak ketiga tersertifikasi untuk pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Program TJSL. Dengan portofolio sertifikasi yang kuat, PT Perikanan Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab, mendukung ketahanan pangan nasional, dan berkontribusi pada pencapaian SDGs hingga tahun 2030.

Produk yang Unggul dan Terjaga Mutunya

[GRI 416-1] [GRI 416-2] [OJK F.27] [OJK F.28] [OJK F.29]

Industri pangan, termasuk sektor perikanan, memainkan peran kunci dalam mendukung ekosistem industri hijau. Untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, diperlukan inovasi dalam proses produksi dan pengembangan produk pangan yang berkualitas tinggi serta ramah lingkungan. Produksi pangan yang berkelanjutan memberikan dampak positif, seperti menjaga kesehatan ekosistem laut, mengurangi pencemaran air, dan mendukung keanekaragaman hayati melalui praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan budidaya ikan yang ramah lingkungan. Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memastikan kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air).

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk perikanan berkualitas tinggi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kesehatan manusia, dan ketahanan pangan nasional.

Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen mutu terpadu, penguatan tata kelola, inovasi berkelanjutan, dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan. Perseroan memastikan bahwa seluruh produknya (100%) telah melewati proses pengendalian mutu yang ketat melalui sistem Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA), yang mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir untuk menjamin keamanan, kualitas, dan keberlanjutan.

PT Perikanan Indonesia menghasilkan berbagai produk perikanan yang mencakup ikan beku, dan produk olahan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Semua produk diproduksi dengan mematuhi standar nasional dan internasional, seperti ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), SNI GKP (Standar Nasional Indonesia untuk Produk Perikanan), dan Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Produk-produk ini diolah di Unit Pengolahan Ikan (UPI) di berbagai cabang dengan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas.

Manajemen mutu PT Perikanan Indonesia berfokus pada tiga pilar utama:

1. Berorientasi pada Pelanggan: Memastikan produk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun aksesibilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf c, yang menekankan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.
2. Pendekatan Proses: Mengintegrasikan semua tahapan produksi—penangkapan ikan ramah lingkungan, budidaya ikan yang berkelanjutan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi—untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar seperti HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
3. Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi rutin melalui audit internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan masukan dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses operasional.

Untuk menjaga keamanan dan mutu produk selama pengemasan dan distribusi, PT Perikanan Indonesia menggunakan:

1. Kemasan Berkualitas Tinggi: Kemasan yang tahan terhadap perubahan suhu dan kondisi lingkungan, seperti kemasan vakum atau vacuum-packed untuk produk ikan beku, untuk mempertahankan kesegaran dan mencegah kontaminasi.
2. Rantai Dingin (Cold Chain) yang Terjaga: Sistem cold storage dan transportasi berpendingin memastikan produk tetap berada dalam suhu optimal dari UPI hingga ke tangan konsumen.
3. Pemantauan Digital: Teknologi pemantauan suhu dan kelembaban digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan selama distribusi.

PT Perikanan Indonesia mengembangkan pendekatan terintegrasi untuk memastikan penyediaan produk perikanan yang unggul, aman, dan berkelanjutan melalui:

1. Sistem Penjaminan Mutu: Penerapan standar ISO 9001:2015, HACCP, dan SKP, dengan pengawasan ketat oleh Bagian Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA).
2. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan: Mematuhi regulasi seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, serta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menjaga integritas.
3. Peningkatan Inovasi: Mengembangkan produk olahan inovatif, seperti ready-to-cook atau presto, yang mendukung kebutuhan pasar modern sambil tetap ramah lingkungan.
4. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Menyediakan saluran komunikasi seperti situs web (www.perikananindonesia.co.id) dan email (info@perikananindonesia.co.id) untuk menanggapi keluhan dan masukan konsumen dengan cepat, serta memastikan distribusi yang tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Praktik Ramah Lingkungan dalam Produksi Perikanan

Untuk mendukung ekosistem industri hijau, PT Perikanan Indonesia menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti:

1. Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab: Mematuhi kuota penangkapan dan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah overfishing.
2. Budidaya Ikan Berkelanjutan: Mengikuti pedoman budidaya ikan yang baik untuk menjaga kesehatan ekosistem perairan.
3. Pengelolaan Limbah: Bekerja sama dengan pihak ketiga tersertifikasi untuk mengelola limbah Non-B3, seperti memanfaatkan sisa pengolahan ikan untuk pupuk organik atau pakan ternak, mendukung ekonomi sirkular.
4. Pengurangan Emisi Karbon: Mengoptimalkan penggunaan energi di cold storage dan kapal, dengan capaian pengurangan konsumsi energi sebesar [X]% pada tahun 2024 dibandingkan baseline 2023.

Praktik ini mendukung keanekaragaman hayati dengan meminimalkan pencemaran air dan kerusakan habitat laut, serta berkontribusi pada SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air). Pada tahun pelaporan 2024, PT Perikanan Indonesia mencatat:

1. Tidak Ada Insiden Ketidakpatuhan: Tidak ada pelanggaran terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk, yang menunjukkan efektivitas sistem manajemen mutu.
2. Tidak Ada Penarikan Produk: Seluruh produk (100%) memenuhi standar keamanan dan kualitas, didukung oleh sertifikasi ISO 9001:2015, HACCP, SNI GKP, dan halal.
3. Keberhasilan Distribusi: Distribusi produk tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu, dengan kepuasan pelanggan yang terjaga melalui saluran masukan seperti situs web dan email.

Untuk memperkuat komitmen terhadap pangan berkualitas dan ramah lingkungan, PT Perikanan Indonesia akan:

1. Mengembangkan Inovasi Produk: Meningkatkan portofolio produk olahan ready-to-cook dan ready-to-eat yang ramah lingkungan dan bersertifikasi halal.
2. Memperluas Teknologi Hijau: Mengadopsi teknologi hemat energi dan sistem pemantauan digital untuk rantai dingin guna mengurangi emisi karbon lebih lanjut.
3. Meningkatkan Kemitraan dengan UMKM: Mendukung mitra UMKM dalam pengembangan produk perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020.
4. Memperkuat Pelaporan Keberlanjutan: Mengintegrasikan data kinerja lingkungan dan sosial dalam Laporan Keberlanjutan tahunan sesuai standar GRI, untuk meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk perikanan yang aman dan berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada ekosistem industri hijau, mendukung ketahanan pangan nasional, dan memajukan agenda SDGs hingga tahun 2030.

Produk Serta Layanan yang Adil dan Setara

[OJK F.17]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk mendukung strategi pemerintah dalam mendorong inklusi ekonomi di sektor perikanan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf c, yang wajibkan pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan produk dan layanan yang setara bagi semua konsumen, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan UMKM, tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, atau pandangan politik. Salah satu inisiatif strategis Perseroan adalah mendukung inklusi ekonomi melalui penyediaan

pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan, yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan selaras dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL.

Membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan Keterbatasan Finansial

Dengan kemudahan akses terhadap alat penangkapan ikan dan benih berkualitas tinggi, meningkatkan efisiensi produksi tanpa membebani keuangan mereka. Program ini mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dengan mengurangi beban finansial dan meningkatkan akses ke sumber daya produktif.

Mengurangi Beban Biaya Produksi

Dengan biaya input yang lebih rendah, mereka dapat bersaing di pasar lokal dan nasional, menjual produk perikanan dengan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini mendukung SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil.

Meningkatkan Produktivitas dan Diversifikasi Produk Perikanan

Peningkatan produktivitas ini memungkinkan diversifikasi produk, seperti pengembangan ikan olahan (nugget, kaleng, atau kerupuk ikan) yang dihasilkan oleh UMKM mitra Perseroan. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan bagi nelayan dan pembudidaya, yang mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Memberdayakan Nelayan dan Pembudidaya serta Meningkatkan Inklusi Gender

Perseroan memastikan bahwa perempuan di komunitas pesisir memiliki akses yang setara ke program ini, misalnya melalui pelatihan pengolahan ikan atau kewirausahaan, untuk mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender). Dalam program TJSL khususnya di wilayah Lampung, perseroan melibatkan kelompok perempuan dalam pengelolaan UMKM produk olahan perikanan, meningkatkan inklusi gender dan kesejahteraan ekonomi.

Penerapan Prinsip Pelayanan yang Adil dan Setara

Untuk memastikan pelayanan yang adil dan setara, PT Perikanan Indonesia:

1. Menerapkan Standar Pelayanan Non-Diskriminatif: Sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, Perseroan memastikan bahwa semua konsumen, termasuk nelayan, pembudidaya, dan UMKM, menerima akses yang sama terhadap produk (seperti pupuk bersubsidi) dan layanan pendukung, seperti pelatihan atau akses pasar.
2. Mengelola Saluran Komunikasi: Saluran seperti situs web (www.perikananindonesia.co.id) dan email (corcomm@perikananindonesia.co.id) tersedia untuk menerima masukan dan keluhan dari semua pemangku kepentingan, memastikan respons yang cepat dan adil.
3. Mendukung Kemitraan dengan UMKM: Sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020, Perseroan memprioritaskan kemitraan dengan UMKM lokal untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dan produk perikanan, memastikan inklusi ekonomi di wilayah operasional seperti Subang, Sorong, dan Ambon.

Dengan inisiatif ini, PT Perikanan Indonesia tidak hanya mendukung strategi pemerintah untuk inklusi ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional, memajukan keberlanjutan lingkungan, dan berkontribusi pada pencapaian SDGs 1, 5, 8, 10, 12, dan 14 hingga tahun 2030.

Kemasan dan Informasi Produk

Packaging and Product Information [GRI 417-1] [GRI 417-2]

Kemasan dan informasi produk memiliki peranan penting dalam lingkup informasi terkait produk, hal tersebut untuk mencakup informasi terkait produk yang ditawarkan pada konsumen sehingga dapat meningkatkan daya saing produk secara luas. Selain menjaga kualitas dan kesegaran,

kemasan yang tepat juga menarik minat konsumen serta memberikan informasi jelas dan transparan untuk membangun kepercayaan dan mempermudah pemilihan produk.

Seluruh kemasan (100%) produk Perseroan dilengkapi dengan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami agar pelanggan dapat menggunakan produk secara aman dan tepat guna. Pelabelan pada produk juga ditujukan agar produk pangan dapat menjangkau segmen market yang tepat.

Komitmen Perseroan dalam menyediakan informasi yang jelas dan lengkap memberikan hasil yang positif dimana selama tahun pelaporan tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa.

Dalam menjalankan seluruh kegiatan pemasaran dan distribusi, PT Perikanan Indonesia mematuhi seluruh peraturan perundungan yang berlaku sehingga pada tahun pelaporan, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. [GRI 417-3]

Fokus Kepada Pelanggan

Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan yang berfokus kepada pelanggan. Tanggapan, masukan, dan keluhan akan Kami sikapi dengan responsif. Kami menyediakan akses bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pertanyaan, masukan, maupun keluhan.

Edukasi Pelanggan

PT Perikanan Indonesia mengadakan kegiatan promosi dan penyuluhan secara berkala untuk para pelanggan. Promosi dan edukasi/penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan sosial media dan/atau cetak dengan brosur, spanduk, bahkan video untuk menarik konsumen/pelanggan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman konsumen akan produk dan layanan yang disediakan oleh Perseroan. Informasi lain yang mendukung pada layanan tersebut mencakup Pengetahuan tentang jenis produk, pengelolaan produk yang benar, keunggulan produk, penyebaran pemasaran dan lain-lain. Hal tersebut guna untuk mendukung kemudahan konsumen untuk mengenal produk dan manfaatnya.

Produk PT Perikanan Indonesia

PT Perikanan Indonesia memiliki beberapa produk yang menjadi andalan diantaranya sebagai berikut:



1. Tukato Bay

Produk perikanan konsumsi harian masyarakat Indonesia yang diperuntukan untuk komoditas makan bergizi kegiatan bantuan social. Terdiri dari 3 jenis ikan; Layang, Tongkol, dan Kembung. Dalam packaging vacum dan seal dengan ukuran 500gr & 1000gr. Target market Kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.

2. Tukato Sea
- Produk perikanan dengan nilai jual yang lebih tinggi dan ditujukan untuk segmen



pasar ekonomi menengah. Dipasarkan di Modern Trade, offline store, dan online store. Terdiri dari 17 jenis ikan; Fillet Patin, Steak Tuna, Steak Tenggiri, Fillet Kakap, Cumi Ring, Cumi Jarum, Cumi Tube, Sirip Cumi, Kembung Banjar, Kembung Gepeng, Udang Kupas, Udang Banana, Salmon Portion, Layang, Tongkol, Batari, Steamed Slice Octopus, dan dikemas dalam packaging vacum dan seal dengan ukuran 500 & 1000gr.



3. Tukato Ocean

Produk perikanan dengan nilai jual tinggi dan ditujukan untuk segmen pasar ekonomi menengah ke atas. Terdiri dari 10 jenis ikan; dengan ukuran 180-200gr/pcs.

1 Paket berisi 2 pcs dari masing – masing jenis ikan (20pcs).

- Produk Pakan Ikan. diantaranya sebagai berikut:



1. Pakan Ikan Apung

Pakan ikan apung untuk budidaya berbagai species ikan dengan penyusunan formulasi hasil riset dan development panjang. Dibuat dengan bahan baku terbaik dan diperkaya dengan vitamin dan mineral penting, membuat pakan dapat dicerna dengan baik dan ramah lingkungan

Spesifikasi MPL / MPL specifications				
Ingredients	MPL - ECO	MPL - PRO	MPL - BEST	
Protein (%)	Min. 26	Min. 28	Min. 32	
Fat (%)	Min. 5	Min. 5	Min. 5	
Fiber (%)	Min. 8	Min. 8	Min. 8	
Ash (%)	Max. 13	Max. 13	Max. 13	
Moisture (%)	Max. 12	Max. 12	Max. 12	
Bags (Kg)	30	30	30	
Size (mm)	2,3	2,3	2,3	
Commodity	Tilapia	Carp	Catfish	
Product				
Program Pemberian Pakan / Feeding				
Product	Feeding ratio (% from fish biomass)	Feeding frequency (per day)	Pellet Size (mm)	Fish size (gr)
ECO	3-4	3-4	2,3	50 - 125
PRO	3-4	3-4	2,3	50-100
SUPER	3-4	3-4	2,3	25 - 50

2. Pakan Ikan Tenggelam

Pakan berkualitas tinggi untuk budidaya ikan. Semua produk dirancang khusus untuk kecukupan nutrisi bagi setiap spesies, menjamin pertumbuhan dan kesehatan yang optimal dan hasil yang dapat menguntungkan.

Spesifikasi MET / MET specifications				
Ingredients	MET - BASIC	MET - ECO	MET - PRO	MET - SUPER
Protein (%)	Min 22	Min 26	Min 28	Min 30
Fat (%)	Min 8	Min 5	Min 5	Min 5
Fiber (%)	Min 8	Min 8	Min 8	Min 8
Ash (%)	Max 13	Max 13	Max 13	Max 13
Moisture (%)	Max 12	Max 12	Max 12	Max 12
Bags (Kg)	25	50	50	50
Size (mm)	3,4	3	3	3
Commodity	Pangasius	Tilapia	Carp	Tilapia
Product				
Product	Feeding ratio (% from fish biomass)	Feeding frequency (per day)	Pellet Size (mm)	Fish size (gr)
BASIC	2-3	3-4	3,4	50-100
ECO	2-3	3-4	3	100-125
PRO	2-3	3-4	3	100-125
SUPER	2-3	3-4	3	100-125

Inovasi Produk Berkelanjutan

[OJK F.26]

PT Perikanan Indonesia sepanjang tahun 2024 belum memiliki rencana pengembangan inovasi produk, hal tersebut mengingat kondisi Perusahaan sedang dalam pemulihan. Dalam pengembangannya PT Perikanan Indonesia berencana untuk memastikan setiap mitra melakukan Pembangunan unit pengolahan limbah pada setiap Perusahaan serta akan merevitalisasi unit pengolahan limbah pada setiap Kawasan Pelabuhan Perikanan. Dengan hal tersebut maka akan mengurangi tingkat pencemaran yang mungkin akan timbul.

Dampak Produk / Jasa

Komitmen dan konsistensi PT Perikanan Indonesia dalam memenuhi kesehatan dan keselamatan pelanggan, maupun pemasaran dan pelabelan, membawa hasil dengan tidak adanya insiden maupun pengaduan mengenai ketidakpatuhan yang berdampak bagi kesehatan dan keselamatan para pelanggan dari produk yang dihasilkan Perusahaan. Selain itu, juga tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk maupun komunikasi pemasaran. Dengan demikian, Perusahaan tidak mendapatkan denda atau hukuman akibat ketidakpatuhan tersebut.

Selain itu, PT Perikanan Indonesia melakukan sosialisasi produk dan layanan melalui saluran berikut untuk memenuhi hak konsumen atas informasi tentang produk dan layanan serta untuk memfasilitasi layanan dan akses ke pelanggan:

- Website: <https://www.perikananindonesia.co.id/>
- Twitter / X : @perikananID
- Instagram : pt.perikananindonesia

Segmen Usaha	Produk	Dampak dari Produk/Jasa	Strategi
Fish Procesing & Trading	Tukato Bay Tukato Sea Tukato Ocean	Risiko keracunan histamin, kontaminasi bakteri, dan kontaminasi bahan kimia lainnya	Mendorong peningkatan keterlibatan cold storage dalam aktivitas bisnis perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan memperpanjang masa simpan komoditas
Kepelabuhanan	Jasa Pemanfatan Lahan	Risiko pencemaran lingungan dari limbah pengolahan	Memastikan setiap Perusahaan memiliki pengolahan limbah dan Perusahaan juga memiliki rumah pengolahan limbah Kawasan
Pabrik pakan	Muara Apung Muara Tenggelam	Risiko pencemaran lingungan dari limbah pengolahan	Merevitalisasi pengolahan limbah pada Kawasan pabrik

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali

Perseroan memungkinkan untuk menarik produk yang dihasilkan dengan kriteria atau kondisi tertentu. Selama tahun pelaporan, tidak terjadi penarikan atas produk perusahaan.

Kinerja Keberlanjutan

Praktik manajemen keberlanjutan yang diimplementasikan oleh Perseroan secara komprehensif memfokuskan pada pengelolaan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersinergi, demi memastikan keberlanjutan usaha yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetapi juga memperhatikan dampak positif serta mengurangi dampak negatif dari setiap aktivitas operasional, dengan upaya sistematis dalam mengoptimalkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Perseroan secara proaktif melakukan identifikasi dan evaluasi risiko keberlanjutan serta mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mitigasi, sekaligus meningkatkan inovasi

dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna menciptakan nilai bersama yang berkelanjutan dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik serta pasar global.

Membangun Budaya Keuangan Berkelanjutan

Building a Culture of Sustainable Finance [OJK F.1]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk membangun budaya keuangan berkelanjutan melalui penerapan strategi yang selaras dengan visi dan misi perusahaan, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya guna mendukung pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Implementasi praktik manajemen keberlanjutan ini dilakukan secara konsisten dan terukur, dengan pengelolaan dampak yang dilakukan secara proaktif untuk memaksimalkan kontribusi positif sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, serta diarahkan pada pencapaian keberlanjutan jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional terkait. Melalui penerapan kebijakan yang komprehensif, pelaksanaan pengawasan yang ketat, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel, PT Perikanan Indonesia memperlihatkan komitmennya terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan usaha yang berkesinambungan.

Strategi yang telah ditetapkan berfokus pada kepuasan konsumen, didukung oleh keunggulan operasi dan rantai pasok, hal tersebut guna memenuhi keamanan pangan dan juga berkontribusi pada kelangsungan usaha, kelestarian alam, dan kesejahteraan Masyarakat luas. Implementasi pengelolaan aspek keberlanjutan mengacu pada berbagai kebijakan baik yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, *best practice*, maupun kebijakan Perseroan yang merupakan turunan dari strategi Perseroan.

Perseroan berkomitmen dalam penerapan usaha berkelanjutan dan telah mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam visi misinya serta telah merancang strategi untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan tersebut diawali oleh Visi PT Perikanan Indonesia yang mengusung "Menjadi Perusahaan Perikanan Terbesar di Indonesia." Nilai-nilai keberlanjutan juga diturunkan dalam pernyataan misi Perseroan yang mengusung mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional, yang menghasilkan produk berkualitas terbaik dan diakui di Industri Perikanan domestik maupun internasional yang selaras dengan *Environmental Sustainability* serta memberikan layanan terbaik untuk mendukung industri perikanan. Visi misi Perseroan kemudian diturunkan ke dalam kebijakan strategis guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang tertuang dalam di antaranya masterplan, RJPP, dan RKAP Perseroan. Program strategis Perseroan diterapkan oleh manajemen untuk meningkatkan nilai jangka panjang Perseroan yang berakhir dengan evaluasi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan serta pelaporannya dalam laporan keberlanjutan.

Manajemen keberlanjutan yang dijalankan Perseroan secara menyeluruh menitikberatkan pada pengelolaan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan upaya maksimal dalam mengelola dampak yang muncul dari kegiatan operasional, dengan tujuan utama memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus mengoptimalkan dampak positif yang dihasilkan.

Aspek pemenuhan HAM karyawan mengacu kepada diantaranya: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konvensi ILO No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*), Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*), Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of*

forced labor), Konvensi ILO No. 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize), serta Kebijakan Ketenagakerjaan Perseroan.

Prinsip kehati-hatian dalam aspek pelestarian lingkungan dilaksanakan dengan mengacu kepada seluruh peraturan perundangan terkait lingkungan. Aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengacu kepada seluruh peraturan perundangan terkait TJSL, di antaranya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, beserta seluruh peraturan sebelumnya yaitu Perturan Nomor PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN (tanggal 5 Juli 2017), serta Peraturan Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN (tanggal 20 April 2020), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (berlaku efektif sejak 1 Januari 2020), Kode Etik (*Code of Conduct*) dan peraturan internal Perusahaan yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan, Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Aspek ekonomi mengacu kepada seluruh peraturan perundangan terkait Pajak, UMR, Imbalan Pensiun, serta Kebijakan Perseroan terkait Anti-Korupsi dan Pengadaan Barang.

Perseroan menetapkan Dokumen Sistem Manajemen (Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja) yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses bisnis sesuai prinsip GCG. Perseroan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan iklim industri yang dinamis serta menjamin kepatuhan terhadap perubahan Peraturan Perundangan. Sosialisasi dan pelatihan juga dilakukan secara berkala untuk menjamin komitmen dan kompetensi dari seluruh insan Perseroan dalam mengimplementasikan usaha berkelanjutan.

Untuk menjalankan fungsi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja berkelanjutan, Direksi mendeklasikan wewenang untuk merancang kebijakan dan strategi tersebut kepada masing-masing unit kerja terkait bidang ekonomi, lingkungan dan sosial. Pendeklasian dilakukan melalui kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam rencana kerja untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Saat ini, tanggung jawab pada tingkat Direksi terhadap fungsi Keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dirangkap oleh Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko memegang tanggung jawab dalam menganalisis dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial akibat kegiatan operasional Perseroan serta mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial secara berkala.

Demi mendukung berjalannya fungsi tersebut maka PT Perikanan Indonesia perlu memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan, terutama investor dan masyarakat yang terdampak melalui berbagai saluran yang tersedia, seperti kunjungan investor, dialog bersama masyarakat, email, dan kotak surat pelayanan. Selain itu, satuan kerja kami juga mengadakan konsultasi berupa pertemuan-pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dalam topik ekonomi, lingkungan dan sosial, yang hasilnya kemudian disampaikan ke Direksi dan ditindaklanjuti sesuai arahan Direksi.

Untuk mengimplementasikan prinsip transparansi, Perseroan melaporkan kinerja keberlanjutannya secara berkala melalui Laporan Keberlanjutan. Penyusunan Laporan Keberlanjutan melibatkan Direksi yang membentuk tim gabungan perwakilan berbagai unit kerja yang terkait dengan aspek

keberlanjutan. Vice President Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai koordinator pelaksanaan penyusunan laporan. Tugas utamanya Adalah memastikan seluruh elemen material terkait Perseroan disajikan dalam laporan. Finalisasi laporan dilakukan dengan meminta persetujuan dan tanggapan dari Dewan Komisaris dan Direksi sebelum laporan dapat diterbitkan.

Komitmen PT Perikanan Indonesia untuk memenuhi seluruh peraturan perundangan dan menjalankan etika bisnis dapat dilihat dari nihilnya jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundangan selama periode pelaporan.

Kinerja Ekonomi

Economic Performance [OJK F.2] [OJK F.3]

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Pendapatan dan Laba Rugi

Uraian	RKAP 2024	Realisasi	Pencapaian (%)
Pendapatan	Rp.617.204.450.780,-	Rp.416.900.486.467,-	68
Laba Kotor	Rp.147.795.859.123,-	Rp. 86.486.531.247,-	59
Jumlah Beban Usaha	Rp.121.920.574.426,-	Rp.138.669.274.304,-	114
Laba (Rugi) Usaha	Rp. 25.875.284.697,-	Rp.(52.182.743.057),-	(202)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	Rp. (897.564.048),-	Rp.281.827.902.348,-	(31.399)
Laba (Rugi) Sebelum Bunga	Rp. 24.977.720.649,-	Rp.229.645.159.291,-	919
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp.(20.912.382.723),-	Rp.164.737.179.166,-	888
Laba Setelah Pajak Penghasilan	Rp.(20.912.382.723),-	Rp. 73.319.849.538,-	451

Kinerja Keuangan Perusahaan Tahun 2024 laba sebesar Rp73,3 miliar. Adapun penjelasan kinerja keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan sampai dengan Desember 2024 mencapai sebesar Rp416,9 miliar atau turun sebesar 26% dibandingkan tahun 2023, terhadap RKAP-2024 Pendapatan mencapai 68%. Penurunan pendapatan ini disebabkan mulai dilakukannya *Minimum Operating Company* (MOC) kegiatan bisnis dimana berpengaruh terhadap pendapatan FPT dan pabrik pakan.
2. Realisasi Beban Pokok Pendapatan/Harga Pokok Penjualan (BPP/HPP) tahun 2024 sebesar Rp330,4 miliar atau 70% dari RKAP-2024 yang bernilai Rp469,4 miliar. Penurunan HPP ini sejalan dengan capaian penjualan.
3. Laba Kotor tahun 2024 mencapai sebesar Rp86,5 miliar, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp101,4 miliar dan juga masih dibawah RKAP tahun 2024 sebesar 41%. Hal ini disebabkan oleh turunnya penjualan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 (walaupun demikian jika dibandingkan tahun sebelumnya penurunan BPP di tahun 2024 lebih besar 3% dibandingkan penurunan penjualan di tahun 2024).
4. Biaya Usaha Perusahaan di tahun 2024 lebih besar 12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya Rasionalisasi Pegawai di akhir tahun 2024 yang realisasi atas program Homologasi Perusahaan yang disepakati di tanggal 10 Oktober 2024, jika dibandingkan RKAP tahun yang sama, capaian Biaya Usaha ini diatas 14% dari anggarannya yang dikarenakan adanya kejadian luar biasa (diluar prediksi) yaitu MOC dan PKPU yang menuntut perusahaan melakukan restrukturisasi operasional dan keuangan.
5. EBITDA tahun 2024 minus sebesar Rp16 miliar seiring dengan lebih kecilnya peroleh Laba Kotor tahun 2024 serta Biaya Usaha yang jauh meningkat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Pendapatan lain-lain tahun 2024 mencapai sebesar Rp339,7 miliar atau lebih besar Rp219,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan perhitungan *Net Present Value* (dampak tercapainya Homologasi PKPU) sebesar Rp207,5 miliar, kenaikan Properti Investasi sebesar Rp10,3 miliar yang merupakan dampak dari adanya perubahan pengukuran kembali aset perusahaan (tanah) dari *Cost Method* ke *Revaluation Method* serta adanya keuntungan atas penjualan aset KSO (KSO-BBM Jakarta) sebesar Rp2,5 miliar.
7. Beban lain-lain tahun 2024 mencapai sebesar Rp57,9 miliar atau naik sebesar Rp11,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya Biaya PKPU (Konsultan PKPU) yang mencapai sebesar Rp12,4 miliar, Estimasi beban keterlambatan pembayaran pajak di tahun 2024 sebesar Rp11,7 miliar serta pengakuan Penurunan Nilai Persediaan yang naik sebesar Rp8,5 miliar.
8. Laba Bersih perusahaan di tahun 2024 mencapai sebesar Rp73,3 miliar atau lebih besar Rp45,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian positif laba perusahaan ini lebih dikarenakan adanya Pengakuan perhitungan *Net Present Value* (dampak tercapainya Homologasi PKPU) sebesar Rp207,5 miliar, Hasil Revaluasi Properti Investasi sebesar Rp125,6 miliar.

Perbandingan Target dan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2024

Uraian	RKAP 2024	Realisasi	Pencapaian (%)
Aset	Rp.1.132.802.197.413,-	Rp.2.540.753.017.741,-	224
Aset Lancar	Rp.186.792.852.430,-	Rp. 156.679.429.584,-	84
Aset Tidak Lancar	Rp.946.009.344.984,-	Rp.2.384.073.588.157,-	252
Liabilitas	Rp.1.132.802.197.413,-	Rp.2.540.753.017.741,-	224
Liabilitas Jangka Pendek	Rp.255.963.329.136,-	Rp. 239.540.952.994,-	94
Liabilitas Jangka Panjang	Rp.771.938.985.706,-	Rp. 776.347.690.503,-	101
Ekuitas	Rp.104.899.882.572,-	Rp.1.524.864.374.244,-	1.454

1. Kas setara kas pada akhir bulan Desember sebesar Rp59,9 miliar meningkat 36% dibandingkan tahun 2023 dan 183% terhadap RKAP tahun 2024. Peningkatan dana ini sebagian besar dikarenakan adanya penerimaan dari sewa atas lahan yang dikelola oleh perusahaan.
2. Persediaan bulan Desember sebesar Rp6,9 miliar, turun 76% dari tahun sebelumnya dikarenakan selain perusahaan mulai melakukan penerapan dari MOC (bagian dari Rencana Penyehatan Perusahaan/RPP) dan juga fokus pada penjualan sisa stok.
3. Nilai Ekuitas bulan Desember sebesar Rp1,5 triliun meningkat 18% terhadap tahun 2023 yang disebabkan adanya perubahan pengukuran kembali aset perusahaan (tanah) di tahun 2024 (dari Cost Method ke Revaluation Method). Atas perubahan ini berlaku surut dari tahun 2022.

Pendapatan per Segmen Usaha 2024

Uraian	RKAP 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Pencapaian (%)
Fish Processing and Trading	398.887.324.000	167.765.985.128	42
Jasa Kepelabuhanan	189.217.126.780	241.513.957.589	128
Pakan	29.100.000.000	7.620.543.750	26

Total	617.204.450.780	416.900.486.467	68
--------------	------------------------	------------------------	-----------

Fish Processing and Trading

Perdagangan ikan dimaksud adalah kemampuan Perusahaan terhadap hasil tangkapan ikan dari aktivitas operasional kapal perikanan dan pengolahan ikan melalui Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dikelola perusahaan dan pemasaran ikan yang dapat dilaksanakan Perusahaan dengan Penjualan Ikan. Kemampuan Perusahaan untuk menjual ikan (hasil tangkapan maupun produksi) dalam jumlah volume (ton) ikan.

Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 7.053 Ton (penjualan domestik sejumlah 6.951 ton, penjualan ekspor 102 ton). Nilai penjualan *Fish Processing & Trading* tahun 2024 adalah sebesar Rp167.765.985.128,- tercapai 42% dari target RKAP sebesar Rp398.887.324.000,- Komoditas penjualan domestik didominasi jenis ikan Cakalang, Kembung dan Tuna sedangkan penjualan ekspor ini merupakan penjualan komoditas gurita dan loin tuna. Tidak tercapainya target segmen *Fish Processing and Trading* baik domestik maupun ekspor disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjualan ikan stok lama dengan harga dibawah HPP, namun penyerapan penjualan masih kurang.
2. Pemenuhan *Purchase Order* (PO) ikan cakalang dan baby tuna masih terkendala harga bahan baku yang tinggi namun permintaan harga penjualan rendah.
3. Kebijakan manajemen terkait penjualan ikan dalam rangka perbaikan kinerja operasional khususnya FPT, dibatasi hanya tiga wilayah yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan ikan.
4. Pemenuhan ikan untuk pemindang di beberapa tempat mengalami penurunan disebabkan daya beli masyarakat yang rendah.
5. Permintaan ikan cakalang untuk industri pengalengan menyesuaikan permintaan harga ikan kaleng dunia
6. Terkait dengan ekspor, kurangnya stok produk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan buyer.
7. Adanya keluhan buyer terkait ketidaksesuaian kuantitas dan temuan mikroba yang melebihi ambang batas pada produk
8. Harga kurang bersaing dan margin penjualan cenderung rendah untuk produk - produk dengan bahan baku yang bersumber dari trading

Tindaklanjut dan upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berusaha untuk menjual ikan stok lama yang masih layak konsumsi seperti ikan kembung, layang, cakalang, baby tuna, gurita dan jenis lainnya secara retail.
2. Mencari *Purchase Order* (PO) dan supplier yang memiliki harga kompetitif sehingga mendapatkan margin yang sesuai SOP.
3. Memberikan kesempatan kepada Cabang untuk melaksanakan transaksi penjualan ikan dengan berdasarkan SOP penjualan ikan yang berlaku memenuhi kriteria margin minimal 5%, tidak berpotensi piutang, dan pembayaran cash atau tidak lebih dari 10 hari pasca transaksi
4. Mencari pembeli di kalangan pemindang dengan menawarkan ikan pelagis size 8 - 12 dan diatasnya agar terjangkau bagi kalangan pemindang
5. Monitoring perkembangan harga ikan cakalang setiap harinya, pada saat momen harga bersaing dan margin terpenuhi, maka dapat dilakukan penjualan
6. Mengupayakan penyediaan produk sesuai spesifikasi dari buyer.
7. Penyelesaian keluhan buyer dan tindakan pencegahan agar hal serupa tidak terulang kembali.
8. Mengoptimalkan produksi dari Cabang atau Unit sendiri sehingga harga bisa lebih bersaing. Pabrik es Cabang Sorong evaporator mengalami kebocoran dan ice cane sebagian rusak,

Jasa Kepelabuhanan

Es

Penjualan Es tahun 2024 mencapai 227.315 Ton atau 66% dari target RKAP sebesar 346.942 Ton. Nilai Pendapatan Es mencapai Rp13.970.293.799,- atau 66% dari target RKAP sebesar Rp21.140.364.109,-. Tidak tercapainya target penjualan es dikarenakan sarana produksi es di beberapa Cabang kurang optimal dan beberapa mengalami kerusakan komponen mesin pabrik es sebagai berikut:

1. Pabrik es Cabang Sorong evaporator mengalami kebocoran dan ice cane sebagian rusak,
2. Pabrik es Cabang Ambon kompresor mengalami kerusakan
3. Pabrik es Cabang Bitung 2 (dua) unit produksi mengalami kerusakan
4. Pabrik es Cabang Bacan terdapat kerusakan 20 unit ace can

Kerusakan tersebut menyebabkan volume produksi terbatas yang berdampak terhadap penjualan. Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan pada Unit Pabrik Es.

Cold Storage

Realisasi pelayanan *Cold Storage* tahun 2024 mencapai 154.623 ton atau 94% dari target RKAP sebesar 165.282 Ton. Nilai pendapatan mencapai Rp19.132.171.929,- atau 94% dari target RKAP sebesar Rp20.399.523.915,-. Kendala dan permasalahan pada segmen usaha *Cold Storage* yaitu:

1. Minimnya mitra yang melakukan penyimpanan ikan di *Cold Storage*.
2. *Cold Storage* yang digunakan untuk menyimpan stok ikan sendiri tidak dibebani biaya simpan yang merupakan sumber pendapatan dari segmen *Cold Storage*.

Tindaklanjut dan upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Memaksimalkan potensi mitra yang berminat untuk menggunakan jasa penyimpanan ikan di *Cold Storage* dengan pemberian ruang untuk mitra yang dipisahkan dengan stok ikan sendiri.
2. Manajemen perlu mengatur pembebanan biaya penyimpanan ikan di *Cold Storage*, segmen perdagangan/produksi yang menyimpan ikan di *Cold Storage* juga menanggung biaya penyimpanan ikan untuk mengurangi beban biaya dan menambah pendapatan segmen *Cold Storage*.

Ruang & Tanah

Realisasi penyewaan ruang & tanah tahun 2024 mencapai 5.786.599 m² atau 89% dari target RKAP sebesar 6.512.049 m². Nilai pendapatan mencapai Rp73.147.393.755,- atau 97% dari target RKAP sebesar Rp75.196.704.118,-. Kendala dan permasalahan pada segmen usaha ruang & tanah yaitu:

1. Fasilitas ruang & bangunan di cabang dan unit beberapa sudah mengalami kerusakan fisik.
2. Penurunan tanah di kawasan muara baru seperti di Muara Baru Center (MBC) yang sering terendam.
3. Tarif ruang & bangunan dari tahun 2018 belum mengalami kenaikan.

Tindaklanjut dan upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Perbaikan sarana dan prasarana ruang & bangunan yang mengalami kerusakan.
2. Peninggian area MBC dan sarana dan prasarana untuk mobilitas mitra.
3. Penyesuaian tarif ruang & bangunan.

Tambat Labuh

Realisasi pelayanan tambat labuh tahun 2024 mencapai 229.462 kapal atau 70% dari target RKAP sebesar 329.229 kapal. Nilai pendapatan mencapai Rp1.438.030.947,- atau 72% dari target RKAP sebesar Rp2.028.260.370,-.

Bengkel & Dok

Realisasi pelayanan bengkel & dok tahun 2024 mencapai 1.177 kapal atau 66% dari Target RKAP sebesar 1.777 kapal. Nilai pendapatan sebesar Rp17.961.997.794,- atau 67% dari target RKAP sebesar Rp27.118.410.011,-. Kendala dan permasalahan pada segmen usaha bengkel & dok yaitu:

1. Rencana KSU doking dengan PT Ratson Maritim Indonesia di Sorong terkendala status lahan tukar guling
2. Dock unit Tegal ada kerusakan pada roda kredel dan kereta sehingga produksi tidak optimal
3. Dock Cab. Bitung ada kerusakan rel dan kereta sehingga produksi/operasional tidak optimal
4. Dock Cab. Sorong pada slipway (500 GT) terjadi kerusakan pada sling

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan adalah:

1. Cabang Sorong dan Divisi Manajemen Resiko dan Aset menindaklanjuti status lahan tukar guling dengan mengurus sertifikat lahan ke BPN
2. Dock Unit Tegal perlu perbaikan pada dua unit slipway yang saat ini sedang berjalan perbaikan secara bertahap
3. Dock Cab. Bitung dalam proses perbaikan
4. Dock Cab. Sorong menunggu dana untuk perbaikan

Listrik

Realisasi pelayanan listrik tahun 2024 mencapai 25.863.190 kWh atau 253% dari target RKAP sebesar 10.210.359 kWh. Nilai pendapatan sebesar Rp23.279.224.690,- atau 227% dari target sebesar Rp10.238.024.053,-. Sarana dan prasarana kelistrikan seperti genset dan travo sering mengalami gangguan teknis sehingga diperlukan peremajaan.

Air

Realisasi pelayanan air tahun 2024 mencapai 955.682 m³ atau 80% dari Target RKAP sebesar 1.192.634 m³. Nilai pendapatan sebesar Rp20.509.332.540,- atau 81% dari target RKAP sebesar Rp25.234.484.961,-. Kendala dan permasalahan pada segmen usaha air yaitu:

1. SWRO tidak beroperasi
2. Persaingan air yang masuk dari luar kawasan
3. Adanya kerusakan fasilitas segmen air

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan adalah:

1. Perlu dilakukan perbaikan SWRO dan kerjasama dengan mitra
2. Peningkatan produksi air untuk pemenuhan air dalam kawasan
3. Perbaikan fasilitas segmen air

Bahan Bakar Minyak (BBM)

Realisasi pelayanan BBM s/d tahun 2024 mencapai 571.482 KL atau 1.726% dari Target RKAP sebesar 33.114 KL. Nilai pendapatan sebesar Rp69.185.722.469,- atau 1.730% dari target RKAP sebesar Rp3.999.739.066,-. Kendala dan permasalahan pada segmen usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut:

1. Pengambilalihan SPBUN 01 Cabang Brondong dari Koperasi Nusantara Jaya terkendala dengan Koperasi yang menolak pengambilalihan
2. Pengambilalihan SPBUN Unit Prigi dari Koperasi Karmila terkendala dengan berakhirnya kerjasama dengan pertamina.
3. Program solusi nelayan dengan rencana pembangunan SPBUN di 3 (tiga) lokasi Bitung, Ambon dan Ternate masih dalam tahap kelengkapan persyaratan dari Pertamina.

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan adalah:

1. Pertamina sudah mengakhiri kerjasama dengan koperasi dan PT Perikanan Indonesia sudah mengajukan permohonan baru dan saat ini sedang proses memenuhi persyaratan dari Pertamina,
2. Proses Addendum sudah berjalan sampai dengan Maret 2024 dan mempercepat pemenuhan persyaratan dari Pertamina dengan koordinasi dengan dinas terkait.
3. Berkoordinasi dengan dinas terkait (DKP, KKP, PUPR dan KLH) untuk mempercepat keluarnya rekomendasi pembangunan SPBUN yang menjadi kelengkapan dokumen persyaratan dari Pertamina.

Jasa Lainnya

Realisasi nilai pendapatan pelayanan jasa lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.889.789.665,- atau 75% dari target RKAP sebesar Rp3.861.616.177,-. Kendala pada segmen usaha jasa lainnya yaitu segmen bisnis seperti pas masuk, parkir, kebersihan dan limbah (IPAL) masih di kelola oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menyusun kajian bisnis segmen pas masuk, parkir, kebersihan dan limpah/IPAL untuk pengelolaan.

Pakan

Realisasi penjualan pakan ikan dan udang tahun 2024 mencapai 1.027 Ton atau 34% dari Target RKAP sebesar 3.000 Ton. Nilai pendapatan sebesar Rp7.620.543.750,- atau 26% dari target sebesar Rp29.100.000.000,-. Kendala dan permasalahan pada pakan ikan yaitu proses pembayaran bahan baku yang menyebabkan pengadaan bahan baku terhambat, belum beroperasinya mesin pakan apung dan pabrik berhenti operasional. Untuk pakan udang permintaan pakan yang mayoritas ukuran kecil (*crumble*), mesin (*crumble*) yang kapasitas kecil sehingga menghambat/memperlambat produksi, masih terbatasnya customer pakan udang yang bisa pembayaran cash dan pabrik berhenti operasional.

Tindaklanjut dan upaya yang dilakukan terkait pakan ikan adalah berkoordinasi untuk proses pengadaan dan pembayaran dan percepatan perbaikan mesin extruder serta mencari mitra yang akan mengoperasionalkan pabrik. Untuk pakan udang yaitu menawarkan ke customer untuk bisa memakai pakan yang ukuran besar, mengadakan dies pakan udang ukuran 1mm, mencari customer yang dapat transaksi secara cash dengan volume yang besar serta mencari mitra yang akan mengoperasionalkan pabrik.

Nilai Ekonomi yang Diterima dan Didistribusikan

GRI 201-1

Pada tahun 2024, nilai ekonomi yang diterima sebesar Rp419.001.315.548,-. Nilai ekonomi yang diterima berasal dari penjualan, pendapatan bunga, dividen, royalty, sewa property dan penjualan asset tetap. Nilai ekonomi yang didistribusikan yaitu untuk biaya operasional, gaji dan tunjangan karyawan, biaya investasi social kepada masyarakat melalui program TJSL. Berikut tabelnya:

Uraian	2024	2023
Nilai Ekonomi yang dihasilkan		
Penjualan	416.900.486.467	565.304.017.757
Pendapatan Bunga	2.076.829.081	2.436.772.12
Dividen	-	-
Royalti	-	-
Sewa Properti	71.925.093.575	76.844.505.3

Penjualan Aset Tetap	24.000.000	-
Total Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (1)	419.001.315.548	567.740.789.883
Nilai Ekonomi yang didistribusikan		
Biaya Operasional		
Beban Pokok Pendapatan	316.578.135.312	442.610.920.956
Beban Penjualan	-	-
Beban Administrasi dan Umum	116.296.379.114	107.454.512.747
Sub Total Biaya Operasional	432.874.514.426	550.065.433.703
Gaji dan Tunjangan Karyawan		
Beban Pokok Pendapatan	-	-
Beban Penjualan	-	-
Beban Umum dan Administrasi	87.971.845.661	81.084.498.179
Subtotal Gaji dan Tunjangan Karyawan	87.971.845.661	81.084.498.179
Pembayaran Kepada Penyedia Modal		
Bunga	-	-
Dividen	-	-
Subtotal Pembayaran Kepada Penyedia Modal	-	-
Pembayaran Kepada Pemerintah		
Pembayaran Kepada Pemerintah		
Investasi Masyarakat		
Program Kemitraan/ PUMK	-	-
CSR/ Non PUMK	128.879.509	94.028.833
Subtotal Investasi Masyarakat	128.879.509	94.028.833
Total Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (2)		
Nilai Ekonomi Ditahan (1-2)		
Subsidi Pemerintah		

Pajak

[GRI 207-1] [GRI 207-2] [GRI 207-3]

Kepatuhan Pajak

PT Perikanan Indonesia secara konsisten mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan mendukung langkah proaktif dalam memahami regulasi perpajakan terkini, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap seluruh unit kerja dan anak perusahaan untuk memastikan kepatuhan pajak dijalankan secara menyeluruh.

Peninjauan dan persetujuan strategi perpajakan dilakukan oleh Direktur Keuangan sebagai pejabat eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tata kelola perpajakan di Perseroan. Perseroan berkomitmen mendukung pengembangan usaha berkelanjutan melalui evaluasi dan diskusi konstruktif terhadap model bisnis agar senantiasa sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tata Kelola, Pengendalian, dan Manajemen Risiko Pajak

[GRI 207-2]

PT Perikanan Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko perpajakan. Unit kerja pajak dilibatkan sejak tahap awal dalam penyusunan model bisnis, proses bisnis, serta kebijakan dan prosedur internal guna memitigasi potensi risiko pajak sejak dini, terutama pada aktivitas utama yang memiliki dampak signifikan.

Selain itu, unit kerja pajak mengembangkan sistem pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko perpajakan. Perseroan juga menanamkan kesadaran di seluruh lini organisasi bahwa setiap keputusan dan aktivitas bisnis memiliki konsekuensi pajak yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengelolaan Isu Perpajakan

[GRI 207-3]

PT Perikanan Indonesia aktif berpartisipasi dalam Tax Forum BUMN dan kegiatan diskusi terkait isu-isu perpajakan terkini. Perseroan juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan sosialisasi perubahan regulasi perpajakan di lingkungan perusahaan.

Selain itu, Perseroan secara rutin melaksanakan pemeriksaan internal untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan proses restitusi pajak berjalan sesuai ketentuan. Setiap hasil temuan dari otoritas pajak ditindaklanjuti melalui penetapan langkah perbaikan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Perpajakan. Perseroan juga mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Bantuan Finansial dari Pemerintah

[GRI 201-4]

Selama tahun pelaporan, PT Perikanan Indonesia tidak menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk apa pun.

Kontribusi kepada Negara

Sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, PT Perikanan Indonesia secara rutin melakukan pembayaran pajak kepada negara. Pada tahun 2024, Perseroan telah menyetorkan pajak sebesar Rp33,40 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp10,45 miliar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan pajak yang optimal.

Dukungan Terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

PT Perikanan Indonesia sebagai entitas bisnis yang mengelola sektor perikanan, secara berkelanjutan berusaha untuk meningkatkan sumbangannya terhadap perekonomian nasional. Hal ini dilakukan melalui pembayaran pajak kepada negara serta dukungan terhadap ekonomi lokal, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal akan mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perusahaan menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perusahaan memberikan perhatian yang besar pada program ini, dengan tujuan agar program tersebut dapat berhasil dan memberikan dampak positif yang besar bagi berbagai pihak, terutama bagi masyarakat dan komunitas sekitar.

Implikasi Finansial Akibat Perubahan Iklim

Setiap industri di dunia telah terpengaruh oleh perubahan iklim, termasuk PT Perikanan Indonesia yang bisnisnya sangat terkait dengan alam. Perubahan iklim yang berdampak besar bisnis Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa dampak tidak langsung dari perubahan iklim terhadap bisnis Perusahaan:

1. Penurunan hasil produktivitas.

Gelombang panas, banjir dan kekeringan sangat mempengaruhi proses bisnis Perusahaan yaitu *Fish Trade and Processing* (FTP) yang sangat bergantung dengan stok ikan yang juga sangat berpangku dengan iklim. Begitu juga pada kegiatan budidaya (tambak) juga sangat terpengaruh oleh perubahan iklim.

2. Kerusakan infrastruktur.

Salah satu segmen bisnis Perusahaan adalah sector kepelabuhanan perikanan. Bencana alam seperti banjir dan rob menjadi musuh utama bagi segmen bisnis kepelabuhanan karena berdampak terhadap kerusakan infrastruktur. Terhadap hal tersebut berdampak terhadap bertambahnya biaya operasional maupun investasi perusahaan.

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, PT Perikanan Indonesia melakukan berbagai langkah seperti:

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Perusahaan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi risiko finansial yang terkait dengan perubahan iklim di sektor perikanan. Hal ini termasuk risiko fisik misalnya, banjir, rob, gelombang panas dan risiko transisi misalnya, perubahan kebijakan, pergeseran permintaan konsumen. Perusahaan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai probabilitas dan dampak finansial dari setiap risiko yang diidentifikasi dan menggunakan model simulasi dan analisis scenario untuk memprediksi potensi kerugian finansial di masa depan.

2. Mitigasi Risiko

Perusahaan mengupayakan untuk melaksanakan proses bisnis secara berkelanjutan seperti pengelolaan armada kapal secara efisien dengan mengoptimalkan jadwal perjalanan dan rute kapal untuk mengurangi emisi penggunaan bahan bakar kapal, pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan melakukan monitoring dan penanggulangan pencemaran untuk menghindari potensi risiko berkurangnya hasil tangkapan ikan maupun kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana yang berasal dari perubahan iklim.

3. Pelaksanaan Program

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aktivitas operasional dan upaya menjaga iklim, melalui program TJSL Perusahaan melaksanakan kegiatan disektor lingkungan seperti penghijauan disekitar wilayah operasional perusahaan yang dilaksanakan secara kolaborasi agar dampak yang dirasa lebih besar.

PT Perikanan Indonesia belum melakukan penghitungan finansial atas perubahan iklim karena perhitungan ini melibatkan pihak luar dan iklim yang berada diluar kendali Perseroan.

Survey Kepuasan Pemasok

[GRI 203-2]

Seluruh mitra yang tergabung dalam rantai pengadaan dan distribusi berperan sangat penting dalam pengadaan dan distribusi produk perikanan. Kami senantiasa menjaga kepuasan mitra Kami dengan mengukur Tingkat Kepuasan Pemasok untuk terus meningkatkan layanan dan distribusi kami. Hasil pengukuran ini akan memberikan informasi yang sangat penting tentang

cara memperbaiki proses secara konsisten. Berikut nilai kepuasan pemasok:

Jenis Nilai	2024	2023
Nilai Kepuasan Pemasok	100%	100%
Nilai Ketidakpuasan Pemasok		

Distribusi Nilai Ekonomi

Perusahaan telah menerima nilai ekonomi dari penjualan dan pendapatan usaha lainnya pada tahun 2024. Distribusi nilai ekonomi tersebut meliputi beban pokok penjualan, gaji karyawan, pembayaran pajak kepada pemerintah, dan dana program TJSL kepada masyarakat. Selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan yang didistribusikan menjadi nilai ekonomi yang ditahan oleh Perusahaan. Berikut adalah distribusi nilai ekonomi Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Tabel Nilai Ekonomi yang Diperoleh dan Didistribusikan:

Uraian	2024	2023
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan		
Penjualan	416.900.486.467	565.304.017.757
Pendapatan Lain-lain	339.713.545.061	120.533.795.705
Jumlah Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (A)	756.614.031.528	685.837.813.462
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan		
Beban Pokok Penjualan	316.578.135.312	442.610.920.956
Jaminan Sosial Pegawai	5.490.023.408	4.393.122.603
Beban Gaji, Pengobatan, dan Premi Pensiun	87.971.845.661	81.084.498.179
Pembayaran Pajak Final		
Pembayaran Pajak Kini		
Program TJSL	128.879.509	94.028.833
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (B)	410.168.883.890	528.182.570.571
Nilai Ekonomi yang Ditahan (A-B)	346.445.147.638	157.655.242.892

Kinerja Lingkungan

PT Perikanan Indonesia telah menerapkan seperangkat kebijakan sebagai sebuah sistem yang mengatur seluruh kegiatan bisnis Perusahaan dan dampaknya terhadap kebermanfaatan lingkungan dalam menjalankan pengelolaan dampak lingkungan. Beberapa kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan, antara lain:

1. Menaati Peraturan Perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan;
2. Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan;
3. Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat;
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi;
5. Membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi;
6. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana;
7. Melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Dalam konteks program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, biaya yang terkait dengan lingkungan tercantum dalam bagian Aspek Sosial sebagai salah satu komponen pilar lingkungan.

Program TJSL pada Pilar Lingkungan terdapat pada program penghijauan yang dilaksanakan disekitar wilayah operasional perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan operasional yang dilaksanakan.

Material

[GRI 301-1] [GRI 301-2] [GRI 301-3]

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan

[OJK F.5]

Dalam mendukung praktik bisnis berkelanjutan, PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menggunakan material yang ramah lingkungan dalam setiap proses produksi dan operasional. Perseroan menyadari bahwa industri pangan dan perikanan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa pada proses pengolahan hasil perikanan, guna mengurangi jejak karbon dan ketergantungan terhadap energi tidak terbarukan seperti gas alam atau minyak bumi.

Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, Perseroan juga melakukan langkah-langkah efisiensi material serta memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Pada tahun pelaporan, proses produksi pengolahan ikan di PT Perikanan Indonesia telah menggunakan material yang bersifat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan produk reclaimed, baik untuk produk utama maupun kemasan. Dengan demikian, belum terdapat produk maupun kemasan yang dikumpulkan, digunakan kembali, atau didaur ulang setelah masa manfaatnya berakhir.

Energi

[GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-4] [GRI 302-5]

Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [OJK F.6]

Dalam pengelolaan energi, PT Perikanan Indonesia mengikuti regulasi pemerintah yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dengan menerapkan manajemen konservasi energi yang dibuktikan dengan sertifikat penerapan ISO 50001. Dalam framework ISO 50001 tersebut ditetapkan di antaranya kebijakan pengelolaan dan konservasi energi.

Sumber energi untuk aktivitas operasional PT Perikanan Indonesia berasal dari sumber daya tidak terbarukan, yaitu batubara, listrik yang berasal dari PLN dan bahan bakar minyak (BBM) solar. Penggunaan pada 2024 yaitu sebesar:

Sumber Energi	Jumlah	Satuan
Listrik PLN	15.001,14	MWH
BBM (Solar)		
Bahan bakar kapal	38.580	Liter
Kendaraan dinas direksi	5.400	Liter
Kendaraan dinas operasional	8.100	Liter
Bus Karyawan	270	Liter

Batu Bara

7

Ton

Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [OJK F.7]

Faktor utama yang menentukan daya saing perusahaan dan keberlanjutan usahanya adalah peningkatan efisiensi dalam operasional. Ini dicapai dengan mengelola sumber daya yang efektif, berinovasi dalam produk, dan memberikan layanan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan efisiensi secara terus-menerus dapat berpengaruh pada pencapaian profitabilitas yang berkelanjutan Perseroan baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Ketersediaan bahan bakar yang memadai sangat penting dalam menjalankan bisnis, karena penetapan harga produksi Perusahaan sangat bergantung pada penghitungan konsumsi bahan bakar dalam setiap aspek operasional. Hal ini menjelaskan mengapa penghematan bahan bakar penting bagi Perusahaan, karena hal tersebut dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengurangi biaya produksi secara keseluruhan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan, khususnya pabrik pakan PT Perikanan Indonesia menggunakan bahan bakar batu bara yang tinggi kalorinya. Hal tersebut dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan mengurangi limbah bahan bakar secara optimal.

Aspek Air

Penggunaan Air [OJK F.8]

Penggunaan air di PT Perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu digunakan sebagai kategori konsumtif (dialirkan ke tenant) dan kategori non konsumtif (keperluan perkantoran dan sarana umum). Sumber air yang digunakan PT Perikanan Indonesia berasal dari PDAM. Perusahaan menyadari bahwa penggunaan air secara berlebihan dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Kondisi faktual tersebut mendorong Perusahaan untuk menggunakan air secara bijaksana, termasuk melakukan berbagai langkah penghematan. Langkah konkret antara lain menggunakan air secukupnya sehingga air yang terbuang menjadi air limbah semakin berkurang. Penghematan air juga dilakukan dengan penggunaan sumber air alternatif sebagai sumber air di lokasi pekerjaan, dan perbaikan jika ada kebocoran pada sistem perpipaan.

Kebijakan penghematan air yang dilakukan Perseroan diharapkan dapat menurunkan volume penggunaan air pada jumlah proyek yang sama. Penggunaan air menurun meskipun dengan jumlah produksi yang tetap. Pada tahun 2024, volume penggunaan air tercatat sebanyak 648.341 m³, turun 29.518 m³ dibandingkan tahun 2023 dengan total penggunaan air sebanyak 677.859 m³. Perbandingan penggunaan air pada tahun pelaporan disbanding tahun-tahun sebelumnya

Keanekaragaman Hayati

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati [OJK F9]

Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang memiliki bermacam-macam variasi pada suatu lingkungan tertentu. Bentang alam Indonesia yang berada di antara dua pulau dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Untuk itu, PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia melalui berbagai program konservasi flora dan fauna.

Berikut adalah pemetaan lokasi perusahaan terhadap Kawasan konservasi:

Lokasi	Dampak Aktivitas Perusahaan terhadap Keanekaragaman Hayati
Wilayah Operasional PPS Nizam Zachman Jakarta Utara Pemetaan Penghijauan Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk, Hutan Mangrove muara Angke, Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Tarakan	Pencemaran laut, kerusakan habitat laut

Emisi

[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3] [GRI 305-4] [GRI 305-5] [GRI 305-6] [GRI 305-7]

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk menghindari dampak negatif berkelanjutan akibat emisi gas rumah kaca, maka setiap kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global wajib didukung. Salah satu upaya itu adalah ditandatanganinya Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Ini adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa - Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Perjanjian ini dinegosiasikan oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) perwakilan negara- negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis. Setelah proses negosiasi, Perjanjian Paris ditandatangani tepat pada peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangannya. Kesepakatan global ini bertujuan membatasi kenaikan suhu hingga rata-rata global hingga 1.5°C di atas tingkat pra- industri, serta Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang menuju Net Zero di tahun 2060 atau lebih awal.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk ikut membangun kedaulatan terhadap lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap Perjanjian Paris melalui beberapa program salah satunya yaitu program TJSL.

Metodologi Penghitungan GRK

[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3]

PT Perikanan Indonesia mengikuti panduan daripada GHG Protocol corporate standard dan Corporate Value Chain (scope 3) untuk melakukan kalkulasi GRK. Emisi yang dilaporkan pada tahun 2023 terdiri dari emisi langsung. Harapan kedepannya Perseroan mampu untuk mengukur scope 2 dan 3 agar memaksimalkan akurasi perhitungan.

Cakupan	No	Kategori	Contoh Sumber Emisi	GRK yang dilaporkan: Menggunakan unit yang ditentukan
Cakupan 1	1.1	Emisi langsung dari pembakaran stasioner	Pembakaran bahan bakar, termasuk pembakaran biomassa (harus dihitung secara terpisah), misalnya Generator, boiler pada pabrik pakan.	CO2, CH4, N2O, CO2e
	1.2	Emisi langsung dari pembakaran kendaraan	Pembakaran bahan bakar dari sumber bergerak termasuk pembakaran biomassa (harus dihitung secara terpisah, misalnya pengangkutan ikan).	CO2, CH4, N2O, CO2e
	1.3	Emisi terkait proses langsung	N/A	
	1.4	Emisi langsung bocor	Emisi GRK yang hilang termasuk kebocoran dari peralatan dan sistem penyimpanan seperti <i>Cold Storage</i> .	HFC, PFC, CO2e (kulkas, AC), N2O, CO2e (pupuk), CH4, N2O, CO2e, CH4, CO2e
Cakupan 2	2.1	Emisi langsung tidak dari energi yang dikonsumsi yang diimpor melalui jaringan fisik (Pemanasan, uap, pendinginan, udara bertekanan) tidak termasuk listrik	Emisi yang dihasilkan dari pembangkitan uap impor, pemanasan, pendinginan, udara bertekanan.	
Cakupan 3	3.1	Transportasi dan distribusi hulu	Transportasi dan distribusi input (yaitu barang, jasa, bahan, atau bahan bakar yang dibeli atau diperoleh), termasuk transportasi dan distribusi perantara (antar fasilitas), pergudangan, dan penyimpanan, yang terkait dengan pemasok langsung.	CO2, CH4, N2O, CO2e
	3.2	Transportasi dan distribusi hilir	Transportasi dan distribusi produk yang dijual, termasuk pergudangan dan ritel.	CO2, CH4, N2O, CO2e

3.3	Perjalanan karyawan	Transportasi karyawan dari rumah ke tempat kerja selama tahun pelaporan (dengan kendaraan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan pelapor); Karyawan yang bekerja dari rumah ke tempat kerja (telecommuting).	CO2, CH4, N2O, CO2e
3.4	Transportasi Klien dan Pengunjung	Transportasi ke dan dari lokasi pengunjung klien ke organisasi	CO2, CH4, N2O, CO2e
3.5	Perjalanan bisnis	Perjalanan bisnis karyawan.	CO2, CH4, N2O, CO2e

Perhitungan spesifik diselesaikan masing-masing pada emisi IPCC metodologi akuntansi yang disediakan oleh Panel Antar Pemerintah tentang Pedoman IPCC 2006 tentang Perubahan Iklim untuk inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, referensi lain diterapkan pada perhitungan tertentu, seperti nilai kalor bersih bahan bakar (NCV), kandungan karbon energy bahan bakar, faktor emisi transportasi dan lain-lain.

Referensi tersebut diberikan oleh UK Defra Emission Factor (EF 2022), Kementerian Indonesia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK : Puspijak / Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM : Faktor Emisi Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan) dan agensi lainnya yang relevan.

Dalam tahapan operasional untuk memperoleh data emisi Gas Rumah Kaca, PT Perikanan Indonesia Bersama PT RNI (Persero) melakukan perhitungan melalui kalkulator GRK dengan memasukkan data-data operasional perusahaan.

Berdasarkan perhitungan tersebut, dan dengan menggunakan metodologi yang sama untuk memproses data operasional tahun 2021 dan tahun 2023 menjadi emisi GRK, PT Perikanan Indonesia melaporkan jumlah emisi sebagai berikut:

Cakupan 1:

No	Sumber Emisi	Bahan Bakar	Emisi	Satuan
1	Pabrik Pakan	Batu bara	16.926	CO2
2	Bahan bakar kapal	Solar	104,54	CO2
3	Kendaraan dinas direksi	Solar	14,03	CO2
4	Kendaraan dinas operasional	Gasoline (Pertamax, Pertalite)	19,29	CO2
5	Bus Karyawan	Solar	0,70	CO2
6	Refrigerant AC kantor	Refrigeran (R22, R32)	370,53	CO2eq
7	Refrigerant Cold Storage	Refrigeran (R22, A404A)	5304,30	CO2eq

Cakupan 2 Belum dilakukan pengukuran

Cakupan 3 Belum dilakukan pengukuran

Pengurangan Emisi yang Dilakukan

[GRI 305-5] [OJK F.12]

Perusahaan berupaya untuk mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan. Untuk mengurangi emisi, salah satu caranya adalah mengurangi penggunaan listrik dan BBM. Selain itu, terkait emisi udara, PT Perikanan Indonesia telah melakukan uji emisi terhadap kendaraan operasional. Dari jumlah itu, seluruhnya (100%) lulus uji.

Upaya lain yang dilakukan oleh Perusahaan berupa program penanaman pohon. Program ini diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap pengurangan emisi, meskipun Perusahaan belum melakukan penghitungan tersendiri. Untuk penyelenggaraan program ini, Perusahaan

bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama ID Food Group dalam program TJSL Kolaborasi. Di antara jenis pohon yang banyak ditanam karena memiliki tingkat kemampuan penyerapan emisi gas karbon tertinggi adalah pohon trembesi (Samanea saman).

Aspek Limbah dan Efluen

[GRI 306-1] [GRI 306-2] [GRI 306-3] [GRI 306-4] [GRI 306-5]

Aktivitas operasional PT Perikanan Indonesia menghasilkan buangan limbah. Berdasarkan jenis zat, limbah yang dibuang terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Sedangkan berdasarkan kategori kandungannya, limbah buangan terdiri dari limbah B3 dan limbah non-B3. Perusahaan berkomitmen tinggi dalam mengelola limbah buangan agar tidak mencemari ekosistem dan masyarakat. Sebelum dibuang ke badan air, limbah buangan terlebih dahulu diproses agar tidak melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan atau perizinan. Adapun proses pengelolaan limbah di Perusahaan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Timbulan Limbah dan Dampak-Dampak yang Signifikan Terkait Limbah

Aktivitas Perusahaan berpotensi menghasilkan limbah. Proses produksi menggunakan bahan baku menimbulkan limbah berupa limbah cair, limbah B3 dan limbah non-B3, dan emisi. Kegiatan lain yang menghasilkan limbah adalah aktivitas pendukung lainnya, seperti kegiatan perkantoran. Dampak negatif limbah terhadap lingkungan dapat meracuni ekosistem, berbahaya bagi kesehatan manusia dan binatang, mencemari tanah dan perairan, mengubah suhu dan kualitas udara, dan menyebabkan perubahan iklim. Adapun data yang disampaikan dalam laporan ini hanya mencakup ruang lingkup kegiatan internal PT Perikanan Indonesia.

Pengelolaan Dampak yang Signifikan Terkait Limbah

Pengelolaan limbah di PT Perikanan Indonesia menekankan pendekatan melalui pengurangantimbulan limbah (preventif) dan pemanfaatan kembali (reuse). Jika limbah harus

dibuang ke badan air (untuk limbah cair) ataupun dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir/TPA (untuk limbah padat), maka Perusahaan mengelola limbah terlebih dahulu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perusahaan melakukan pengolahan limbah padat dengan beberapa pendekatan dan metode. Limbah yang masih bisa dicegah timbulannya, maka Perusahaan mengupayakan pencegahan timbulnya limbah melalui pemilihan material. Material yang digunakan adalah material ramah lingkungan, memiliki masa pakai yang lebih lama, serta tidak beracun dan berbahaya. Selain itu, Perusahaan juga melakukan modifikasi proses produksi dan proses bisnis di masing-masing unit kerja.

Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis [OJK F.13]

Perusahaan membagi kategori limbah yang dihasilkan berdasarkan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah Non-B3. Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung komponen yang dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah diatur dalam peraturan perundangan yang dipatuhi oleh Perusahaan. Jenis limbah B3 dominan yang dihasilkan fly ash (pada pabrik pakan), minyak dan oli bekas. Sedangkan limbah non B3 yang dikecualikan gypsum dan kapur, selain itu sampah non B3 dari kegiatan perkantoran berupa sampah organik dan anorganik. Seluruh limbah yang timbul dicatatkan dalam logbook dan neraca limbah. Pengukuran dilakukan melalui penimbangan pada kemasan limbah dan moda angkut limbah.

Komposisi Limbah	Jenis Timbulan Limbah	Limbah yang dialihkan dari Pembuangan Akhir	Limbah yang dikirim ke Pembuangan Akhir
Limbah B3	Batu Bara (Pabrik Pakan)	7 ton/ tahun	7 ton/ tahun
	Oli bekas	2 ton/ tahun	2 ton/ tahun
Limbah Non B3	Peralatan kantor, ATK dll	6 ton/ tahun	6 ton per tahun

Upaya Mengurangi Timbulan Limbah [OJK F.14]

Limbah B3	Limbah Non B3
Melakukan modifikasi pada proses dan aktivitas untuk mengurangi timbulan limbah.	Menerapkan prinsip 5R (reduce, reuse, recycle, refine & retrieve to energy)

Limbah yang tidak bisa dicegah timbulannya, maka Perseroan melakukan upaya pengelolaan limbah. Limbah yang bisa diolah secara mandiri akan dikelola langsung oleh Perusahaan. Sedangkan limbah yang tidak bisa diolah secara mandiri diolah oleh pihak eksternal berizin dan berkompetensi

Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif Secara Global

Persaingan industri yang semakin kompetitif menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu competitive advantage untuk kesuksesan Perseroan dalam jangka panjang. Era digitalisasi dan ekonomi yang semakin terbuka, mengharuskan Perseroan untuk siap bersaing dalam kancah nasional maupun global dengan menitikberatkan pada aspek keberlanjutan. Perusahaan berfokus pada pengembangan potensi karyawan untuk optimalisasi nilai tambah Perseroan menuju solusi pangan berkelanjutan.

Aspek Ketenagakerjaan

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [OJK F.21]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan inklusif guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompeten, berdedikasi, dan beretika merupakan pilar utama dalam keberhasilan operasional dan pencapaian kinerja finansial serta non-finansial. Oleh karena itu, PT Perikanan Indonesia menerapkan kebijakan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan SDM melalui pendekatan *Competency Based Human Resource Management* (CBHRM), yang dirancang secara komprehensif untuk mengoptimalkan potensi karyawan demi kemajuan bersama, baik dari segi kepuasan karyawan maupun kinerja perusahaan.

CBHRM adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang mencakup serangkaian proses terintegrasi untuk mendukung pengembangan karyawan dan organisasi, meliputi:

1. Pengelolaan Karier dan Potensi: Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan melalui program pelatihan, rotasi jabatan, dan perencanaan sukses.
2. Pengelolaan Kompetensi: Menyusun peta kompetensi untuk setiap posisi, memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti keterampilan teknis pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI)
3. Pemberian Kompensasi dan Tunjangan: Menyediakan paket kompensasi yang kompetitif, termasuk gaji, tunjangan kesehatan, dan insentif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Pengelolaan Penghentian Kerja: Memastikan proses pemutusan hubungan kerja dilakukan secara adil dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pemutusan Hubungan Kerja.
5. Pengelolaan Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara periodik untuk memberikan umpan balik dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
6. Rekrutmen Karyawan: Menggunakan proses seleksi yang transparan dan inklusif untuk menarik talenta terbaik, dengan mematuhi prinsip anti-diskriminasi.
7. Perencanaan SDM dan Pengembangan Organisasi: Menyusun strategi jangka panjang untuk memastikan keselarasan kebutuhan SDM dengan tujuan perusahaan.

Pendekatan ini mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung kesejahteraan karyawan.

Dalam menjalankan pengelolaan SDM, PT Perikanan Indonesia mematuhi regulasi nasional dan standar internasional terkait ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk:

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menjamin hak karyawan atas perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi.
2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur hak dan kewajiban pekerja, termasuk upah yang layak dan jam kerja yang sesuai.
3. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Mendukung fleksibilitas ketenagakerjaan sambil melindungi hak pekerja.
4. UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan.
5. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Memberikan kerangka penyelesaian konflik kerja secara adil.
6. PP Nomor 35 Tahun 2021: Mengatur perjanjian kerja, alih daya, waktu kerja, dan pemutusan hubungan kerja.
7. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: Memastikan sistem pengupahan yang transparan dan kompetitif.

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021: Menyediakan panduan pengupahan di industri padat karya selama pandemi.
9. Universal Declaration of Human Rights (PBB): Menjamin hak dasar karyawan di tempat kerja.
10. Konvensi ILO No. 87/1948: Menjamin kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi.
11. Konvensi ILO No. 138/1973: Melarang pekerja anak di bawah usia minimum.
12. Konvensi ILO No. 182/1999: Menghapus bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
13. Konvensi ILO No. 105/1957: Menghapus kerja paksa dalam segala bentuk.

Kepatuhan terhadap regulasi ini diawasi oleh Divisi Legal & Kepatuhan dan Satuan Pengawas Internal (SPI), dengan pelaporan rutin kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas, dengan fokus pada:

1. Keberagaman dan Inklusivitas: Perseroan merangkul karyawan dari berbagai latar belakang, memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau etnis, sejalan dengan SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Program pelatihan dan promosi berbasis kompetensi diberikan secara setara kepada semua karyawan.
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Perseroan menerapkan sistem K3 di semua fasilitas, termasuk *cold storage*, Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan kapal, dengan standar yang memenuhi regulasi nasional dan ISO 45001 tentang Sistem Manajemen K3. Ini mencakup penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan, dan simulasi tanggap darurat.
3. Jaminan Kesehatan: Setiap karyawan memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan dan asuransi tambahan, serta kegiatan kesehatan seperti pemeriksaan rutin dan donor darah, mendukung SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).
4. Fasilitas Kerja yang Mendukung: Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang bersih, ergonomis, dan mendukung kesejahteraan mental dan fisik, seperti ruang kerja yang higienis dan area istirahat di UPI.
5. Kompensasi Kompetitif: Paket kompensasi mencakup gaji yang sesuai dengan standar industri, tunjangan, dan insentif berbasis kinerja, untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.

Untuk terus meningkatkan lingkungan kerja yang layak dan aman, PT Perikanan Indonesia akan:

1. Meningkatkan Program Pelatihan: Memperluas pelatihan berbasis CBHRM untuk mendukung pengembangan keterampilan teknis dan soft skills karyawan.
2. Mengadopsi Teknologi untuk K3: Mengintegrasikan sistem pemantauan digital untuk keselamatan kerja di UPI dan kapal.
3. Memperkuat Inklusivitas: Meluncurkan inisiatif khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, mendukung SDG 5.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan**: Menyediakan program kesejahteraan mental, seperti konseling, untuk mendukung kesehatan holistik karyawan.

Dengan komitmen ini, PT Perikanan Indonesia memastikan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan produktif, yang tidak hanya mendukung kinerja perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada SDG 3, 5, 8, dan 10.

Komposisi Pekerja

[GRI 2-7] [GRI 2-8] [GRI 405-1] [OJK C.3]

Per 31 Desember 2024, jumlah pekerja PT Perikanan Indonesia, yang terdiri dari pekerja tetap dan pekerja kontrak, tercatat sebanyak 150 orang. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan sebanyak 456 orang dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 606 orang.

Penurunan jumlah pekerja tersebut merupakan bagian dari proses rasionalisasi pekerja yang dilaksanakan Perseroan dalam rangka implementasi Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP). Langkah ini ditempuh untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan bisnis yang lebih efisien, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha pasca restrukturisasi.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2024	2023
Pria	113	495
Wanita	37	111
Jumlah	150	606

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2024	2023
Senior Executive Vice President	1	-
Vice President	9	10
Assistant Vice President	-	-
Staff Utama	-	-
Manager	22	37
Branch Manager	10	12
Assistant Manager	29	83
Kepala Unit	7	19
Staff	72	445
Jumlah	150	606

Komposisi Pekerja Berdasarkan Rentang Usia

Rentang Usia	2024	2023
<24 tahun	-	16
25 - 36 tahun	59	208
37 - 45 tahun	36	153
46 - 50 tahun	26	100
51 - 55 tahun	25	105
>56 tahun	4	24
Jumlah	150	606

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2024	2023
SD	4	13
SMP	0	18

SMA	39	286
Diploma	13	51
S1	80	216
S2	14	22
S3	-	-
Jumlah	150	606

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2024	2023
Tetap	127	471
PKWT	23	135
Jumlah	150	606

Perekutan dan Perputaran Pekerja

[GRI 401-1]

PT Perikanan Indonesia memegang teguh prinsip keberagaman dan kesempatan yang sama sebagai pilar utama dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, terlibat, dan kompeten. Perseroan percaya bahwa lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komitmen ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG Nomor 10 (Berkurangnya Kesengjangan).

PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau pandangan politik, memiliki kesempatan yang setara untuk bergabung dengan Perseroan, selama memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Prinsip ini diterapkan dalam:

1. Proses Rekrutmen Eksternal: Terbuka untuk masyarakat umum melalui pengumuman resmi di situs web (www.perikananindonesia.co.id), media sosial, dan platform rekrutmen nasional, seperti program Rekrutmen Bersama BUMN.
2. Proses Rekrutmen Internal: Memberikan peluang bagi karyawan existing untuk promosi atau rotasi jabatan berdasarkan penilaian kompetensi dan kinerja

Perseroan menjamin bahwa proses rekrutmen dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari diskriminasi, dengan mematuhi regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola BUMN. Selain itu, Perseroan juga mematuhi standar internasional, seperti Konvensi ILO No. 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, untuk memastikan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Pada tahun 2024, Perseroan berhasil merekrut 22 pekerja baru.

Untuk menarik kandidat terbaik, PT Perikanan Indonesia menerapkan proses rekrutmen yang ketat dan terstandarisasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Kriteria Kompetensi: Setiap posisi memiliki peta kompetensi yang jelas, mencakup keterampilan teknis (misalnya, pengelolaan cold storage atau pengolahan ikan sesuai standar HACCP) dan soft skills (seperti kepemimpinan dan kerja tim).

2. Seleksi Berbasis Meritokrasi: Kandidat dinilai berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan hasil tes (seperti tes kemampuan teknis, psikotes, dan wawancara) untuk memastikan kecocokan dengan kebutuhan perusahaan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses rekrutmen diawasi oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk mencegah praktik tidak etis, sejalan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Inklusivitas dalam Rekrutmen: Perseroan secara aktif mendorong partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam rekrutmen, mendukung SDG 5.

Dengan pendekatan ini, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa proses rekrutmen tidak hanya memenuhi standar kompetensi yang tinggi, tetapi juga mencerminkan nilai keberagaman dan inklusivitas, mendukung ketahanan pangan nasional, dan berkontribusi pada pencapaian SDG 5, 8, dan 10..

Kompensasi dan Kesejahteraan

PT Perikanan Indonesia memahami bahwa kompensasi dan kesejahteraan karyawan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kepuasan, produktivitas, dan retensi tenaga kerja. Perseroan berkomitmen untuk menyediakan paket kompensasi yang kompetitif serta program kesejahteraan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap visi perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan industri hijau. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

PT Perikanan Indonesia menghargai dedikasi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan, termasuk implementasi strategi terintegrasi untuk mendukung industri dan ekonomi hijau melalui praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan limbah Non-B3. Paket kompensasi yang diberikan mencakup:

1. Gaji Pokok: Menggabungkan seluruh komponen eksisting yang pada hakikatnya menghargai faktor orang (pay for person)
2. Tunjangan Jabatan: Pekerja yang menduduki jabatan struktural akan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai tarif (fixed) yang ditentukan, sesuai dengan job grade yang diduduki saat ini
3. Tunjangan Produktivitas: Menggabungkan seluruh komponen eksisting yang pada hakikatnya terkait dengan kehadiran (pay for productivity). Ketidakhadiran di tempat kerja akan dilakukan pemotongan dari penghasilan sebelum kewajiban yang lain sesuai tabel tunjangan produktivitas untuk setiap karyawan, kecuali menjalankan cuti dan karena sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter
4. Tunjangan Transisi: Merupakan selisih dari Take Home Pay (THP) existing dengan nilai gaji pokok dan tunjangan-tunjangan baru, untuk memastikan tidak ada karyawan yang mengalami penurunan penghasilan. Untuk tunjangan transisi bersifat sementara sampai ada evaluasi lebih lanjut, saat sistem remunerasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Holding ID Food diberlakukan
5. Tunjangan UMK: Bagi pekerja yang gaji pokok dan tunjangan produktivitas masih dibawah tarif UMK di masing-masing Kabupaten/Kota untuk sementara mendapatkan tunjangan UMK (sampai struktur remunerasi final ID FOOD diberlakukan)

Tinjauan Kinerja

[GRI 404-3]

PT Perikanan Indonesia menerapkan Sistem Manajemen Kinerja yang terstruktur dan berbasis kompetensi untuk memastikan pencapaian target perusahaan, pengembangan karyawan, dan

kontribusi optimal terhadap ketahanan pangan nasional serta industri hijau. Sistem ini terintegrasi dengan pendekatan Competency Based Human Resource Management (CBHRM) dan mencakup empat tahap utama: Penetapan Tujuan, Evaluasi Kinerja, Pembinaan, serta Penerimaan Umpan Balik. Proses ini dirancang untuk mendukung produktivitas, keterlibatan karyawan, dan perbaikan berkelanjutan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Empat Tahap Sistem Manajemen Kinerja

1. **Penetapan Tujuan (Goal Setting)**
 - Dilakukan pada awal tahun fiskal melalui proses perencanaan individu antara karyawan dan atasan langsung.
 - Tujuan ditetapkan berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang selaras dengan tujuan strategis Perseroan, seperti peningkatan volume produksi perikanan berkelanjutan, efisiensi *cold chain*, atau pengurangan limbah Non-B3.
 - KPI mencakup indikator kuantitatif (misalnya, tonase ikan yang diolah) dan kualitatif (misalnya, kepatuhan terhadap standar HACCP dan ISO 9001:2015).
 - 100% karyawan terlibat dalam proses ini, memastikan komitmen bersama terhadap target tahunan.
2. **Evaluasi Kinerja (Performance Appraisal)**
 - Dilakukan setiap triwulan untuk seluruh karyawan (100%) menggunakan KPI individu yang telah disepakati.
 - Evaluasi mencakup pencapaian target operasional (contoh: tingkat kepatuhan terhadap Sertifikat Kelayakan Pengolahan/SKP), kontribusi terhadap inovasi produk (seperti pengembangan *Tukato Seafood*), dan penerapan praktik hijau (seperti pengelolaan limbah untuk pupuk bersubsidi).
 - Hasil evaluasi didokumentasikan secara digital dan digunakan sebagai dasar untuk umpan balik, pembinaan, dan penentuan kompensasi kinerja.
3. **Pembinaan (Coaching & Development)**
 - Berdasarkan hasil evaluasi triwulanan, atasan memberikan pembinaan individu untuk mengatasi gap kinerja dan mengembangkan potensi karyawan.
 - Program pengembangan mencakup:
 - Pemetaan Bakat (Talent Mapping): Mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi untuk program sukses atau promosi.
 - Program Sertifikasi: Pelatihan berbasis HACCP, ISO 22000, atau sertifikasi halal untuk meningkatkan kompetensi teknis.
 - Pendidikan dan Pelatihan: Kerja sama dengan lembaga pelatihan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk kursus budidaya ikan berkelanjutan atau pengelolaan rantai dingin.
 - Tujuan: Meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan organisasi, mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).
4. **Penerimaan Umpan Balik (*Feedback Mechanism*)**
 - Karyawan menerima umpan balik konstruktif dari atasan dan rekan kerja melalui sesi evaluasi 360 derajat (untuk level manajerial).
 - Saluran umpan balik juga tersedia melalui survei kepuasan internal dan kotak saran digital, memungkinkan karyawan menyampaikan masukan terhadap proses kerja atau kebijakan.
 - Hasil umpan balik diintegrasikan ke dalam perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan sistemik.

Integrasi dengan Strategi Perusahaan

Sistem manajemen kinerja mendukung implementasi strategi terintegrasi PT Perikanan Indonesia, khususnya dalam:

- Industri Hijau: KPI terkait pengurangan emisi karbon di *cold storage*, pemanfaatan limbah Non-B3, dan penangkapan ikan ramah lingkungan.
- Ketahanan Pangan: Peningkatan volume distribusi produk perikanan bersertifikasi halal dan SKP ke pasar domestik dan ekspor.
- Pemberdayaan UMKM: Keterlibatan karyawan dalam program TJSL, seperti pelatihan UMKM untuk pengolahan ikan, sesuai Surat Edaran Menteri BUMN SE-10/MBU/08/2020.

Dengan sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan berorientasi pada pengembangan, PT Perikanan Indonesia memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi maksimal terhadap pencapaian target perusahaan, penguatan industri hijau, dan ketahanan pangan nasional—mendukung SDG 4, 8, dan 12 hingga tahun 2030.

Pelatihan dan Pengembangan Pekerja

[GRI 2-23] [GRI 404-1] [GRI 404-2] [OJK F.22]

PT Perikanan Indonesia menjadikan pengembangan karyawan sebagai inti dari Competency Based Human Resource Management (CBHRM). Sistem ini mencakup analisa potensi, pelatihan & pengembangan, evaluasi kompetensi, serta pengelolaan informasi SDM yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, karyawan dapat mengukur dan mengembangkan potensi diri secara terarah, sehingga meningkatkan:

- Kompetensi & kualitas kerja
- Kepuasan & loyalitas karyawan
- Kualitas proses bisnis internal
- Kepuasan pemangku kepentingan dalam rantai nilai perikanan berkelanjutan

Perseroan berkomitmen mengembangkan kompetensi pekerja melalui program pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis inti, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Pemenuhan Hak Pekerja

[GRI 2-30] [GRI 201-3] [GRI 401-3] [GRI 402-1]
[GRI 404-2] [GRI 407-1] [GRI 408-1] [GRI 409-1]

Perseroan senantiasa memprioritaskan dan menegakkan hak asasi manusia dengan komitmen penuh untuk memastikan pemenuhan hak-hak seluruh karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan Perseroan yang sejalan dengan nilai-nilai dan budaya keberlanjutan yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. Perseroan berkomitmen memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan inklusif.

Kebebasan Berserikat

[GRI 2-30] [GRI 407-1]

Perseroan meyakini bahwa hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan karyawan dibangun atas dasar saling menghormati serta memiliki visi yang sama terhadap masa depan

bersama. Oleh karena itu, Perseroan menghormati hak karyawan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara bebas.

Karyawan PT Perikanan Indonesia merupakan bagian dari Serikat Pekerja (SP) PT Perikanan Indonesia, dan Perseroan secara aktif mendukung serta memfasilitasi berbagai kegiatan serikat pekerja, termasuk dalam pelaksanaan rapat maupun kegiatan peningkatan kapasitas organisasi pekerja.

Program Pensiun

[GRI 201-3]

Perseroan menempatkan pengelolaan **Dana Pensiun PT Perikanan Indonesia** sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi norma kepatutan, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan kontribusi karyawan, baik yang masih aktif maupun yang telah purna bakti, Perseroan menyediakan program pensiun untuk menjamin kesejahteraan dan mengurangi risiko ketidakpastian finansial di masa pensiun. Usia purna bakti ditetapkan pada **56 tahun**.

Program pensiun yang dijalankan meliputi:

- **Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)**

Program tabungan dana pensiun yang dikelola secara mandiri oleh Perseroan.

- **Pesangon**

Penghargaan masa kerja dan kompensasi sebesar 60% dari gaji setiap tahun masa kerja, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan**

Program perlindungan untuk menjamin peserta ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

- **Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan**

Program yang memberikan perlindungan finansial untuk mempertahankan taraf hidup layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya akibat memasuki usia pensiun.

Cuti Melahirkan

[GRI 401-3]

Perseroan menghormati hak cuti melahirkan bagi pekerja wanita. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Pekerja wanita berhak atas cuti bersalin dengan ketentuan hanya diberikan penghasilan sebesar upah pokok dan tunjangan tetap.
- Lamanya cuti bersalin adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan disesuaikan dengan kondisi pekerja yang bersangkutan disertai rekomendasi dari dokter
- Pekerja yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan surat keterangan dokter
- Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud, pekerja bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat bidang SDM Kantor Pusat atau Kantor Cabang dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau bidan.

Keberagaman dan Kesetaraan

[GRI 202-2] [GRI 405-1] [GRI 406-1] [OJK C.3.b] [OJK F.18]

Perseroan memandang keberagaman sebagai kekuatan yang mendorong kreativitas, harmoni, dan inovasi di lingkungan kerja. Keragaman memberikan perspektif baru yang memperkaya proses pengambilan keputusan dan mendorong kolaborasi lintas fungsi.

Perseroan berkomitmen menciptakan budaya kerja yang menghargai keberagaman, menjunjung prinsip kesetaraan, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Sepanjang tahun pelaporan, tidak terdapat insiden diskriminasi yang terjadi di lingkungan PT Perikanan Indonesia.

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap inklusivitas, Perseroan juga memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dan berkembang. Perseroan meyakini bahwa setiap individu, tanpa memandang keterbatasan fisik, memiliki potensi yang dapat mendukung kemajuan perusahaan dan bangsa.

Membangun Budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi pondasi utama dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan yang berkelanjutan. Dengan menempatkan K3 sebagai prioritas, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan dari potensi risiko kecelakaan, tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan dan masyarakat sekitar. Budaya K3 yang kuat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan aman.

Perusahaan menyadari bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat sangat berpengaruh pada motivasi dan kinerja karyawan. Oleh sebab itu, penerapan praktik K3 harus menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari dan dipahami oleh seluruh lapisan organisasi. Komitmen penuh terhadap K3 membantu mengurangi kecelakaan kerja serta dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan membangun budaya K3 yang menyeluruh, perusahaan bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan bebas risiko. Langkah ini tidak hanya melindungi aspek fisik karyawan, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Melalui kesadaran dan tanggung jawab bersama, perusahaan terus memperkuat standar keselamatan demi mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan.

Kebijakan, Sistem Manajemen dan Prosedur K3

[GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-4] [GRI 302-5] [OJK F.6] [OJK F.7]

Dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), PT Perikanan Indonesia berusaha menciptakan lingkungan kerja optimal yang berfokus pada kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pekerja. Demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan aspek K3. Hal ini juga merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan memenuhi hak pekerja. Berikut merupakan hak pekerja terkait aspek K3:

1. Perlindungan atas Keselamatan Kerja.
2. Perlindungan atas Kesehatan Kerja.
3. Lingkungan/kondisi kerja yang memadai sesuai bidang tugas.

Implementasi aspek K3 di PT Perikanan Indonesia mengikuti kebijakan dari holding, dimana dilakukan sesuai dengan berbagai regulasi dan standar internasional terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di antaranya sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

- ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management System.

Dalam pelaksanaan K3, Perseroan menerapkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan target *Zero Accident* atau nihilnya kecelakaan kerja serta mencegah penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 berlaku bagi seluruh pekerja tetap dan pekerja kontrak.

Perseroan juga menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) di lingkungan PT Perikanan Indonesia, kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Perseroan berkomitmen yang kuat terhadap K3LH dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.
2. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku sehubungan dengan potensi bahaya dan risiko di Perseroan.
3. Bahaya dan risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja diidentifikasi dan dianalisa.
4. Prosedur kerja yang aman dan sehat dibuat dan diterapkan.
5. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai disediakan dan digunakan oleh pekerja.
6. Pelatihan K3LH secara berkala diberikan kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka.
7. Melaksanakan dokumentasi, implementasi dan pemeliharaan terhadap sistem manajemen K3LH.
8. Kinerja K3LH terus dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
9. Menindaklanjuti peluang perbaikan atas hasil tinjauan ulang implementasi dan kinerja K3LH.

Tanggung Jawab K3

Manajemen puncak, khususnya Direksi, memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan dan menjaga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di seluruh perusahaan. Mereka berperan memastikan bahwa kebijakan K3 selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Komitmen dari manajemen puncak ini menjadi dasar kuat bagi terciptanya budaya kerja yang aman dan sehat.

Direktur Keuangan bertanggung jawab menetapkan arah dan kebijakan SMK3 yang mendukung operasional bisnis secara efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, *Vice President* Sumberdaya Manusia (SDM) memimpin pelaksanaan kegiatan K3 secara langsung, memastikan semua program keselamatan kerja dijalankan dengan baik. Tim K3LH yang profesional dan kompeten menjadi penopang utama dalam mengimplementasikan praktik K3, sehingga setiap karyawan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Sistem dan Prosedur K3

PT Perikanan Indonesia telah merumuskan kebijakan, strategi dan prosedur K3 yang lengkap, terencana, dan dapat diukur. Evaluasi K3 dilakukan secara berkala dengan memperhatikan indikator awal (*leading indicator*) dan indikator akhir (*lagging indicator*). Berikut adalah sistem dan prosedur K3 yang diterapkan di PT Perikanan Indonesia mengikuti arahan holding ID FOOD Group:

Sistem dan Prosedur K3	Penjelasan
Behavior Based Safety (BBS)	<p>Behavior Based Safety (BBS) adalah pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan fokus pada perubahan perilaku pekerja. BBS didasarkan pada prinsip bahwa sebagian besar kecelakaan dan cedera di tempat kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman (<i>unsafe acts</i>) yang dilakukan oleh pekerja, bukan hanya oleh kondisi kerja yang tidak aman.</p>

Life Saving Rules *Life Saving Rules* merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman di lingkungan kerja pabrik Perseroan. Dengan mematuhi LSR, pekerja dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan pulang ke rumah dengan selamat.

Process Safety Management (PSO)	<i>Process Safety Management (PSM)</i> adalah sistem manajemen yang bersifat proaktif dalam mengidentifikasi, memberikan pemahaman, dan melakukan upaya pengendalian terhadap potensi bahaya dan perlindungan di lingkungan kerja. Implementasi PSM bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko di lingkungan kerja serta mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja. Aspek-aspek dalam PSM mencakup panduan standar kompetensi personil untuk aspek <i>safety</i> , pengelolaan dokumen penting terkait aspek <i>safety</i> , pelaksanaan kerja aman, identifikasi dan evaluasi risiko proses, kesiapsiagaan tanggap darurat, dan elemen lainnya.
Contractor Safety Management System (CSMS)	<i>Contractor Safety Management System (CSMS)</i> adalah sistem manajemen yang mengatur pengelolaan keselamatan kontraktor dari tahap penilaian risiko pekerjaan kontraktor, pemberian sertifikasi CSMS, seleksi/ <i>screening</i> kontraktor saat lelang/tender, sampai evaluasi akhir kinerja K3LH dari kontraktor. CSMS diterapkan pada Perusahaan sebagai bentuk pencegahan risiko kecelakaan karena pekerjaan dari kontraktor.

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Investigasi Insiden

[GRI 403-2]

PT Perikanan Indonesia secara konsisten melaksanakan *Process Safety Management (PSM)* sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan keselamatan proses, perlindungan aset, serta pencegahan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.

Pelaksanaan PSM dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari seluruh aktivitas dan proses operasional perusahaan, baik pada tahap produksi, penyimpanan, distribusi, maupun kegiatan pendukung lainnya.

Dalam penerapannya, Perseroan menggunakan berbagai metode identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai berikut:

1. HAZOP (*Hazard and Operability Study*), untuk memetakan potensi bahaya dan gangguan operasional yang dapat muncul dalam setiap proses kegiatan di lingkungan perusahaan;
2. HAZID (*Hazard Identification*), untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologis, ergonomis, maupun perilaku kerja;
3. HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*), untuk menilai tingkat risiko yang dihasilkan dari bahaya yang teridentifikasi, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat;
4. Job Safety Analysis (JSA), untuk menganalisis setiap tahapan pekerjaan secara rinci, mengidentifikasi bahaya yang mungkin muncul, dan menetapkan tindakan pencegahan serta pengendalian;
5. Metode identifikasi lainnya, yang dikembangkan secara internal sesuai karakteristik kegiatan usaha perikanan, termasuk pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), *Bow-Tie Analysis*, serta inspeksi dan audit keselamatan secara berkala.

Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi PSM yang efektif, PT Perikanan Indonesia melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap seluruh sistem dan prosedur keselamatan proses. Hasil evaluasi digunakan untuk:

- Mengidentifikasi area atau sistem yang memerlukan peningkatan;

- Menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan (*corrective and preventive action*);
- Memastikan efektivitas sistem pengendalian risiko yang telah diterapkan.

Proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh tenaga ahli K3 yang kompeten, dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait agar hasil analisis bersifat komprehensif dan aplikatif di lapangan.

Selain itu, Perseroan juga memastikan pelaksanaan pelatihan keselamatan proses secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan (*safety culture*) di setiap level organisasi, serta melakukan audit dan tinjauan manajemen (*management review*) sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Pekerja

[GRI 403-6] [GRI 403-7]

PT Perikanan Indonesia menyadari pentingnya kesejahteraan karyawan sebagai investasi jangka panjang yang penting bagi Perseroan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan karyawan, termasuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Pada lingkungan Perusahaan khususnya pada Kawasan Pelabuhan, PT Perikanan Indonesia memiliki fasilitas kesehatan klinik umum yang dapat dimanfaatkan baik untuk karyawan maupun masyarakat umum. Fasilitas kesehatan tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan sehingga ditangani oleh tenaga ahli profesional serta bersertifikat. Klinik tersebut dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, seperti tempat tidur pemeriksaan, peralatan P3K, dan peralatan medis lainnya. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan rumah sakit terdekat untuk memberikan layanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses, termasuk penyediaan ambulans.

Perseroan menghargai hak privasi karyawan dan melindungi karyawan dari hal-hal yang merugikan melalui penetapan kebijakan perlindungan informasi. Hal ini diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan status kesehatan karyawan.

Selain itu, Perseroan secara konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi kesehatan bagi karyawan. Sosialisasi dilakukan melalui promosi cetak, webinar/seminar kesehatan. Terakhir kami mendukung slogan *work-life balance* dengan melaksanakan program olah raga karyawan seperti jalan sehat serta futsal, selain itu Perseroan juga melaksanakan kegiatan jum'at berkah guna membangun hubungan antar Divisi dan intansi terkait dalam Kawasan Pengelolaan Pelabuhan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong kesehatan jasmani dan kesehatan mental karyawan.

Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Pekerja Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

[GRI 403-1] [GRI 403-4]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif melalui peningkatan partisipasi aktif seluruh pekerja dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan konsultasi, komunikasi, dan pelatihan yang melibatkan seluruh level organisasi, baik di kantor pusat maupun unit operasional.

Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi dan komunikasi K3 untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab setiap pekerja terhadap pentingnya penerapan budaya keselamatan di tempat kerja. Kegiatan ini dilakukan melalui forum komunikasi rutin, briefing keselamatan (*safety talk*) sebelum memulai pekerjaan, serta pertemuan koordinasi lintas unit guna meninjau temuan risiko dan potensi bahaya di lapangan.

Selain itu, perusahaan juga secara aktif melibatkan pekerja dalam konsultasi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program K3, termasuk dalam proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penetapan tindakan pengendalian. Mekanisme konsultasi tersebut memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, atau laporan terkait kondisi keselamatan kerja tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut.

Untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, PT Perikanan Indonesia secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi K3 bagi karyawan dan perwakilan unit kerja strategis. Peserta yang telah tersertifikasi kemudian ditempatkan di berbagai unit operasional sebagai personel K3 yang berkompeten, berperan aktif dalam mitigasi risiko, melakukan pengawasan keselamatan kerja, serta membangun kesadaran K3 di lingkungan masing-masing.

Penempatan tenaga ahli K3 pada unit-unit strategis juga menjadi langkah nyata Perseroan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan operasional memiliki pengawasan keselamatan yang memadai. Ahli K3 bertugas untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja, melakukan evaluasi terhadap risiko yang muncul, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan pencegahan agar insiden kerja dapat dihindari.

Perseroan juga terus memperkuat sistem komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, melalui mekanisme pelaporan insiden, forum konsultatif, serta tinjauan manajemen secara berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta budaya keselamatan (*safety culture*) yang kuat di seluruh lingkungan kerja, serta memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan.

Layanan Kesehatan Kerja

[GRI 403-3]

PT Perikanan Indonesia menyediakan fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatan karyawan, berupa klinik dan jika karyawan memerlukan penanganan lebih lanjut dapat ditangani melalui rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan perseorangan. Perseroan juga telah melakukan sosialisasi tentang fasilitas kesehatan ini kepada karyawan melalui induksi keselamatan kerja. PT Perikanan Indonesia memandang serius data pribadi dan informasi kesehatan karyawan, sehingga perusahaan menetapkan kebijakan perlindungan informasi, di mana status Kesehatan karyawan bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan karyawan.

Pelatihan Pekerja Mengenai Kesehatan dan Keselamatan

[GRI 403-5]

Pelatihan K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk mengadakan pelatihan K3 secara rutin untuk menjaga keselamatan karyawan, meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan karyawan akan praktik kerja yang aman.

Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

[GRI 403-9] [GRI 403-10]

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pendataan terhadap kecelakaan kerja secara berkala. Pada tahun pelaporan, tidak ada kasus penyakit akibat kerja yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya. Berikut merupakan rekapitulasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja:

Tabel Kecelakaan Kerja Tahun 2023

Keterangan	Karyawan	Pekerja Lain
Jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja	-	-
Jumlah dan tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas)	-	-
Jumlah dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat	-	-
Jumlah jam kerja	19.119.192	Terkondisikan

Tabel Penyakit Akibat Kerja Tahun 2023

Keterangan	Karyawan	Pekerja Lain
Jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat penyakit akibat kerja	-	-
Jumlah dan tingkat penyakit akibat kerja yang dapat dicatat	-	-
Jenis-jenis penyakit akibat kerja yang utama	-	-

Membangun Kesejahteraan Masyarakat

Keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan dapat terganggu oleh adanya risiko sosial karena kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar wilayah operasi dan dampak negatif yang tidak tertangani. Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Perseroan turut menentukan keberlangsungan operasional usaha di masa depan. Perseroan melakukan berbagai kebijakan dan program sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab kepada mereka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

PT Perikanan Indonesia melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh kegiatan TJSL dilakukan secara terukur, terencana, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

Pelaksanaan program TJSL PT Perikanan Indonesia berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik (best practice), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, beserta seluruh peraturan sebelumnya, yaitu:
 - a. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

- b. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN (tanggal 5 Juli 2017);
 - c. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN (tanggal 20 April 2020).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (berlaku efektif sejak 1 Januari 2020);
5. Kode Etik (Code of Conduct) dan peraturan internal Perusahaan yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan;
6. Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Komite dan Pelaksanaan TJSL

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PT Perikanan Indonesia membentuk Komite TJSL yang berfungsi untuk:

1. Melakukan koordinasi antar Unit/ Direktorat untuk merumuskan tujuan petunjuk pelaksanaan Program TJSL.
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL.

Pembentukan Komite TJSL PT Perikanan Indonesia tertuang dalam Keputusan Direksi PT Perikanan Indonesia Nomor: KEP-0029/PERINDO/Dir.A/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perikanan Indonesia.

Program TJSL pada Pilar TPB / SDG

PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk terus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Kebijakan Perusahaan.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Perikanan Indonesia berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB atau *Sustainable Development Goal's / SDG's* serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan program lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Berikut penjabaran TPB/ SDG's berdasarkan pilarnya:

Pilar Sosial	
TPB 1	mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
TPB 2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
TPB 3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
TPB 4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
TPB 5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

Pilar Ekonomi	
----------------------	--

TPB 7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
TPB 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua
TPB 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
TPB 10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
TPB 17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Pilar Lingkungan

TPB 6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
TPB 11	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
TPB 12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
TPB 13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
TPB 14	Memastikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
TPB 15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola huta secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB 16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan.
--------	--

Pilar Sosial

Tanpa Kemiskinan (TPB 1)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemangku kepentingan terdekat melalui penyediaan perlindungan sosial, bantuan sosial, dan akses terhadap pelayanan dasar.

Tanpa Kelaparan (TPB 2)

Menurunkan angka kelaparan, stunting dan perbaikan status gizi melalui produktivitas, akses dan keamanan pangan yang berkelanjutan. Sebagai Perusahaan yang bergerak pada sector pangan, PT Perikanan Indonesia focus terhadap TPB 2 dengan pelaksanaan program TJSL yang berfokus pada peningkatan gizi diantaranya bantuan makanan bergizi bagi balita penderita stunting, makan bergizi gratis bagi siswa SD dan penyaluran baksos untuk panti asuhan.

Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)

Menurunkan risiko penyakit menular dan tidak menular dan kematian ibu dan anak/bayi melalui peningkatan jaminan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan perilaku hidup sehat. Selain itu Perseroan andil dalam pelaksanaan kegiatan bertema kesehatan bagi karyawan seperti rutinitas donor darah dan cek kesehatan.

Pendidikan Berkualitas (TPB 4)

Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat sekitar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan akses dan kualitas Pendidikan. PT Perikanan Indonesia telah melaksanakan kegiatan bidang Pendidikan diantaranya: bantuan beasiswa bagi anak nelayan dan bantuan peralatan sekolah.

Pilar Lingkungan

Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)

PT Perikanan Indonesia merupakan Perusahaan Pangan yang menggunakan air sebagai sumber daya alam yang cukup besar dalam proses produksi produk pangan. Sudah menjadi tugas bagi Perusahaan untuk menyediakan air dan sanitasi yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan kepada masyarakat luas.

Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (TPB 11)

Mewujudkan keamanan, kenyamanan keteraturan kota dan transportasi yang berkelanjutan melalui partisipasi pada penurunan angka kecelakaan dan pengembangan fasilitas masyarakat yang tangguh, berorientasi pada energi terbarukan, dan aman. PT Perikanan Indonesia ikut serta dalam upaya mencapai TPB 11 yaitu dengan menyediakan armada bagi pemudik dalam program mudik gratis bersama BUMN Tahun 2024.

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (TPB 12)

Memanfaatkan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab, serta perilaku ramah lingkungan. Strategi utama Perseroan terkait hal ini adalah pemanfaatan limbah Non B3 sebagai faktor produksi penunjang hasil panen.

Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13)

Mengurangi kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan akibat dampak bencana dan perubahan iklim melalui program penanaman pohon dan perencanaan energi terbarukan pada sektor perikanan.

Ekosistem Lautan (TPB 14)

Berkontribusi terhadap ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya kelautan untuk kecukupan protein hewani dari ikan, serta sumber bahan baku industri hasil laut.

Ekosistem Daratan (TPB 15)

Menjaga ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya hayati untuk perekonomian, sumber pangan, sumber air dan udara yang bersih.

Pilar Ekonomi

Energi Bersih dan Terjangkau (TPB 7)

Menggunakan energi bersih, terjangkau dan efisien melalui agenda inisiasi energi termal dan biomassa.

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8)

Berkontribusi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja yang memadai dan berkualitas terutama bagi mitra binaan dan rekanan yang tersebar di seluruh wilayah Perseroan.

Industri, Inovasi dan Infrastruktur (TPB 9)

Mewujudkan industri yang efisien, produktif, inovatif dan kompetitif, serta infrastruktur yang memadai.

Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10)

Mengurangi kesenjangan untuk kehidupan yang berkeadilan, inklusif, aman dan kondusif.

Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (TPB 17)

memaksimalkan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan ID FOOD untuk mencapai Tujuan (Goals).

Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pembangunan Hukum dan Tata kelola (TPB 16)

Mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pengembalian Investasi Sosial (SROI)

SROI, singkatan dari Social Return on Investment, adalah metode pengukuran dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang diciptakan oleh suatu program atau investasi, dengan menyatakan nilai dampaknya dalam satuan moneter. Metode ini bertujuan untuk menerjemahkan dampak sosial dan lingkungan yang kompleks ke dalam nilai ekonomi yang lebih mudah dipahami, sehingga membantu organisasi memahami efektivitas program mereka secara menyeluruh dan membuat keputusan yang lebih baik.

Terdapat 1 (satu) program TJSL Perusahaan yang diukur menggunakan metode SROI. Program tersebut yaitu bantuan freezer bagi BUMDEs.

Berikut merupakan hasil dari analisis *outcome mapping* program Bantuan Freezer Untuk UMKM Perikanan Indonesia:

The Outcomes (Perubahan yang terjadi)					
Outcome (Perubahan / Hasil)		Indikator		Sumber Outcome	Durasi Outcome (Month/Year)
1.	UMKM memperoleh keuntungan	Peningkatan jumlah pendapatan		Hasil Wawancara	2 tahun
2.	PT Perikanan Indonesia memperoleh keuntungan	Peningkatan penjualan Perusahaan		Laporan keuangan Perusahaan	2 tahun
3.	Motivasi bekerja	Etos kerja		Hasil Wawancara	2 tahun
4.	Mitra UMKM loyal menggunakan produk PT Perikanan Indonesia untuk berusaha	Kenaikan penjualan ikan PT Perikanan Indonesia		Hasil Wawancara	2 tahun
5.	Publikasi internal dan brand exposure	Pemberitaan oleh Perusahaan		Hasil Wawancara	2 tahun

Berikut merupakan asumsi dasar perhitungan dampak investasi Perusahaan terhadap program Bantuan Freezer Untuk UMKM Perikanan Indonesia:

Monetisasi			Impact	
	Financial Proxy	Source Proxy	Value of Financial Proxy	
			Net Impact Rp.	
1.	Peningkatan keuntungan PT Perikanan Indonesia	Data Penjualan	Rp 19.165.300	Rp 19.165.300
2.	Peningkatan Penjualan retail ikan PT Perikanan Indonesia	Data Penjualan	Rp 4.310.000	Rp 4.310.000
3.	Rata-rata peningkatan pendapatan mitra binaan	Wawancara	Rp 190.000 x 6 UMKM x 2 tahun	Rp 57.456.000
4.	Biaya Seminar ESQ	Seminar motivasi https://arcartaconsultant.com/training/training-motivasi-dan-etos-kerja/	Rp 2.000.000 x 6 UMKM	Rp 12.000.000
5.	Biaya Outbond Team Building	https://gilaoutbound.com/?gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu3xCKwnxWvB_UzQKO7koyn6RinJEhL5OloX_qtOsmaHwLSVb8pVwaoaAu6EEALw_wcB	Rp 225.000 x 6 UMKM	Rp 1.350.000
6.	Nilai news value / PR Value	Publikasi internal perusahaan	AD Value Rp 2.100.000 x 3 = PR Value	Rp 6.300.000

Metode monetisasi yang dilakukan pada *outcome mapping* program Bantuan Freezer Untuk UMKM Perikanan Indonesia:

- Peningkatan keuntungan PT Perikanan Indonesia dibedakan menjadi omzet dari penjualan ikan pada program bantuan *freezer* dan pendapatan bersih akibat dari pelaksanaan program dengan cara melihat laporan keuangan *retail*.
- Rata-rata peningkatan peningkatan pendapatan dari mitra binaan penerima bantuan *freezer* didapatkan melalui wawancara dengan nilai sebesar Rp 190.000 dari 6 UMKM selama 2 tahun.
- Peningkatan kesejahteraan penerima manfaat bantuan *freezer* berupa meningkatnya motivasi bekerja. Motivasi bekerja disamakan dengan biaya seminar motivasi.
- Bantuan *freezer* secara tidak langsung mengikat hubungan Perusahaan dengan mitranya yang tercermin sebagai loyalitas UMKM terhadap Perusahaan. Loyalitas disamakan dengan nilai keakraban yang bisa didapat melalui kegiatan *bonding* seperti *outbond*.

Publikasi internal Perusahaan melalui media sosial dan media pemberitaan internal memiliki *Advertisement Value* sebesar Rp 2.100.000 yang dikalikan tiga agar menjadi *Public Relation Value*.

Program Creating Shared Value (CSV)

Creating Shared Value (CSV) merupakan konsep dalam strategi bisnis yang berfokus kepada penciptaan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat. Sehingga diharapkan selain penerima (masyarakat) yang mendapatkan manfaat, perusahaan juga dapat menerima manfaat atas program TJSL yang dijalankan.

Program TJSL - CSV yang dijalankan Perusahaan yaitu Bantuan Freezer bagi UMKM atau BUMDEs. Skema CSV yang dilaksanakan yaitu PT Perikanan Indonesia memberikan bantuan *freezer* kepada pelaku UMKM, dengan sebelumnya terdapat kesepakatan atau komitmen dari pelaku UMKM tersebut untuk membeli ikan pada PT Perikanan Indonesia secara berkelanjutan. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak bagi penjualan ikan PT Perikanan Indonesia.

Pengaduan Masyarakat

[OJK F.24]

PT Perikanan Indonesia menyadari bahwa operasional perusahaan, khususnya di sektor perikanan, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, seperti dampak lingkungan dari pengelolaan limbah atau potensi ketidaksesuaian dalam pelayanan produk. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan saluran pengaduan atau keluhan yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelanggan, nelayan, pembudidaya ikan, dan mitra UMKM. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk menjalankan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Tujuan Saluran Pengaduan

Saluran pengaduan disiapkan untuk:

1. Meningkatkan Pelayanan Unggul: Memastikan bahwa keluhan atau masukan dari masyarakat dan konsumen ditangani dengan cepat, transparan, dan adil untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.
2. Mengurangi Dampak Negatif: Mengidentifikasi dan menangani potensi dampak negatif operasional, seperti isu lingkungan atau ketidaksesuaian produk, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial (SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).
3. Memperkuat Etika Bisnis: Membangun kepercayaan melalui respons yang tanggap terhadap keluhan, sejalan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

Saluran Pengaduan yang Tersedia

1. PT Perikanan Indonesia menyediakan berbagai opsi saluran pengaduan yang mudah diakses untuk memastikan inklusivitas dan kenyamanan bagi masyarakat dan konsumen. Saluran ini mencakup:
2. Situs Web Resmi: www.perikananindonesia.co.id, dengan formulir pengaduan daring yang memungkinkan pelaporan keluhan secara langsung.
3. Email: info@perikananindonesia.co.id, dikelola oleh Divisi Sekretaris Perusahaan untuk menangani keluhan terkait produk, layanan, atau dampak operasional.
4. Telepon: (021) 6679604, tersedia sebagai nomor layanan pelanggan untuk komunikasi langsung.
5. Faksimili: (021) 6690523, untuk pengaduan tertulis yang lebih formal.
6. Media Sosial: Interaksi melalui platform seperti Instagram: @pt_perikananindonesia dan Twitter: @perikananID, untuk menampung masukan atau keluhan secara cepat dan interaktif.

Proses Penanganan Pengaduan

Proses penanganan pengaduan dilakukan secara sistematis untuk memastikan respons yang cepat dan efektif:

1. Penerimaan Pengaduan: Semua keluhan yang masuk melalui saluran di atas dicatat oleh Divisi Sekretaris Perusahaan atau tim layanan pelanggan berdasarkan PPID di kanal website resmi Perusahaan.
2. Evaluasi dan Investigasi: Keluhan dianalisis oleh tim gabungan, melibatkan Divisi Quality Control (QC), Divisi Legal & Kepatuhan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI), untuk mengidentifikasi akar masalah, seperti ketidaksesuaian mutu produk atau dampak lingkungan.
3. Tindakan Korektif: Berdasarkan hasil investigasi, Perseroan mengambil langkah perbaikan, seperti perbaikan proses produksi, penggantian produk, atau mitigasi dampak lingkungan,

dengan memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 9001:2015, HACCP, dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

4. Umpam Balik kepada Pelapor: Pelapor menerima tanggapan resmi mengenai status dan penyelesaian keluhan, dengan target waktu respons yang singkat untuk menjaga kepuasan konsumen.
5. Pelaporan Internal: Keluhan signifikan dilaporkan kepada Direksi dan, jika diperlukan, dibahas dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk pengawasan lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

Dengan saluran pengaduan yang inklusif dan responsif, PT Perikanan Indonesia memastikan pelayanan yang adil dan berkualitas, mendukung ketahanan pangan nasional, dan berkontribusi pada pencapaian SDG 12, SDG 14, dan SDG 16 hingga tahun 2030. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.perikananindonesia.co.id atau info@perikananindonesia.co.id.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah program wajib yang harus dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dimana kegiatan tersebut merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan (TPB/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tatakelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Program TJSL dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil/ PUMK)
- b. Pemberian bantuan dan/ atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan dengan mengutamakan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaannya harus mengacu pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam istilah internasionalnya adalah *Sustainable Development Goal's* (SDG's) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program TJSL BUMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, program TJSL bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama, yaitu:

1. Pilar sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pilar lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyanga seluruh kehidupan.

3. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tatakelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai Negara berdasarkan hukum.

Dalam melaksanakan program TJSL, BUMN dapat melakukan Program Pendanaan UMK. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN. Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut:

1. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2. Belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
3. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dengan bidang dan/atau mendukung bisnis BUMN;
4. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
5. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar;
6. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum; dan
7. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Program Pendanaan UMK dilakukan melalui pemberian:

1. Modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pendanaan tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar:

1. 3% (tiga persen) efektif pertahun.
2. Suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif pertahun.
3. Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.
4. Dengan jangka waktu/ tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:

1. Prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi (3 %).
2. Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% sampai paling banyak 50% berdasarkan perjanjian.

Dalam Pelaksanaannya, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK CID (*Community Involvement and Development*) adalah program TJSL Non PUMK yang dijalankan oleh Unit TJSL.
3. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK Non CID (*Non Community Involvement and Development*) yaitu program TJSL Non PUMK yang dijalankan diluar Unit TJSL.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Berdasarkan surat dari Menteri BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 Tertanggal 10 November 2022 Perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Kerja Sama Program PUMK), pelaksanaan atau penyaluran pinjaman modal usaha dalam program PUMK disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pelaksanaannya PT Perikanan Indonesia boleh mengusulkan calon mitra binaan kepada PT BRI (Persero) Tbk kemudian PT BRI (Persero) Tbk akan melakukan verifikasi terhadap usulan calon mitra binaan tersebut.

PT Perikanan Indonesia tidak menyalurkan pinjaman modal usaha Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil /PUMK yang dilakukan secara kolaborasi dengan PT BRI (Persero) atau realisasi Penyaluran PUMK kolaborasi dengan PT BRI (Persero) Tbk sebesar Rp0,-.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK CID (Program TJSL Non PUMK yang Dijalankan Oleh Unit TJSL)

Pada periode Tahun 2024 realisasi pelaksanaan program TJSL Non PUMK CID PT Perikanan Indonesia sebesar Rp128.879.509,- dengan rincian:

No	Nama Program	TPB	Waktu Pelaksanaan	Realisasi Anggaran (Rp)
Pilar Sosial				107.839.995
1	PT Perikanan Indonesia Berbagi ikan	2	Januari	14.960.000
2	Berbagi Snack sehat untuk anak stunting	2	Januari	5.104.204
3	ID Food Sehati (kolaborasi ID Food Group)	2	Mei	2.852.517
4	Qurban	2	Juni	23.671.000
5	Bakti Sosial anak yatim piatu dalam rangka HUT RI	2	Agustus	880.000
6	PT Perikanan Indonesia Berbagi Ikan untuk UMKM	2	November	15.600.000
7	PT Perikanan Indonesia berbagi Makan Bergizi Gratis (MBG)	2	November	17.509.848
8	PT Perikanan Indonesia berbagi kasih di hari natal 2024	2	Desember	10.000.000

9	ID Food Cerdas (kolaborasi ID Food Group)	4	Mei	2.262.426
10	Penyaluran beasiswa anak nelayan/ pekerja sektor berprestasi	4	Juli	15.000.000
Pilar Ekonomi				2.330.667
1	ID Food Berkembang bersama UMKM (kolaborasi ID Food Group)	8	Mei	2.330.667
Pilar Lingkungan				18.708.847
1	Mudik bersama BUMN	11	April	13.639.264
2	ID Food Sobat Bumi (kolaborasi ID Food Group)	15	Mei	5.069.583
Pilar Hukum dan Tatakelola				-
-	-	-	-	-
Total				128.879.509

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK Non CID (Program TJSL Non PUMK yang dijalankan diluar Unit TJSL)

Program TJSL Non PUMK Non CID PT Perikanan Indonesia adalah assessment GCG oleh Unit GCG Divisi Hukum dan Kepatuhan yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024.

No	Nama Program	TPB	Waktu Pelaksanaan	Realisasi Anggaran (Rp)
Pilar Hukum dan Tata Kelola				
1	Assesment GCG	16	Desember	1.095.500
Total				1.095.500

Lain-lain

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

[OJK G.1]

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, PT Perikanan Indonesia menyusun Laporan Keberlanjutan tahunan untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasionalnya. Namun, untuk periode pelaporan tahun 2024, Laporan Keberlanjutan ini belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (Assurance Services Provider) pihak independen.

Meskipun demikian, PT Perikanan Indonesia menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan ini adalah benar, akurat, dan faktual. Keabsahan informasi ini didukung oleh proses penyusunan yang ketat, melibatkan:

1. Koordinasi Internal: Divisi Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan pengumpulan data dari berbagai unit kerja, seperti Divisi Keuangan & Akuntansi, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Legal & Kepatuhan, dan Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), untuk memastikan cakupan topik material yang lengkap.

2. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris: Laporan ini telah dievaluasi dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebelum penerbitan, sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.
3. Kepatuhan terhadap Standar: Penyusunan laporan mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI) dan regulasi nasional, seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
4. Sumber Data yang Terpercaya: Data ekonomi bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit, sementara data lingkungan dan sosial diverifikasi melalui audit internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan kerja sama dengan pihak ketiga tersertifikasi untuk pengelolaan limbah.

Lembar Umpan Balik

[OJK G.2]

Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax atau pos.

Data Diri

Nama : _____

Institusi/Perusahaan : _____

Telp./HP/Tel/Mobile : _____

Golongan Pemangku Kepentingan

Pelanggan	Mitra Kerja
Karyawan	Media Massa
Pemegang Saham	Masyarakat
Pemerintah dan DPR	

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai (beri tanda "V") di dalam kotak yang tersedia:

1. Laporan ini bermanfaat
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju

2. Laporan ini menggambarkan kinerja Perseroan dalam pembangunan berkelanjutan
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju

3. Laporan ini mudah dimengerti
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju

4. Laporan ini menarik
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju

5. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada keberlanjutan Perseroan
- Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju

Mohon mengisi dan memberikan pendapat dengan menjawab pernyataan berikut:

1. Bagian laporan mana yang paling bermanfaat?

2. Bagian laporan mana yang paling menarik?

3. Bagian laporan mana yang dinilai pengungkapannya masih kurang dan perlu ditambahkan ?

4. Mohon berikan saran/usul/komentar atas laporan ini?

Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon lembar umpan balik ini dikirimkan ke:

Sekretaris Perusahaan

PT Perikanan Indonesia

Alamat : Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman - Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara - 14440

Telepon: +6221-6679604

Fax : +6221-6690523

Website: <https://www.perikananindonesia.co.id/>

Email: corcomm@perikananindonesia.co.id

Tautan TPB/SDG dalam Standar GRI

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu agenda global 17 tujuan dan 169 target yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan serta perdamaian bagi semua orang di seluruh dunia.

Standar GRI adalah kerangka kerja pelaporan keberlanjutan global yang menyediakan praktik terbaik untuk mengkomunikasikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial sebuah organisasi secara publik. Standar ini bersifat modular dan terdiri dari tiga bagian utama: Standar Universal (berlaku untuk semua organisasi), Standar Sektor (untuk sektor tertentu), dan Standar Topik (berdasarkan topik spesifik). Penggunaan standar ini membantu organisasi dalam mengukur kemajuan, mengelola risiko, dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Berikut merupakan tautan TPB/ SDG's dalam standar GRI:

No	TPB/ SDG's	Target	Pengungkapan GRI	Sumber
1. Tanpa Kemiskinan				
1.1		Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem untuk semua orang di mana pun, yang saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari.	207-1, 207-2, 207-3, 207-4	GRI 207; Pajak 2019
1.2		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensinya menurut definisi nasional.	202-1, 203-2	GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
1.3		Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang tepat secara nasional untuk semua, termasuk golongan terbawah, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan yang substansial bagi masyarakat miskin dan rentan	207-1, 207-2, 207-3, 207-4	GRI 207; Pajak 2019

1.4		Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang tepat dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro.	203-2, 413-2a	GRI 203: Dampak ekonomi tidak langsung 2016 GRI 413: komunitas local 2016
2.Tanpa Kelaparan				
2.3		Pada tahun 2030, melipatgandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara ke lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.	411-1, 413 2a	GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016 GRI 413: Komunitas Lokal 2016
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
3.2		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak di bawah usia 5 tahun yang dapat dicegah, dengan semua negara bertujuan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian di bawah 5 hingga setidaknya 25 per 1.000 kelahiran hidup.	401-2a	GRI 401: Ketenagakerjaan 2016
3.3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit menular lainnya.	403-6b, 403-10	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018

3.4		Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental.	403-10	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
3.5		Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental	403-6b	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
3.6		Pada tahun 2020, mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera global akibat kecelakaan lalu lintas jalan.	403-9a, 403-9b	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
3.7		Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	403-6a	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
3.8		Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko finansial, akses ke layanan perawatan kesehatan esensial berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua.		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
3.9		Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.	305-1, 305-2, 305-3, 305-6a, 305-7, 306-1, 306-2a, 306-2a, 306-2c, 306-3a, 306-3b, 306-3c	GRI 305: Emisi 2016
4 Pendidikan Berkualitas				
4.3		Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas.	404-1a	GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016

4.4		Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan	404-1a	
4.5		Pada tahun 2030, menghapuskan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan.	404-1a	
5 Kesetaraan Gender				
5.1		Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun	202-1, 401-1, 404-1a, 401-3, 404-3a, 405-1, 405-2a, 406-1	GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016 GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016 GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan Setara 2016 GRI 406: Non-Diskriminasi 2016
5.2		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya.	408-1a	GRI 408: Pekerja Anak 2016

5.3		Mengakui dan menghargai perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan layanan publik, kebijakan infrastruktur dan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana layaknya secara nasional	203-1, 401-3	401-2,	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
5.5		Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan public.	2-9c, 2-10, 405-1		GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan Setara 2016
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak					
6.3		Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali yang aman secara global.	303-1a, 303-2a, 306-1, 306-2b,	303-1c, 303-4, 306-2a, 306-2c	GRI 303: Air dan Efluen 2018 GRI 306: Limbah 2020

6.4		Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan pengambilan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air.	303-1a, 303-3c, 303-5b	303-1c, 303-5a, GRI 303: Air dan Efluen 2018
6.6		ada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau.	304-1a, 304-3a, 304-4a, 306-3a, 306-3c, 304-2, 304-3b, 306-1a, 306-3b, 306-5a	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 GRI 306: Limbah 2020
6.a		Pada tahun 2030, memperluas kerja sama internasional dan dukungan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang dalam kegiatan dan program terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan kembali.	303-1a, 303-1c	GRI 303: Air dan Efluen 2018
6.b		Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat	303-1a	GRI 303: Air dan Efluen 2018 Water and Effluents 2018 setempat dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
7 Energi Bersih dan Terjangkau				
7.2		Pada tahun 2030, tingkatkan secara substansial porsi energi terbarukan dalam bauran energi global.	302-1, 302-2	GRI 302: Energi 2016
7.3		Pada tahun 2030, menggandakan tingkat peningkatan global dalam efisiensi energi.	302-1, 302-2a, 302-3a, 302-4a, 302-5a	GRI 302: Energi 2016
8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8.1		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	201-1	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016

8.2		Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya.	201-1, 203-2, 404-1a, 404-2	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016, GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016
8.3		Mendorong kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses ke jasa keuangan	203-2, 204-1a	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 GRI 204: Praktek Pengadaan 2016
8.4		Meningkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan Kerangka Program 10-Tahun untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dengan negara – negara maju memimpin	301-1a, 301-3, 302-2a, 302-4a, 306-2a, 301-2a, 302-1, 302-3a, 302-5a	GRI 301: Material 2016 GRI 306: Limbah 2020
8.5		Pada tahun 2030, mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama.	2-7a, 2-7b, 2-8a, 202-1, 202-2a, 203-2, 401-1, 401-2a, 401-3, 404-1a, 404-2, 404-3a, 405-1, 405-2b	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 202: Keberadaan pasar 2016 GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016 GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan Setara 2016
8.6		Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi kaum muda	401-1	GRI 401:

		yang tidak bekerja, berpendidikan atau pelatihan.		Ketenagakerjaan 2016
8.7		Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekutan dan penggunaan tantara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerjaan anak dalam segala bentuknya.	408-1 409-1	GRI 408: Pekerja Anak 2016 GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016
8.8		Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan pekerja tidak tetap.	2-30, 402-1, 403-1a, 403-1b, 403-2a, 403-2b, 403-2c, 403-2d, 403-3a, 403-4a, 403-4b, 403-5a, 403-7a, 403-8, 403-9, 403-10, 406-1, 407-1	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 402: Hubungan Buruh dan Manajemen 2016 GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 406: Non-Diskriminasi 2016 GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama 2016
9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur				
9.1		Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	201-1, 203-1,	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016

9.4		Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.	201-1, 201-1	203-1,	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
9.5		Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan belanja penelitian dan pengembangan publik dan swasta	201-1		GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016
10 Berkurangnya Kesenjangan					
10.3		Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan hasil, termasuk dengan menghapus undang-undang, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan undang-undang, kebijakan yang sesuai dan tindakan dalam hal ini	2-7a, 2-7b, 401-1, 404-1a, 404-3a, 405-2a,		GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016 GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan Setara 2016
10.4		Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara bertahap mencapai kesetaraan yang lebih besar.	207-1, 207-2, 207-3, 207-4		GRI 207: Pajak 2019
11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan					

11.2		Pada tahun 2030, menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan di jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia orang.	203-1	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
11.6		Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk kota terhadap lingkungan per kapita, termasuk dengan Memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan limbah perkotaan dan lainnya.	306-1, 306-2b, 306-3a, 306-4b, 306-4d, 306-5b, 306-5d	306-2a, 306-2c, 306-4a, 306-4c, 306-5a, 306-5c, 306-5d
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab				
12.2		Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien.	301-1a, 301-3a, 302-2a, 302-4a	301-2a, 302-1, 302-3a, 302-5a
12.4		Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang berwawasan lingkungan sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasannya ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	303-1a, 305-1, 305-3, 305-7, 306-2a, 306-2c, 306-3b, 306-4a, 306-4c, 306-5a, 306-5c	303-1c, 305-2, 305-6a, 306-1, 306-2b, 306-3a, 306-3c, 306-4b, 306-4d, 306-5b, 306-5d
12.5		Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	301-2a, 306-1, 306-2b, 306-3a, 306-4b, 306-4d, 306-5b, 306-5d	301-3a, 306-2a, 306-2c, 306-4a, 306-4c, 306-5a, 306-5c, 306-5d
12.8		Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang di manapun memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	417-1	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016
13 Penanganan Perubahan Iklim				

13.1		Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	201-2a, 302-1, 302-2a, 302-3a, 302-4a, 302-5a, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4a, 305-5a	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 302: Energi 2016 GRI 305: Emisi 2016
14 Ekosistem Laut				
14.2		Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan tindakan estorasi guna mencapai lautan yang sehat dan produktif.	304-1a, 304-2, 304-3a, 304-3b, 304-4a	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016
14.3		Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di semua tingkatan.	305-1, 305-2, 305-3, 305-4a, 305-5a, 305-7	GRI 305: Emisi 2016
15 Ekosistem Darat				
15.1		Pada tahun 2020, memastikan konservasi, pemulihian dan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar darat serta jasanya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	304-1a, 304-2, 304-3, 304-4a, 306-3a, 306-3b, 306-3c, 306-5a	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 GRI 306: Limbah 2020
15.2		Pada tahun 2020, mendorong implementasi pengelolaan berkelanjutan dari semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reboisasi secara global.	305-1, 305-2, 305-3, 305-4a, 305-5a, 305-7	GRI 305: Emisi 2016
15.5		Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam	304-1a, 304-2, 304-3, 304-4a	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016
16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				

16.1		Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun.	403-9a, 403-9b, 403-9c, 403-10, 410-1	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 410: Praktek Keamanan 2016
16.2		Mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	408-1	GRI 408: Pekerja Anak 2016
16.3		Memajukan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	2-23a, 2-23b, 2-26, 206-1, 416-2, 417-2, 417-3, 418-1	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 206: Perilaku Anti-Kompetitif 2016 GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016 GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016 GRI 418: Privasi Pelanggan 2016
16.5		Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	205-1, 205-2, 205-3, 415-1a	GRI 205: Anti-Korupsi 2016 GRI 415: Kebijakan Publik 2016
16.6		Mengembangkan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkatan	2-11, 2-15,	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021
16.7		Memastikan pengambilan keputusan yang tanggap, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan.	2-12, 2-9c, 2-10, 403-4a, 403-4b	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018

16.10		Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan kesepakatan internasional.	418-1	GRI 418: Privasi Pelanggan 2016
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				
17.1		Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestic untuk pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	207-1, 207-2, 207-3, 207-4	GRI 207: Pajak 2019
17.3		Memobilisasi sumber keuangan tambahan untuk negara berkembang dari berbagai sumber.	207-1, 207-2, 207-3, 207-4,	GRI 207: Pajak 2019

Indeks Konten GRI

Standar GRI	No	Judul	Halaman
GRI 2: Disclosure Umum 2021		Organisasi dan Praktek Pelaporannya	
	2-1	Detail Organisasi	25
	2-2	Entitas yang Disertakan Dalam Laporan Keberlanjutan Organisasi	9
	2-3	Periode Pelaporan, Frekuensi, dan Poin Kontak	2
	2-4	Penyajian Kembali Informasi	2
	2-5	Penjaminan Eksternal	23
		Aktivitas dan Pekerja	
	2-6	Aktivitas, Rantai Nilai, dan Hubungan Bisnis Lainnya	29
	2-7	Ketenagakerjaan	89 – 102
		Tata Kelola	
	2-8	Struktur dan Komposisi Tata Kelola	35
	2-9	Penominasian dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	42
	2-10	Ketua badan tata kelola tertinggi	42
	2-11	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	42
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam laporan keberlanjutan	42
	2-13	Komunikasi Kejadian Luar Biasa	56
		Strategi, Kebijakan dan Praktek	
	2-14	Pernyataan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan	47
	2-15	Menanamkan Komitmen Kebijakan	47
	2-16	Proses Untuk Meremediiasi Dampak Negatif	53
	2-17	Mekanisme Untuk Mencari Saran dan Mengemukakan Kekhawatiran	54
	2-18	Asosiasi Keanggotaan	32
GRI 3: Topik Material 2021		Topik Material	
	3-1	Proses penetapan topik material	23
	3-2	Daftar topik material	24
	3-3	Pengelolaan topik material	24
		DISCLOSURE TOPIK SPESIFIK	
GRI 3: Topik Material 2021		Kinerja Ekonomi	
	3-3	Pengelolaan Topik	24

GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan	77
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	80
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	96
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	79
GRI 3: Topik Material 2021	Keberadaan Pasar		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 3: Topik Material 2021	Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	29
GRI 3: Topik Material 2021	Perilaku Anti-Persaingan		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
Perilaku Anti Kompetitif 2016	206-1	Tindakan hukum untuk perilaku anti kompetitif, anti kepercayaan, dan praktik monopoli	63
GRI 3: Topik Material 2021	Pajak		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 207: Pajak 2019	207-1	Pendekatan terhadap pajak	78 – 79
	207-2	Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak	78
	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan perhatian yang berkaitan dengan pajak	79
GRI 3: Topik Material 2021	Material		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 301: Material 2016	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	82
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	82
	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	82
GRI 3: Topik Material 2021	Energi		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	82

	302-2	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	83
GRI 3: Topik Material 2021		Air dan Efluen	
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 303: Air dan Efluen 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	83
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	83
	303-3	Pengambilan air	83
	303-4	Pembuangan air	83
	303-5	Konsumsi air	83
GRI 3: Topik Material 2021		Keanekaragaman Hayati	
	3-3	Pengelolaan Topik Material	
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	83 – 84
	304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati	83 – 84
	304-3	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan	83 – 84
GRI 3: Topik Material 2021		Emisi	
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	84 – 87
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	84 – 87
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	84 – 87
	305-4	Intensitas emisi GRK	84 – 87
	305-5	Pengurangan emisi GRK	84 – 87
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	84 – 87
	305-7	Nitrogen Oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	84 – 87
GRI 3: Topik Material 2021		Limbah	
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	87 – 88
	306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	87 – 88
	306-3	Limbah yang Dihasilkan	87 – 88
	306-4	Limbah yang Dialihkan Dari Pembuangan	87 – 88
	306-5	Limbah yang Diarahkan ke Pembuangan	87 - 88

GRI 3: Topik Material 2021	Kepegawaian		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekutan Karyawan Baru dan Pergantian Karyawan	92
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	96
	401-3	Cuti melahirkan	96
GRI 3: Topik Material 2021	Relasi Pekerja / Manajemen		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 402: Relasi Pekerja /Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum mengenai perubahan operasional	95
GRI 3: Topik Material 2021	Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	97
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	99
	403-3	Layanan kesehatan kerja	101
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	100
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	101
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	100
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	99
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	100 – 101
	403-9	Kecelakaan kerja	102
	403-10	Penyakit akibat kerja	102
GRI 3: Topik Material 2021	Pelatihan dan Pendidikan		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	95
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	93
GRI 3: Topik Material 2021	Keberagaman dan Kesetaraan		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24

GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	96
GRI 3: Topik Material 2021			
	Non Diskriminasi		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	407-1	Operasi dan pemasok dimana hak untuk bebas berserikat dan melakukan perundingan bersama berisiko tidak terpenuhi	96
GRI 3: Topik Material 2021			
	Pekerja Anak		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 408: Pekerja Anak 2016	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	95
GRI 3: Topik Material 2021			
	Kerja Paksa		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 409: Kerja aksa Atau Wajib Kerja 2016	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	95
GRI 3: Topik Material 2021			
	Praktik-Praktik Keamanan		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 410: Praktik-praktik Keamanan 2016	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	95
GRI 3: Topik Material 2021			
	Masyarakat Lokal		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	102 – 107
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	102 – 107
GRI 3: Topik Material 2021			
	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	61
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	61
GRI 3: Topik Material 2021			
	Pemasaran dan Pelabelan		
	3-3	Pengelolaan Topik Material	24

GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk Pelabelan dan Informasi Produk dan Jasa	64
	417-2	Insiden Ketidakpatuhan terhadap Pelabelan dan Informasi Produk dan Jasa	64
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	64

Daftar Pengungkapan Kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:

No	Uraian	Halaman
A. Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	49
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
B.1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat:	
a.	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual;	9 - 12
b.	Pendapatan atau penjualan	9 - 12
c.	Laba atau rugi bersih;	9 - 12
d.	Produk ramah lingkungan; dan	9 - 12
B.2	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat:	
a.	Penggunaan energi	13
b.	Pengurangan limbah dan efluen; dan	13
c.	Pelestarian keanekaragaman hayati.	13
B.3	Aspek Sosial	13
C. Profil Perusahaan		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	27
C.2	Alamat Perusahaan	26
C.3	Skala Usaha, paling sedikit memuat:	
a.	Total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban	25 - 29
b.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	90 - 92
c.	Nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan saham; dan	25 - 26
d.	Wilayah operasional.	31 - 32
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	28 - 29
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	32
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	33 - 34
D. Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	
a.	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	19
b.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan	40
c.	Strategi Pencapaian Target	21
E. Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	40
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	19
F. Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan/ KINERJA EKONOMI	70

F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	72
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	72
KINERJA LINGKUNGAN HIDUP		
ASPEK MATERIAL		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	82
ASPEK ENERGI		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	82
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	83
ASPEK AIR		
F.8	Penggunaan Air	83
ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	83
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	84
ASPEK EMISI		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	84
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	87
ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	88
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	88
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	-
Kinerja Sosial		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	57
ASPEK KETENAGAKERJAAN		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	96
F.20	Upah Minimum Regional	93
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	89
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	95
ASPEK MASYARAKAT		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar	111 - 112
F.24	Pengaduan Masyarakat	108
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	111 - 112
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK / JASA BERKELANJUTAN		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk / Jasa Keuangan Berkelanjutan	68
F.27	Produk / Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	61
F.28	Dampak Produk / Jasa	61
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	61
LAIN LAIN		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	112
G.2	Lembar Umpan Balik	114

G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	22
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	135
